

Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

Realita di Luar Kandang II

Realita di Luar Kandang II

Industri peternakan dan kesehatan hewan nasional terus berkembang secara dinamis. Pemanfaatan sumber daya yang optimal dan adopsi teknologi modern terus dilakukan untuk mencapai usaha peternakan dan kesehatan hewan yang efisien. Seiring dengan itu, berbagai persoalan di bidang ini mengemuka baik di hulu hingga hilir. Tidak hanya masalah produksi atau produktivitas tetapi juga persoalan tata niaga yang membutuhkan solusi secara komprehensif. Mencermati berbagai dinamika yang ada di industri peternakan dan kesehatan hewan nasional, penulis tidak berpangku tangan dan hanya diam di kampus. Berbekal pengalaman lebih dari 15 tahun berkecimpung di bidang ini membuat penulis tidak segan untuk terjun langsung menggali berbagai informasi di lapangan bertemu dengan berbagai *stakeholder* khususnya peternak. Buku ini merupakan sebagian dari kristalisasi pemikiran penulis yang menyajikan analisa atas berbagai persoalan yang terjadi di bidang peternakan dan kesehatan hewan nasional termasuk memberikan alternatif solusi dalam menyelesaikannya.

Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

Realita di Luar Kandang II



PT PERMATA WACANA LESTARI
2016

PT Permata Wacana Lestari

Realita di Luar Kandang II

Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

Mei 2016



PERHATIAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Realita di Luar Kandang II

Penulis

Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

Editor

Yopi Safari

Proofreader

Indri Oktavia

Desain sampul dan tata letak

M. Sewoko

Foto-foto

Dokumentasi TROBOS

Cetakan Pertama, Mei 2016

ISBN : 978-979-15376-9-8

Penerbit

**PT Permata Wacana Lestari
(Penerbit Majalah TROBOS)
Jakarta – Indonesia**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.**

Prakata

Permasalahan yang muncul dalam industri dan bisnis peternakan yang mencakup semua komoditas ternak telah menyadarkan kita semua bahwa potensi peternakan yang begitu besar belum dikelola secara maksimal. Di sektor hulu, pembibitan ternak lokal masih lemah jika dilihat dari kuantitas dan kualitas ternak indukannya. Di sektor budidaya masih banyak ketimpangan antara peternak raksasa dan peternak gurem. Di sektor hilir masih carut marut terkait dengan penanganan, pengolahan, dan pemasaran produk ternaknya. Permasalahan di semua sektor tersebut membuat produk bangsa kita tidak dapat bersaing di pasar global.

Sejak 2001 hingga saat ini saya mengamati secara seksama berbagai permasalahan tersebut dan hasilnya saya tuangkan dalam tulisan yang umumnya dipublikasikan di majalah agribisnis TROBOS dan sebagian kecil di media massa lainnya. Hampir separuh tulisan terpublikasi tersebut telah dikompilasi dalam buku bertajuk *Realita di Luar Kandang*.

Alhamdulillah atas niat dan upaya teman teman di TROBOS, buku *Realita di Luar Kandang* jilid 2 (RDLK 2) dapat diterbitkan oleh PT PERMATA WACANA LESTARI berkat kerjasama dengan multi pihak, hingga Bedah Buku ini terselenggara pada 4 Mei 2016. Semoga kumpulan tulisan ini dapat dijadikan inspirasi bagi pembaca yang ingin ikut ambil bagian dalam mewujudkan industri dan bisnis peternakan di Indonesia.

Atas terbitnya buku RDLK 2 ini, saya ingin menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasih tak terhingga kepada seluruh tim TROBOS termasuk Purnomo, Yopi, Woko, Lia, dan Jefri atas dedikasinya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Indri Oktavia atas waktu dan energinya untuk membaca dan mengoreksi semua tulisan yang dipublikasikan ini. Buku ini saya dedikasikan kepada almarhum Wahyudi Mohtar, pendiri dan mantan pemimpin umum majalah TROBOS yang memberi kesempatan bagi saya untuk berkreasi dan membukakan jaringan kepada para pelaku industri dan bisnis peternakan di Indonesia. Untuk almarhumah istriku (Sri Sulandari) dan dua anakku (Andry dan Endy), terima kasih banyak atas kebersamaannya yang membuat rumahku seperti surgaku.

Seperti pada penerbitan RDLK jilid 1 di 2013 (sebelum menjadi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan), saya juga tidak ingin memperoleh dan menerima dana hasil penerbitan dan bedah buku RDLK jilid 2 ini.

Daftar isi

Prakata	v
Daftar isi	vii

Sumber Daya Peternakan

Membentuk Generasi Peternakan Baru.....	2
Saatnya Berubah !	7
Peternakan Harus Dibangun dari Pinggir.....	10
Harus Ada Keberpihakan Bagi Peternak	13
Bersinergi Membangun Peternakan Sapi	16
Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak.....	19
Ternak Lokal: Definisi Genetis atau Definisi Geografis?	22
Sekolah Peternakan Rakyat (SPR-1111)	26
SPR Mendorong Peternak Berdaulat	31
Moratorium Riset dan Kajian Peternakan.....	36
Peternakan di Bawah Jokowi – JK.....	39
Revisi UU No.18 Tahun 2009	44
Urus Peternaknya Dulu Jika Ingin Swasembada Daging.....	49
Sapi Indonesia versus Australia	54
Pembodohan Sistematis Terhadap Peternak	57
Data Akurat untuk <i>Grand Design</i> Perunggasan.....	62
Unggas Perlu Perlakuan Sama Seperti Sapi.....	65

Pembibitan

Salah Kaprah Pemahaman Bibit	70
Segera Benahi Pembenuhan dan Pembibitan !!!	73
Supaya Kualitas & Kuantitas Ternak Lokal Tak Tergerus.....	76
Genetika dan Pemuliaan Kuda.....	79

Ternak Betina Produktif

Ternak Ruminansia Betina Produktif	96
Impor Sapi Betina Produktif, Mendesak !	99
Dilema Sapi Betina Produktif	102

Introduksi Teknologi

IB Bukan untuk Persilangan Saja !!!	106
BET Cipelang : Pabrik Embrio di Lereng Gunung Salak	109

Mandulisasi Sapi Lokal Jantan	113
Tata Niaga Ternak	
Deregulasi di Bidang PKH.....	118
Mencermati Kisruh Daging Sapi	122
Bersama Tingkatkan Kampanye Produk Peternakan.....	125
Kapan Tak Lagi Impor Daging Sapi ?.....	129
Daging Sapi	134
Permasalahan Kecukupan Protein Hewani dan Solusinya.....	137
Solusi Daging Sapi.....	148
Swasembada Daging	
Belajar dari Sapi	154
Setelah <i>Blue Print</i> Swasembada Daging Final.....	157
Swasembada Daging : 30 Tahun atau 3 Tahun ?	160
Jejak Langkah	
Muladno, Dirjen Hasil Lelang	164
Parent Stock Mulai Dikurangi	169
Konsolidasi Perunggasan	173
Dari Para Ketua Asosiasi untuk Muladno	177
Biodata	187

Sumber Daya Pernakan

Membentuk Generasi Peternakan Baru

Indonesia adalah negara yang besar, dengan jumlah penduduk tak kurang dari 250 juta jiwa. Menjadi hal luar biasa pula bagi industri peternakan Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehingga kian merangkak naik. Begitu juga perubahan gaya hidup menjadi penggerak berkembangnya industri peternakan. Gaya hidup yang berubah, memberikan peluang besar bagi industri peternakan nasional.

Tapi disayangkan, besarnya peluang industri peternakan ini belum dikelola dengan baik oleh para stakeholder peternakan baik di unggas maupun ruminansia. Para pelaku peternakan tidak bersatu. Faktanya, mereka “perang”, mementingkan diri sendiri tanpa mengurus masalah dalam negeri yang semestinya menjadi kepentingan bersama.

Tuntutan luar negeri sebenarnya lebih penting, karena negara luar sedang menyerang Indonesia sebagai pasar peternakan. Tapi hal sebaliknya yang terjadi di dalam negeri, ketika negara luar sedang berusaha merambah konsumen kita, produsen dalam negeri malah acuh tanpa memikirkan negara luar.

Pemandangan ini yang terlihat dari industri peternakan Indonesia. Seperti fatamorgana, meskipun terlihat berkembang tapi kenyataannya jalan di tempat. Sekali pun berkembang, hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu atau pribadi yang kuat, sementara peternak mandiri yang mayoritas berdiri untuk bangsa tidak mendapatkan keuntungan dari berkembangnya industri itu sendiri.

Hanya sekelompok kecil yang naik tajam, tapi banyak peternak-peternak lain ketinggalan. Ada kejomplangan jarak antar kedua kelompok ini. Gap yang jauh ini dikarenakan kurangnya peran serta pemerintah. Berkoar-koar pro rakyat, namun nyatanya tidak dapat mengangkat kelompok mayoritas, akhirnya yang kecil makin tertindas sementara yang besar berkembang sesuka hati.

Ini yang membuat kondisi peternakan Indonesia runyam, akibatnya ternak-ternak eksotik atau impor berkembang cepat karena ditinggalkan oleh peternak besar, sementara peternak rakyat yang kecil makin ludes, makin habis. Apalagi peternakan rakyat dikelola secara tradisional, dipegang oleh pelaku yang berpendidikan rendah ditambah hanya memiliki modal seadanya. Situasi ini terus berlangsung.

Sebagai orang nomor satu di bidang peternakan dan kesehatan hewan, saya berniat memperbaiki kondisi peternakan secara menyeluruh. Ingin membuktikan jika, pemerintah itu bisa dan hadir untuk stabilisasi industri peternakan. Artinya, peternak kecil dihidupkan kembali, peternak besar di tata, sehingga semua pelaku membentuk harmonisasi membangun bangsa Indonesia melalui peternakan.

Akan ada dua peraturan baru untuk dua klasifikasi ternak. Kelompok itu adalah non ruminansia yang diwakili ayam ras dan kelompok kedua adalah ruminansia yang diwakili sapi potong.

Perbaikan Industri Perunggasan

Dalam dunia perunggasan, telah terjadi perang bisnis dengan kepercayaan masing-masing karena datanya tidak ada yang bisa dipegang, semua stakeholder tidak percaya terhadap data tersebut. Baik pemerintah, peternak, dan asosiasi memiliki data sendiri. Hal ini yang membuat kebijakan menjadi rancu dan menghasilkan produk signifikan.

Maka itu, langkah pertama yang akan dilakukan dalam perbaikan keruwetan masalah yang terjadi adalah urgensi menghasilkan satu data yang akurat. Pemerintah, dalam hal ini telah menghubungi seorang tokoh yang ahli dalam survei untuk memverifikasi data yang telah dilaporkan 15 CEO perusahaan *breeding farm* (pembibitan).

Sebelumnya perusahaan *breeding farm* telah ditugaskan untuk mengumpulkan data produksi yang dimiliki dan disajikan dalam bentuk



Tindakan nakal bisa dicegah bila pemerintah tegas, saya sudah memegang janji, akan pegang konstitusi dan yang melanggar akan disikat. Mengkaji ulang berbagai kebijakan termasuk klasifikasi dan definisi akan ditata untuk melahirkan dengan kebijakan baru. Ibaratnya seperti membuat generasi peternakan yang baru.

laporan, telah dideklarasikan, dan ditandatangani oleh direktur utama. Setelah itu, kami akan melakukan verifikasi, menggunakan jasa surveyor internasional untuk mengkroscek validitas data yang telah dilaporkan oleh setiap perusahaan.

Apabila sudah akurat, data tersebutlah yang akan menjadi acuan penetapan aturan. Sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan), akan ditetapkan porsi setiap perusahaan, insentif yang akan diberikan untuk perusahaan pemilik orientasi impor, dan porsi untuk peternak yang bisa mandiri.

Kita akan duduk bersama menyamakan persepsi dan tidak ada lagi perbedaan, makanya perlu ada verifikasi. Pelaksanaan seperti ini, harus dijalankan dengan menyakinkan para pemilik peternakan, untuk dirangkul secara bersama agar tercipta suatu keseimbangan, semua untung, dan ada keberlanjutan.

Berikutnya adalah penataan dari hulu, budidaya, hingga titik hilir menjadi penting. Bila dari hulu sudah baik, suatu waktu bisa dilepas, pemerintah akan mendorong semua perusahaan untuk tumbuh. Lalu secara bersama-sama menggenjot permintaan seperti melalui berbagai kampanye yang terus diadakan. Seiring dengan itu, penataan hilir semakin digalakkan.

Perusahaan perunggasan pun harus sepakat menggalang dana dari keuntungan bisnis untuk riset dan pengembangan serta kampanye. Cara kerja ini bisa mencontoh pada industri sawit yang telah berhasil melaksanakan *check off* (jimpitan). Saya yakin di unggas maupun sapi bisa dilakukan.

Ternak Lokal dan Ruminansia

Apabila ayam ras sudah modern, dan parameter teknisnya biasanya sudah kecil. Hal berbeda terjadi di ayam kampung atau ternak ung-

gas lokal lainnya. Pemilik dari peternakan unggas lokal banyak sekali, tersebar dimana-mana, dan angkanya sulit dikatakan akurat. Untuk itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi peternak kecil sehingga bisa mengkonsolidasikan ternaknya. Ini menjadi filosofi pada peternakan rakyat karena diberbagai daerah ada peternakan rakyat.

Pengaturan ruminansia plus ternak lokal akan memakai cara prinsip Sekolah Peternakan Rakyat (SPR). Setelah peternak konsolidasi, membentuk paguyuban sendiri, menghitung sendiri, lalu perwakilan atau tokoh dari setiap paguyuban melaporkan ke pemerintah.

Sistem seperti SPR ini sudah ada dan telah berjalan. Sebelum menjabat sebagai Dirjen PKH Kementan, telah ada SPR binaan di 11 titik lokasi. Hingga kini program SPR telah berkembang mencapai 221 lokasi. Lokasi-lokasi tersebut kebanyakan diperuntukan untuk sapi, kambing, domba, dan kerbau. Tapi bukan hal mustahil pula akan diimplementasikan untuk unggas lokal.

Peternakan Baru

Dari berbagai upaya yang dilakukan di atas, pemerintah akan menghitung secara rutin untuk mengklasifikasikan usaha-usaha peternakan yang ada. Setelah data terkumpul, langkah dari pemerintah akan mengkaji ulang semua peraturan. Contohnya, peraturan tentang telur konsumsi, dari ayam petelur (*layer*) yaitu bagaimana bila ada telur tetas dijual sebagai telur konsumsi, hal ini yang akan menyebabkan banjir di pasaran sehingga perlu ada peraturan tegas, bila menjual telur seperti itu akan dikenakan sanksi.

Tindakan nakal bisa dicegah bila pemerintah tegas, saya sudah memegang janji, akan pegang konstitusi dan yang melanggar akan disikat. Mengkaji ulang berbagai kebijakan termasuk klasifikasi dan definisi akan ditata untuk melahirkan dengan kebijakan baru. Ibaratnya seperti membuat generasi peternakan yang baru.

Semua kendala dan penghalang datang dari orang-orang yang memiliki niat jelek. Tapi saya optimis yang bagus akan lebih banyak dari yang jelek. Tinggal berani atau tidak. Tapi saya berani, karena saya yakin semua pihak akan mendukung.

Seperti tindakan konsolidasi, mungkin yang akan menghalangi adalah belantik. Tetapi pemerintah tidak ingin membunuh belantik, tapi akan lebih diperankan dalam perbaikan pemasaran. Intinya adalah membuat peternakan yang baru dan semua pihak dirangkul menjadi

Sumber Daya Peternakan

komponen bangsa.

Memang wajar setiap asosiasi mempunyai kepentingan sendiri, tapi pemerintah akan tetap mendahulukan kepentingan nasional. Pemimpin yang berhasil itu adalah orang yang bisa menggerakkan semua elemen. Semua pihak harus bekerja sama baik pemerintah maupun swasta. Mari bersama memperbaiki peternakan nasional.■

Juli 2015

Saatnya Berubah !

Pada April dan Oktober 2014, agenda limatahunan bangsa Indonesia akan digelar. Dimulai dengan pemilihan umum anggota legislatif dan dilanjutkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden RI. Terlepas dari partai apapun yang akan berkuasa dan siapapun yang akan menjadi RI-1 dan RI-2, persaingan antar bangsa di komunitas internasional akan semakin ketat. Para pemimpin bangsa dituntut bekerja semakin keras dan cerdas untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memenuhi kesejahteraan warganya.

Terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan manusia, sumber daya alam Indonesia dan seluruh potensinya harus lebih banyak dikelola sendiri dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan bagi generasi muda Indonesia. Di sisi lain peluang pekerjaan yang tersedia di luar negeri harus pula direbut secara lebih banyak lagi.

Harus ada perubahan besar dalam membangun peternakan di Indonesia. Perubahan dari nuansa “perdagangan” ke nuansa “peningkatan produktivitas” ternak. Banyak terobosan yang perlu dibuat untuk menjadikan peternakan di Indonesia lebih mandiri dan peternaknya berdaulat.

Era globalisasi yang telah berlangsung selama ini harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Indonesia dan bukan hanya menjadi “good boy” bagi bangsa lain dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar global saja. Para pemimpin bangsa harus menjadikan manusia Indonesia lebih cerdas dan lebih profesional agar mampu lebih bersaing di era keterbukaan ini. Termasuk di dalamnya adalah manusia profesional di bidang peternakan.

Dalam lima puluh tahun perjalanan fakultas peternakan di Indonesia, puluhan ribu sarjana peternakan telah dihasilkan. Namun demikian, tingkat pertumbuhan populasi ternak lokal tampaknya lebih lambat dari pertumbuhan populasi manusia di Indonesia. Populasi sapi perah dan sapi pedaging lokal belum dapat memenuhi sepenuhnya keperluan konsumen di dalam negeri. Populasi kerbau menurun drastis. Populasi kambing dan domba juga berkurang secara signifikan.

Kalau sekarang pelaku bisnis perunggasan hanya mengimpor bibit



ayam ras pedaging dan ayam ras petelur maupun mengimpor bakalan sapi dan daging sapi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, perlu dikhawatirkan juga bahwa suatu saat nanti jangan-jangan kita akan mengimpor kambing dan domba dari luar negeri. Jika ini terjadi, sangat tidak salah apabila ada pihak yang berpendapat bahwa para sarjana peternakan dan para pelaku di bidang peternakan memang tidak mau (atau tidak mampu) memanfaatkan kekayaan lokal secara optimal. Artinya, ternak lokal akan dibiarkan berkembang secara tradisional saja, tergantung dari para peternak kecil dengan skala kepemilikan 2-3 ekor sapi per peternak.

Oleh karena itu, harus ada perubahan besar dalam membangun peternakan di Indonesia. Perubahan dari nuansa “perdagangan” ke nuansa “peningkatan produktivitas” ternak. Dapat dikatakan, saat ini nuansa “perdagangan” lebih kuat daripada nuansa “peningkatan produktivitas” karena kebijakan pemerintah dalam pengembangan peternakan selama ini lebih banyak menguntungkan para pedagang daripada para peternak.

Bukti empiris menunjukkan, rancangan anggaran di Kementerian Pertanian untuk peternakan lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan ternak daripada untuk hal yang terkait dengan peningkatan produktivitas ternak. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional juga menunjukkan anggaran penelitian di perguruan tinggi yang berorientasi ke pengembangan petani kecil (termasuk peternak) hanya kurang dari 3 % per tahun (hasil evaluasi kinerja penelitian di LPPM IPB).

Yang juga menyedihkan, subsidi pendidikan untuk fakultas yang bergerak di sektor hulu (termasuk komoditas ternak) tidak diprioritaskan. Sebagai fakultas yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya genetik ternak dan sumber daya alamnya seharusnya diberi subsidi jauh lebih besar daripada subsidi untuk fakultas yang mengembangkan barang dan jasa saja (atau disebut fakultas hilir). Fakultas yang disebut terakhir ini sangat laku di masyarakat sehingga mestinya menerima subsidi lebih rendah daripada fakultas hulu. Kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi juga lebih berorientasi untuk mendorong penelitian ke arah yang lebih cepat menghasilkan produk riil dalam jangka pendek.

Disadari atau tidak, mungkin saja kebijakan pemerintah tersebut telah membuat pelaku bisnis, pengambil kebijakan, dan praktisi di bidang peternakan lebih banyak berpikir tentang strategi menghadapi serangan banjir impor dan tidak ada satupun yang berpikir menyusun strategi “menyerang” negara lain untuk mengisi pasar domestik mereka. Fenomena ini terjadi pada saat diskusi terbuka dalam forum Indonesia Poultry Club (IPC) di Hotel Santika TMII pada 19 Februari 2014 lalu.

Oleh karena itu, perubahan besar pembangunan di bidang peternakan harus dilakukan dengan membalik orientasi kebijakan pemerintah tersebut di atas. Anggaran Kementerian Pertanian untuk peternakan harus lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas peternak dan kualitas sarana usaha peternakannya; anggaran penelitian dari Kementerian Pendidikan Nasional di bidang peternakan harus diarahkan ke pemberdayaan peternak dan ke pemenuhan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peternak secara langsung; subsidi untuk fakultas peternakan sebagai salah satu penjaga dan pengawal keberadaan sumber daya alam termasuk ternak milik bangsa Indonesia harus lebih besar daripada subsidi untuk fakultas pengembang jasa dan barang. Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi harus lebih banyak mendorong berkembangnya pusat-pusat unggulan di sentra peternakan yang tentu saja merupakan sentra komunitas peternak juga.

Semoga pemerintahan baru nanti tidak menjalankan kebijakan “business as usual” yang selama ini telah berjalan. Banyak terobosan yang perlu dibuat untuk menjadikan peternakan di Indonesia lebih mandiri dan peternaknya berdaulat.■

Peternakan Harus Dibangun dari Pinggir

Sudah sejak lama istilah “masyarakat terpinggirkan” dilekatkan pada komunitas *wong cilik*. Komunitas ini salah satunya mengacu pada petani atau peternak atau pekebun atau nelayan berskala kecil yang sebenarnya mendominasi penduduk Indonesia.

Tapi sejak lama pula, pemerintah terkesan tidak prokomunitas *wong cilik* itu. Pemerintah sering hanya membanggakan perkembangan ekonomi makro dan suksesnya pembangunan fisik di kota-kota besar. Akibatnya, jurang perbedaan kaya-miskin semakin melebar.

Saya terperangah ketika Jokowi dalam kampanyenya menyatakan “Indonesia harus dibangun dari pinggir.” Pernyataan itu sangat tepat dan seharusnya demikian. Dalam konteks peternakan, daerah pinggir secara geografis berarti daerah di kecamatan terpinggir dalam satu kabupaten atau berbatasan dengan kecamatan di kabupaten lainnya. Jika kabupaten itu terletak di provinsi yang berbatasan dengan wilayah negara lain, maka daerah pinggiran itu juga berarti daerah perbatasan negara.

Daerah pinggir seperti itu biasanya paling terbelakang ditinjau dari seluruh aspek kehidupannya. Saya kaget ketika membaca laporan kegiatan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) Institut Pertanian Bogor (IPB) di satu daerah pinggiran Kabupaten Bojonegoro.

Lokasinya terisolir dan untuk mencapai daerah itu harus melintasi hutan sepanjang tujuh kilometer. Ada akses jalan menuju ke lokasi tetapi tidak begitu bagus. Di laporan tertulis bahwa ada sekolah dasar tetapi sering kosong. Anak sekolah tidak bisa bernyanyi Indonesia Raya.

Pengajian warga jarang diselenggarakan. Banyak anak putus sekolah. Banyak pula lulusan sekolah yang hanya duduk-duduk saja (pengangguran). Kondisi daerah pinggiran seperti itu rasanya masih banyak ditemukan di lokasi lainnya.

Peternakan mestinya harus dibangun dari daerah seperti itu. Ternak dapat dipelihara dimana saja termasuk di lahan marjinal. Ternak mampu mengubah lahan marjinal menjadi lahan produktif karena kotorannya.

Ternak juga dapat digunakan menjadi sarana transportasi maupun digunakan tenaganya untuk membajak tanah persawahan. Kotoran

ternak juga dapat diubah menjadi sumber energi seperti gas bio untuk berbagai kebutuhan hidup. Masih cukup banyak manfaat ternak bagi pengembangan manusia dan alamnya di daerah pinggiran seperti itu.

Upaya yang sedang dilakukan oleh PT Berdikari bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB di lokasi SPR tersebut dapat dijadikan teladan. Di situ akan dimulai kemitraan usaha penggemukan 100 ekor sapi dan nantinya akan dikembangkan sampai maksimum 600 ekor, tergantung kesepakatan.

PT. Berdikari menyediakan modal usaha dan modal kerja termasuk pengadaan sapi dan pembangunan kandang koloni. Peternak menyediakan lahan untuk lokasi kandang koloni dan setiap hari merawat dan memberi pakan ternaknya. Peternak diberi kompensasi untuk kerja hariannya dan di akhir periode usaha penggemukan, keuntungan dibagi secara proposional antara peternak dan PT Berdikari.

Peternakan mestinya harus dibangun dari daerah pinggiran. Masih cukup banyak manfaat ternak bagi pengembangan manusia dan alamnya di daerah pinggiran. Kesuksesan yang terjadi di daerah pinggiran akan lebih mudah menggema untuk memotivasi daerah lain yang lokasinya lebih ke tengah.

Sapi bakalan yang akan digemukkan nantinya disediakan oleh peternak yang tergabung dalam SPR. Ada sekitar 500 indukan sapi yang dapat menghasilkan sekitar 250 ekor sapi jantan bakalan per tahun.

Konsolidasi peternak dalam mengelola ternaknya dikomandani oleh Dewan Perwakilan Pemilik Ternak (DPPT) yang terdiri atas sembilan tokoh peternak. DPPT didampingi seorang manajer berkualifikasi sarjana. Berbagai hasil penelitian IPB diterapkan di situ dan diajarkan langsung oleh para dosen yang menguasai teknologinya. Penyebarluasan hasil penelitian IPB kepada peternak dilakukan oleh sembilan anggota DPPT.

Melalui kemitraan usaha penggemukan yang dilakukan, sumber air harus disediakan, infrastruktur harus diperbaiki, dan lahan penanaman hijauan pakan ternak harus disediakan dan diperluas areanya. Dalam kemitraan ini, posisi DPPT setara dengan PT Berdikari. IPB, dan Dinas Peternakan setempat berada di belakang DPPT. Komitmen masing-ma-



sing pihak yang terlibat dalam usaha kemitraan ini membuat para peternak rela meninggalkan pekerjaan lain dan fokus di usaha peternakan.

Dalam waktu empat tahun, saya yakin kondisi daerah pinggiran itu akan berubah menjadi kawasan hijau yang subur makmur. Kehidupan masyarakat akan lebih baik dan anak sekolah menatap masa depannya secara lebih optimis.

Kesuksesan yang terjadi di daerah pinggiran akan lebih mudah menggema untuk memotivasi daerah lain yang lokasinya lebih ke tengah. Semoga Presiden Jokowi selalu konsisten dengan pernyataannya untuk membangun Indonesia, termasuk membangun peternakan, dari pinggir.■

Desember 2014

Harus Ada Keberpihakan Bagi Peternak

Masalah daging masih ramai. Apalagi dengan tertangkapnya Presiden Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu, yang disangka terlibat dalam kasus impor daging. Harga daging juga masih terus bergoyang.

Dilaporkan bahwa di Halmahera, harga daging sapi sudah menembus Rp 110.000 per kg tetapi di Salatiga Jawa Tengah dilaporkan hanya Rp 75.000 per kg. Dua informasi tersebut sangat dapat dipercaya sumbernya. Rentang harga daging sangat lebar tetapi yang jelas peternak merasa nyaman dan tentram dengan harga sapi sebesar Rp 30.000 sampai Rp 34.000 per kg berat hidup.

Dengan rentang harga daging seperti itu, sulit melakukan penilaian dalam memutuskan apakah perlu menambah kuota impor atau mempertahankan kuota impor sesuai skenario swasembada daging. Pemerintah pastinya bertahan dengan target swasembada 2014 dengan hanya memberi izin impor maksimum 10% dari total kebutuhan pada 2014 nanti sedangkan para importir pesimis dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Penulis malah galau dengan situasi setelah 2014 jika semua pemangku kepentingan dalam industri persapian tidak berbuat maksimal selama



20 bulan ke depan mulai sekarang. Bukan hanya pemerintah tetapi juga peternak dan pelaku usaha di bidang industri pengolahan daging.

Seluruh pemangku kepentingan di bidang ini harus bersinergi untuk memberdayakan 6,2 juta peternak sapi sebagai tulang punggung penyedia daging secara nasional. Selama ini sebagian besar dari mereka hanya dibantu agar punya ternak dan dapat beternak tetapi kurang memperoleh bimbingan agar menjadi pengusaha ternak.

Tidak mengherankan jika nasib sebagian besar peternak tersebut tidak kunjung berubah sejak zaman Majapahit hingga zaman reformasi saat ini. Kondisi peternak semakin parah jika jumlah impor daging tidak dikendalikan sebagaimana pernah terjadi pada 2009–2010 lalu.

Pemerintah harus menjadi fasilitator dan dinamisator dalam mewujudkan perubahan mendasar bagi peternak rakyat dan harus pula dibantu oleh pelaku usaha industri pengolahan sapi yang menjadi pasar bagi peternak yang berbisnis secara kelompok. Kalangan legislatif juga harus memberi dukungan secara politis dalam rangka mensukseskan upaya pemberdayaan peternak secara berkesinambungan.

Untuk jangka panjang, usaha 6,2 juta peternak berskala kecil harus dibenahi agar negara ini tidak tergantung pada importasi saja seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan protein hewani. Saat ini, kondisi peternak berskala kecil di Indonesia jika dibandingkan dengan peternak di Australia dapat diumpamakan seperti kondisi angkot di Bogor (analogi untuk peternak Indonesia) dan Garuda Indonesia (analogi untuk peternak Australia).

Dua kondisi yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan ini dihadapkan satu sama lain secara ekonomis. Pakai rumus apapun, tidak layak menyebut mana yang kalah dan mana yang menang antara angkot Bogor dan Garuda Indonesia karena keduanya tidak dapat dibandingkan.

Selama ini 6,2 juta peternak di Indonesia adalah juga manajer dari “perusahaan” peternakannya sendiri walau masing-masing hanya memelihara 1–3 ekor. Karena mereka manajer sekaligus pemilik, mereka semauanya saja dalam mengelola ternak dan sesukanya saja dalam menjual ternak hasil peliharaannya. Ketika butuh uang dijual, ketika tidak butuh tetap dipelihara. Tidak peduli sapi jantan atau betina, tidak peduli

pula apakah sapi betina bunting atau tidak bunting.

Penulis tidak bermaksud agar pemerintah mengubah peternak Indonesia yang persis berperilaku seperti moda transportasi angkot Bogor menjadi seperti peternak Australia yang persis moda transportasi Garuda Indonesia. Penulis hanya berharap agar pemerintah berpihak dan memberi kemudahan kepada peternak sebagaimana pemerintah memberi banyak kemudahan pada moda transportasi bus bandara DAMRI.

Bus ini diberi hak eksklusif untuk antar jemput penumpang ke dan dari bandara, disediakan terminal tersendiri, harga tiket juga ditentukan, pasarnya juga sudah terjamin keberlanjutannya. Ini namanya ada keberpihakan pemerintah demi kepentingan publik.

Keberpihakan seperti itu seharusnya diberikan juga kepada peternak berskala kecil melalui berbagai fasilitas yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah “manajer” dari 6,2 juta menjadi jauh lebih sedikit. Artinya, harus ada upaya dari semua pemangku kepentingan agar peternak mau diorganisir untuk berbisnis secara kelompok. Bukan hanya berkelompok tetapi tidak mengerti bisnis.

Berkurangnya jumlah “manajer” bukan berarti berkurangnya jumlah peternak tetapi justru dapat menambah jumlah peternak jika bisnis secara berkelompok tersebut dapat berkembang dan lebih menguntungkan. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi memang pekerjaan sangat sulit. Kata kuncinya adalah bahwa harus ada perubahan cara berpikir, harus mengerti manajemen dan organisasi yang baik, harus mengerti makna efisiensi dan produktivitas, harus memahami betul cara beternak yang benar dan baik, dan harus-harus lainnya.

Pemerintah harus menjadi fasilitator dan dinamisator dalam mewujudkan perubahan mendasar bagi peternak rakyat dan harus pula dibantu oleh pelaku usaha industri pengolahan sapi yang menjadi pasar bagi peternak yang berbisnis secara kelompok. Kalangan legislatif juga harus memberi dukungan secara politis dalam rangka mensukseskan upaya pemberdayaan peternak secara berkesinambungan.■

April 2013

Bersinergi Membangun Peternakan Sapi

Data statistik meyakinkan publik bahwa laju pertumbuhan ternak sapi lokal di Indonesia tidak dapat mengimbangi kebutuhan penduduk akan daging sapi. Solusi jangka pendek yang telah diambil pemerintah adalah impor daging atau impor ternak sapi bakalan, maksimum 10% dari total kebutuhan.

Namun kebijakan impor ini harus bersifat temporer jika bangsa ini tidak ingin terjebak dalam ancaman kedaulatan pangan asal ternak. Satu-satunya solusi jangka panjang untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah memperbaiki kondisi peternak dan ternak sapi lokal Indonesia.

Lebih dari 98% populasi ternak sapi lokal dimiliki peternak kecil dengan rata-rata kepemilikannya 1-3 ekor per peternak. Dengan jumlah sapi potong sekitar 14,8 juta ekor (sensus PSPK 2011), diperkirakan ada sekitar 4 juta sapi indukan.

Secara teoritis, seekor sapi indukan dapat melahirkan seekor pedet setiap tahun. Dalam dua tahun pedet tumbuh dewasa menjadi sapi indukan. Dengan rasio kelahiran 50% jantan dan 50% betina, maka



setiap dua tahun mestinya ada penambahan sapi indukan di Indonesia sebanyak 50% jumlah sapi indukan yang ada.

Jadi, jika di 2011 ada 4 juta sapi indukan, maka di 2013 mestinya ada 6 juta sapi indukan, di 2015 ada 9 juta sapi indukan, di 2017 ada 13,5 juta sapi indukan, di 2019 ada 20,25 juta sapi indukan, dan seterusnya. Itu dengan asumsi tidak ada kematian. Namun demikian, hingga hari ini, fakta di lapangan tidak seperti itu.

Dengan pemerintahan baru nanti, saatnya semua komunitas peternakan baik pemerintah maupun swasta mewujudkan hitungan teoritis itu menjadi kenyataan melalui cara cerdas, terencana, terstruktur, dan visioner. Semua instansi pemerintah yang terlibat dalam pembangunan peternakan harus memiliki perencanaan dan strategi yang sama, memiliki program yang sama, tujuan yang sama, lokus yang sama, dan terfokus pada sasaran yang sama.

Seberat apapun pekerjaan, jika dilakukan secara bersinergi maka pekerjaan itu akan terasa ringan dan hasilnya pun dapat dirasakan. Dengan sinergi yang baik antar instansi akan dapat mewujudkan swasembada daging maupun meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak kecil.

Instansi swasta yang ingin berkontribusi dalam pembangunan peternakan juga harus mengikuti program yang telah dicanangkan pemerintah. Jadi, ada semangat kerja bersama untuk tujuan yang sama tetapi masing-masing instansi mengalokasikan anggaran sendiri-sendiri. Dan, “Orkestra” ini sebaiknya dipimpin oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH) sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang peternakan.

Itu berbeda dengan pola penganggaran yang berjalan selama ini. Setiap instansi pemerintah memiliki program sendiri, kegiatan sendiri, strategi sendiri, dan perencanaan sendiri. Lokasi kegiatan juga berbeda, dan fokus yang dikerjakan berbeda pula. Pola kegiatannya juga bernuansa proyek yang evaluasinya lebih menekankan kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan keberhasilan penyerapan anggaran tersebut.

Bahwa kegiatan tersebut berhasil atau gagal bukan menjadi perhatian penting. Jika pola pembangunan peternakan seperti ini tidak

diakhiri, sampai kapanpun bangsa ini tidak akan dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan daging sapi karena tidak ada kebersamaan dalam perencanaan dan eksklusinya, khususnya dalam meningkatkan kemampuan peternak sebagai pemilik 98% populasi sapi lokal di Indonesia.

Agar bisa mewujudkan perhitungan teoritis di atas, disarankan untuk memetakan secara lengkap tentang (i) peternak dan maksimum jumlah ternak yang dipelihara per peternak di setiap sentra ternak; (ii) batas kawasan untuk mendukung pengembangbiakan ternak tersebut. Ini bisa satu desa atau dua desa atau lebih; (iii) potensi pakan yang dapat dihasilkan di kawasan yang bersangkutan; (iv) jumlah maksimum ternak sapi yang dapat dipelihara di kawasan berdasarkan potensi pakan dan kemampuan peternak; (v) program pemuliaan yang dapat dilakukan berdasarkan pendekatan ilmiah di kawasan tersebut; (vi) kandang sapi milik peternak yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan; (vii) teknologi sederhana yang dapat diterapkan oleh peternak; (viii) wawasan peternak dalam hal berbisnis secara kolektif; dan (ix) pengelolaan ternak dalam satu manajemen sehingga memiliki posisi tawar lebih tinggi.

Sembilan hal yang perlu dipetakan itu tidak mudah untuk ditindaklanjuti tetapi itu satu-satunya cara untuk membuat perubahan paradigma dalam membangun peternakan sapi lokal di Indonesia yang mayoritas peternaknya berpendidikan rendah dengan kepemilikan ternaknya juga sedikit. Seberat apapun pekerjaan, jika dilakukan secara bersinergi maka pekerjaan itu akan terasa ringan dan hasilnya pun dapat dirasakan. Dengan sinergi yang baik antar instansi akan dapat mewujudkan swasembada daging maupun meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak kecil. ■

September 2014

Penetapan dan Pelepasan Rumpun/ Galur Ternak

Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tinggi di dunia memiliki cukup banyak rumpun dari berbagai komoditas ternak. Beberapa diantaranya berupa rumpun asli Indonesia karena didomestikasi di Indonesia (misalnya sapi bali) dan lebih banyak lagi berupa rumpun ternak non asli tetapi telah beradaptasi dengan kondisi alam Indonesia, atau sering disebut sebagai ternak lokal.

Puluhan rumpun dan atau galur ternak hidup di Indonesia. Namun demikian, masih cukup banyak rumpun/galur ternak yang secara formal tidak jelas identitasnya, apakah dikategorikan sebagai rumpun? Atau sebagai galur? Atau hanya populasi? Dengan tidak jelasnya identitas suatu ternak, maka seringkali ditemukan ternak yang sama tetapi diberi nama berbeda.

Ditinjau dari banyak aspek, ketidakjelasan identitas ini lebih banyak memberikan dampak negatif dalam jangka panjang. Khususnya untuk aspek genetik, ketidakjelasan identitas suatu rumpun akan menyulitkan penyusunan program pemuliaan suatu rumpun ternak. Oleh karena itu, adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 19/Permen-



Karena rumpun/galur ternak telah dilindungi secara hukum, maka pemerintah harus berupaya keras mempertahankan, mengembangkan, dan bahkan meningkatkan rumpun/galur dimaksud secara kuantitas dan kualitas.

tan/OT.140 /2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak perlu diapresiasi untuk upaya menjaga kelestarian sumber daya ternak kita dan memanfaatkannya secara optimal.

Niat diterbitkannya Permentan tersebut sangat baik yaitu dalam jangka panjang untuk (a) menjamin tersedianya calon bibit ternak yang memenuhi standar atau persyaratan; (b) memberikan perlindungan hukum terhadap pemiliknya; dan (c) mendorong masyarakat untuk menghasilkan rumpun/galur ternak unggul. Dengan adanya Permentan tersebut, siapa saja (orang perorangan atau asosiasi) dapat mengajukan permohonan pelepasan tetapi hanya bupati/walikota atau gubernur yang dapat mengajukan permohonan penetapan rumpun/galur ternak.

Perbedaan prinsip antara penetapan dan pelepasan adalah bahwa penetapan merupakan pengakuan pemerintah secara legal formal terhadap eksistensi sekelompok ternak lokal yang menurut kriteria dapat dikategorikan sebagai rumpun/galur ternak lokal. Sedangkan pelepasan adalah pengakuan pemerintah secara legal formal terhadap sekelompok ternak hasil intervensi manusia melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi pemuliaan, dan genetika ternak.

Hingga saat ini, ada belasan ternak lokal yang telah ditetapkan rumpun/galurnya. Dengan kata lain, beberapa ternak lokal telah memiliki “identitas rumpun atau galur secara formal dan legal”. Ini tentu saja memiliki konsekuensi hukum dalam penggunaannya. Siapapun harus taat terhadap regulasi yang mengatur penggunaan galur/rumpun ternak tersebut. Karena rumpun/galur ternak ini telah dilindungi secara hukum, maka pemerintah harus berupaya keras mempertahankan, mengembangkan, dan bahkan meningkatkan rumpun/galur dimaksud secara kuantitas dan kualitas.

Sehubungan dengan hal itu, kementerian pertanian sebagai institusi yang menetapkan suatu rumpun/galur ternak seyogyanya (a) memberikan insentif kepada kelompok peternak (bukan peternak secara individu) yang secara terus menerus mengembangbiakkan rumpun/galur

tersebut; (b) memastikan bahwa rumpun/galur ternak itu secara genetik berbeda dengan rumpun atau galur ternak lainnya di negara-negara lain di dunia; dan (c) mendaftarkan nama rumpun/galur ternak dengan segala identitas dan karakteristiknya ke *Food and Agriculture Organization* sehingga lambat laun akan dikenali secara internasional. Tidak ketinggalan (d) segera menetapkan wilayah asal rumpun/galur ternak yang bersangkutan sebagai wilayah sumber bibit.

Jelas ini merupakan kegiatan jangka panjang yang memerlukan komitmen dan konsistensi pemerintah pusat maupun pemerintahan di daerah. Jika tidak ada upaya khusus yang dilakukan setelah dilakukan penetapan, maka Permentan tersebut kurang bermakna bagi pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah ternak kita yang memang cukup banyak ragamnya.

Adapun tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap rumpun/galur ternak yang telah disetujui permohonan pelepasannya tentu saja berbeda. Pemerintah sebaiknya (a) memberikan berbagai kemudahan non-material kepada para peternak atau asosiasi yang telah berhasil melepas rumpun/galur ternaknya; (b) memotivasi para peternak atau asosiasi untuk terus meningkatkan kinerjanya agar kualitas rumpun/galur ternak yang dilepas semakin membaik dari waktu ke waktu; (c) memotivasi para peternak atau asosiasi untuk lebih berkiprah secara internasional; (d) dan dukungan lain yang bersifat kondusif. ■

Desember 2011

Ternak Lokal: Definisi Genetis Atau Definisi Geografis?

Masyarakat awam hanya memahami bahwa semua ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, itik, ayam, kelinci, dan lain sebagainya merupakan sebagian dari sumber daya genetik hewan. Disebut sebagai ternak karena hewan tersebut dipelihara utamanya sebagai penghasil bahan pangan seperti daging, susu, dan telur. Itu berbeda dengan hewan kesayangan seperti kucing dan anjing. Walaupun ada sebagian komunitas tertentu di masyarakat Indonesia mengkonsumsi hewan tersebut, tetap tidak dapat disebut sebagai ternak karena lazimnya tujuan utama memeliharanya bukan untuk menghasilkan bahan pangan.

Hingga saat ini, banyak ragam ternak yang hidup di Indonesia, mulai ternak yang didatangkan dari luar negeri sejak jaman penjajahan Belanda sampai ternak yang diimpor saat ini dari Australia (misalnya sapi) atau dari Amerika (misalnya *broiler*/ayam pedaging) dan *layer* (ayam petelur) atau dari Eropa (misalnya babi) ke Indonesia. Hanya ada beberapa ternak yang diklaim sebagai ternak asli Indonesia seperti sapi Bali, kambing Gembrong, dan beberapa rumpun ayam. Dari berbagai macam ternak yang dipelihara di Indonesia, tampaknya jumlah ternak terbanyak di Indonesia adalah ternak hasil persilangan antara ternak asli dan ternak pendatang atau hasil persilangan antara sesama ternak pendatang.

Karena ternak di Indonesia pada umumnya dipelihara peternak berskala kecil, hampir semua ternak hasil persilangan tersebut tidak jelas lagi proporsi gen tetuanya sebab tidak ada silsilah ternak yang dicatat dan didokumentasikan secara baik dan berkelanjutan. Yang jelas, ternak hasil persilangan yang ada di Indonesia mencakup ternak F₁, F₂, F₃, F₄, F₅, sampai F_n yang tak terlacak lagi catatannya. Apalagi untuk ayam, (n)nya sudah banyak karena interval generasi dalam siklus kehidupan ayam lebih pendek daripada interval generasi sapi.

Berdasarkan keberadaan sumber daya genetik ternak di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, definisi ternak lokal menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “*ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi ke lima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.*”

Dengan definisi ternak lokal seperti itu, semua komoditas ternak

yang dipelihara di Indonesia berpotensi dan pasti akan menjadi ternak lokal sepanjang semua ternak itu telah dikembangkan di Indonesia lebih dari empat generasi dan beradaptasi pada lingkungan dan manajemen setempat. Dengan definisi itu, semua *broiler* dan *layer* di Indonesia saat ini dapat disebut juga sebagai ternak lokal karena ayam tersebut sudah berada di Indonesia puluhan generasi. Demikian juga keturunan sapi simmental murni, sapi limousine murni, dan domba merino murni, serta ternak impor murni lainnya yang sudah dipelihara di Indonesia lebih dari empat generasi juga dapat disebut ternak lokal.

Karena sudah memenuhi kriteria sebagai ternak lokal, semua ternak akan dapat ditetapkan sebagai ternak lokal Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 19/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak. Setelah itu, nama ternak lokal tersebut akan didaftarkan ke FAO (*Food and Agriculture Organization*) sebagai ternak lokal Indonesia. Apakah memang demikian?

Jika demikian, tentunya akan ada ternak rumpun sapi bali atau rumpun kambing gembrong akan diklaim sebagai ternak lokal negara lain setelah ternak tersebut berkembangbiak di negara yang bersangkutan lebih dari empat generasi. Bisa jadi rumpun sapi bali diberi nama lain di negara lain sehingga sapi bali tersebut menjadi sapi lokal di negara yang bersangkutan dengan nama lain. Artinya, dalam contoh sapi bali, tidak ada perbedaan genetik antara sapi Bali di Indonesia dan sapi bali yang



diklaim negara lain sebagai sapi lokalnya dengan nama lain. Yang berbeda hanya lokasi berkembangbiaknya. Kalau nama suatu rumpun ternak hanya dibedakan berdasarkan lokasi padahal karakteristik genetiknya sama, maka ternak itu secara genetik sama saja dan menjadi tidak tepat kalau diberi identitas sebagai rumpun.

Oleh karena itu, kita perlu meredefinisi istilah ternak lokal. Mestinya ternak lokal tidak diartikan dengan definisi genetik tetapi cukup definisi geografis saja sehingga tidak bias makna genetiknya di kemudian hari. Maksud saya dengan definisi genetik adalah penjelasan ilmiah yang didalamnya memiliki makna perbedaan genetik ternak antar populasi. Adapun yang saya maksud dengan definisi geografis adalah penjelasan ilmiah yang didalamnya memiliki makna lokasi saja. Saya mengategorikan definisi ternak lokal versi UU 18/2009 sebagai definisi genetik karena mengandung kata persilangan dan adaptasi lingkungan yang keduanya memberi konsekuensi adanya perubahan genetik pada ternak tersebut. Untuk itu saya mengusulkan definisi ternak lokal tersebut diubah menjadi definisi geografis sebagai berikut, “ternak lokal adalah ternak yang lahir di Indonesia, baik yang dikembangbiakkan maupun yang tidak dikembangbiakkan lebih lanjut.”

Kita perlu meredefinisi ulang istilah ternak lokal. Mestinya ternak lokal tidak diartikan dengan definisi genetik tetapi cukup definisi geografis saja sehingga tidak bias makna genetiknya di kemudian hari. Untuk itu saya mengusulkan definisi ternak lokal tersebut diubah menjadi definisi geografis sebagai berikut, “ternak lokal adalah ternak yang lahir di Indonesia, baik yang dikembangbiakkan maupun yang tidak dikembangbiakkan lebih lanjut.”

Selanjutnya, ternak lokal dapat dipilah lagi berlandaskan perbedaan genetiknya menjadi tiga golongan ternak, yaitu (a) ternak asli (*native*), yang definisinya seperti pada UU 18/2009 yaitu ternak yang kerabat liar dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia; (b) ternak *exotic*, yang bisa didefinisikan sebagai “ternak bukan asli Indonesia yang tidak disilangkan dan dikembangbiakkan di Indonesia secara terus menerus atau hanya periode waktu tertentu saja”; (c) ternak silangan, yang bisa didefi-

nisikan sebagai “ternak hasil persilangan antara dua atau lebih spesies yang berbeda; atau antara dua atau lebih rumpun yang berbeda”. Berbasis penggolongan seperti itu, semua sumber daya genetik ternak yang ada di Indonesia dapat dipetakan secara lebih jelas, lebih tepat, dan lebih akurat, tentunya dengan melibatkan pakar taksonomi karena para ahli tersebut yang paling kompeten untuk memberikan jastifikasi ilmiahnya.

Pemilahan tersebut juga menjadi penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya genetik ternak di Indonesia. Paling tidak ada skala prioritas kegiatan. Tentunya ternak asli (*native*) yang perlu diprioritaskan dalam pengelolaannya, mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Dengan mendefinisikan ternak lokal dengan definisi geografis dan penggolongan ternak lokal berdasarkan definisi genetis sebagaimana saya usulkan, pemerintah juga akan tahu secara persis berapa jumlah ternak untuk masing-masing golongan (ternak *native*, ternak *exotic*, dan ternak silangan) yang dipelihara di Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu.■

2013

Sekolah Peternakan Rakyat (SPR-1111)

“Tuhan tidak akan mengubah nasib kaumnya yang tidak memiliki keinginan untuk mengubah nasibnya.” Namun demikian, ternyata mayoritas peternak berskala kecil di Indonesia tidak tahu harus bagaimana cara mengubah nasibnya agar usaha beternaknya menghasilkan ternak yang lebih baik dan kesejahteraannya juga semakin baik.

Sejak jaman penjajahan sampai saat ini, mereka ingin mengubah nasibnya tetapi tanpa pendampingan, sulit bagi mereka untuk mencapai keinginannya. Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) digagas untuk mengajak dan melibatkan semua peternak berskala kecil untuk secara bersama belajar dan bekerja keras dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan kedaulatan peternaknya.

Selama ini, dengan rata-rata kepemilikan ternak hanya 1-3 ekor sapi atau 5-10 ekor kambing/domba per peternak, sebagian besar peternak tidak melakukan bisnis peternakan secara benar. Mereka hanya sekedar memelihara ternaknya untuk “tabungan tenaga” yang sewaktu-waktu dapat diuangkan jika diperlukan.

Ternak berkualitas apapun (baik, sedang, dan buruk) atau berjenis kelamin apapun (jantan dan betina), berstatus apapun (bunting atau tidak) dijual jika mereka sedang membutuhkan dana segar. Dengan perilaku seperti itu, banyak ditemukan sapi betina berjanin (sedang bunting) dipotong. Tanpa disadari pula, ternak bermutu genetik baik juga ikut dijual dan akhirnya dipotong. Jadi ada dua kerugian besar yang dihasilkan, yaitu populasi menurun dan mutu genetik ternak terdegradasi karena terjadi seleksi negatif.

Melalui penerapan SPR-1111, kondisi peternakan berskala kecil akan diubah sebaliknya walaupun rata-rata kepemilikannya tetap berkisar 1-3 ekor sapi per peternak. Mereka akan diajari bisnis peternakan secara benar, pemeliharaan yang benar, melakukan seleksi positif secara tersistem, yang akhirnya produktivitas ternak meningkat.

Mereka juga akan dibuka wawasannya, diberi banyak pengetahuan yang diharapkan akan memunculkan kesadaran peternak untuk melakukan tindakan yang benar, terarah, dan bervisi. Mengubah cara berpikir sambil belajar/bekerja bersama akademisi ini merupakan “roh” gerakan yang diwadahi dalam Sekolah Peternakan Rakyat SPR tadi.



Singkat kata, konsep SPR-1111 adalah pemberdayaan peternak berskala kecil secara aktif melalui penerapan konsep koperasi dan konsep pemuliaan ternak dalam satu wilayah sehingga dapat meningkatkan populasi dan kualitas ternak serta pendapatan peternak. Wilayah ini minimal dalam satu desa atau dalam satu kecamatan. Jika organisasi peternak sudah sangat kuat dan solid, wilayah tersebut dapat dikembangkan dalam satu kabupaten.

Makna SPR-1111

Angka seribu seratus sebelas itu bermakna bahwa dalam setiap SPR, minimal harus terdapat 1000 ternak indukan, maksimal 100 pejantan pemacek, minimal 10 strategi yang diterapkan, untuk mencapai 1 visi “peternak berdaulat”. Jumlah peternak yang tergabung dalam SPR sangat tergantung pada rata-rata jumlah ternak yang dimiliki per peternak. Jika rata-ratanya hanya dua ekor per peternak maka dalam satu SPR tergabung 500 peternak. Jumlah yang cukup signifikan untuk diajak belajar dan bekerja bersama.

Ternak tersebut tidak dikandangkan secara kolektif tetapi dikandangkan di halaman rumah masing-masing. Namun jika ada sekelompok peternak ingin ternaknya dikandangkan secara kolektif, hal itu akan lebih efektif.

Dalam hal ini, ternak indukan yang dihimpun di sini adalah ternak yang sudah dimiliki peternak. Bukan ternak pengadaan yang baru dibeli. Program SPR tidak mengharuskan adanya pengadaan ternak indukan tetapi jika diperlukan untuk perbaikan mutu genetik, pengadaan ternak berspesifikasi tinggi (layak bibit atau benar-benar bibit) dapat juga dilakukan.

Mengapa jumlah minimal ternak indukan 1.000 ekor? Dalam ilmu seleksi, semakin tinggi ternak dalam satu populasi, semakin tinggi intensitas seleksinya dan tentu saja akan semakin tinggi respons seleksinya. Dengan kata lain, dalam program seleksi harus dan jumlah minimalnya. Angka “1.000” dipilih sebagai jumlah minimal karena 1000 ekor tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah; 1.000 ekor dapat ditemukan dalam satu atau dua desa; betina indukan merupakan pabrik pedet; betina indukan dapat direkayasa reproduksinya agar dapat menghasilkan pedet lebih banyak; dan angka 1.000 dipilih agar dapat membentuk angka cantik “1111” tersebut.

Mengapa jumlah minimal pejantan pemacek 100 ekor? Jawabannya sederhana. Karena teknologi inseminasi buatan telah mapan sehingga semen dari seekor pejantan unggul dapat digunakan untuk mengawini ribuan betina; dalam rangka peningkatan mutu genetik, diperlukan sedikit pejantan unggul dengan pola perkawinan dikontrol secara ketat. Makin sedikit jumlah pejantan makin baik; mengurangi pemborosan pakan dan tenaga; dan agar angka 100 juga dapat membentuk angka cantik “1111” pula. 10 strategi merupakan landasan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada peternak. Satu visi untuk mewujudkan kedaulatan peternak.

Komponen penting dalam SPR-1111

Dalam komunitas peternak yang terwadahi dalam SPR tadi, ada dua komponen penting yaitu Dewan Perwakilan Pemilik Ternak (DPPT) dan manajer. DPPT merupakan lembaga paling berkuasa di SPR dan merupakan kumpulan para tokoh peternak yang memiliki pengaruh, menjadi panutan, dan dipilih atas kesepakatan seluruh peternak.

DPPT memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah SPR ke depan. Manajer merupakan seorang berlatar belakang pendidikan minimal sarjana dan bukan merupakan bagian dari peternak. Dia seorang profesional yang digaji DPPT dan mengerjakan semua keputusan DPPT. Dalam program SPR, dua komponen tersebut akan didampingi oleh

akademisi. DPPT akan diajari cara berdiskusi yang baik, cara mengambil keputusan, cara membuat berbagai aturan dan kesepakatan, dan lain sebagainya sebagaimana yang biasa dikerjakan oleh dewan komisaris suatu perusahaan besar.

Manajer juga diajarkan berbagai ilmu manajerial dan administrasi. ilmu pemuliaan dan interpretasi data juga diajarkan kepada manajer. Didampingi maksimal selama empat tahun, program SPR diharapkan dapat mengubah pola tradisional yang selama ini berjalan menjadi pola profesional dalam berbisnis ternak secara kolektif.

Keberhasilan konsep SPR sangat tergantung dari komitmen dan keseriusan peternak itu sendiri (90%), tergantung para akademisi perguruan tinggi setempat (8%), dan tergantung IPB sebagai penggagas SPR (2%). Dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator harus memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam penganggarannya. Ini prasyarat mutlak bagi keberhasilan konsep SPR. Jika tidak, SPR pasti gagal dan nasib peternak tidak akan beranjak dari keterpurukannya selama ini.

Peternak tidak boleh lagi mengambil tindakan sendiri, misalnya menjual ternak sewaktu-waktu, menentukan harga jual sendiri, dan lain-lain yang selama ini dilakukan. Semua kegiatan yang terkait dengan ternak mulai pemeliharaan sampai penjualan ternak harus melalui manajer atas arahan dari DPPT.

Implementasi SPR-1111

Saat ini konsep SPR diterapkan di Kecamatan Betung (Kabupaten Banyuasin), Kecamatan Mesuji Raya (Kabupaten Ogan Komering Ilir), dan Kecamatan Sungai Lilin (Kabupaten Musi Banyuasin). Penerapan SPR dilakukan dengan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, SPR diterapkan pula di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, di Pulau Sapudi Madura, Jawa Timur dengan dana APBN, serta di Kecamatan Wonosalam Jombang Jawa Timur dengan dana Institut Pertanian Bogor (IPB). Kabupaten Sumbawa juga segera menerapkan konsep SPR tepatnya di Kecamatan Moyo Utara dengan dana APBD Kabupaten.

Sumber Daya Peternakan

Perjalanan SPR masih panjang, namun satu hal yang perlu dicatat adalah para peternak bersemangat untuk mengikuti dan menerapkan strategi SPR. Dalam menerapkan SPR, perguruan tinggi setempat juga dilibatkan. Misalnya di Sumatera Selatan, beberapa dosen Jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Sriwijaya diajak bergabung untuk mendampingi peternak SPR. Demikian juga di Kalimantan Selatan, beberapa dosen jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat terlibat aktif dalam kegiatan SPR di Kabupaten Barito-kuala, dan lain-lain.

Yang jelas, keberhasilan konsep SPR sangat tergantung dari komitmen dan keseriusan peternak itu sendiri (90%), tergantung para akademisi perguruan tinggi setempat (8%), dan tergantung IPB sebagai penggagas SPR (2%). Dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator harus memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam penganggarannya. Ini prasyarat mutlak bagi keberhasilan konsep SPR. Jika tidak, SPR pasti gagal dan nasib peternak tidak akan beranjak dari keterpurukannya selama ini.

Semoga melalui SPR, kedaulatan peternak dapat dicapai dan kesejahteraan peternak dapat meningkat pula.■

2013

SPR Mendorong Peternak Berdaulat

Sekitar 20 bulan lagi pasar bebas ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) diberlakukan di Indonesia yaitu di akhir Desember 2015. Implikasi dari kesepakatan internasional tersebut adalah keluar-masuk semua barang dan jasa ke dan dari Indonesia tidak ada hambatan apapun. Produk Indonesia dapat diekspor ke negara ASEAN dan produk dari negara anggota ASEAN dapat diimpor ke Indonesia.

Mekanisme keluar masuk barang secara bebas menuntut adanya standar tertentu yang harus disepakati seluruh negara anggota ASEAN. Yang mengejutkan, dalam acara *Indonesia Poultry Club* (IPC) di Hotel Santika TMII Jakarta (19/2) lalu, semua yang hadir tidak ada satupun yang tahu persis tentang apa standar ASEAN itu, dimana adanya, substansinya, dan lain-lain.

Hal mengejutkan berikutnya adalah bahwa tidak seorangpun dari peserta IPC menyampaikan pemikiran dan inspirasinya tentang bagaimana memanfaatkan peluang pasar bebas ASEAN bagi Indonesia untuk menguasai pasar Negara ASEAN lainnya. Hal yang banyak didiskusikan adalah strategi bertahan untuk melakukanantisipasi terhadap banjirnya produk negara lain ke Indonesia serta ditambah dengan berbagai protes keras terhadap pemerintah yang terkesan kurang berbuat maksimal untuk menghadapi tahun 2015 nanti. Mendengar diskusi yang dihadiri banyak kalangan pengusaha, beberapa birokrat daerah, birokrat pusat, dan sedikit akademisi, pastinya masih sangat banyak pekerjaan rumah yang harus digarap secara maraton jika kita ingin memenangkan “pertandingan” di pasar bebas ASEAN.

Daya Saing

Terlepas dari fakta di atas, kata kunci yang sering terdengar dalam forum itu dan mutlak dilakukan adalah daya saing. Semua pelaku usaha di bidang peternakan harus berorientasi pada peningkatan daya saing. Siapapun dia dan bisnis apapun yang dikerjakan. Harus ada upaya maksimal semua pihak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Integrasi vertikal yang beberapa tahun silam tampak ditengarai sebagai bentuk lain dari monopoli usaha merupakan keniscayaan, baik bagi pelaku usaha kecil apalagi pelaku usaha kelas kakap.

Dalam konteks peningkatan daya saing, khususnya untuk peternak

Semua pelaku usaha di bidang peternakan harus berorientasi pada peningkatan daya saing. Siapapun dia dan bisnis apapun yang dikerjakannya. Harus ada upaya maksimal semua pihak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Integrasi vertikal yang beberapa tahun silam tampak ditengarai sebagai bentuk lain dari monopoli usaha merupakan keniscayaan, baik bagi pelaku usaha kecil apalagi pelaku usaha kelas kakap.

sapi lokal berskala kecil yang mendominasi kepemilikan ternak di seluruh Indonesia, telah digagas terbentuknya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR-1111). Ide itu pertama kali saya sampaikan dalam seminar nasional di Banda Aceh pada September 2012 lalu dengan tajuk “Mensarjanakan peternak berskala kecil untuk meningkatkan daya saing.”

Peternak yang dimaksud di sini adalah mayoritas peternak kecil yang biasanya berpendidikan rendah, tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata, dan seringkali berprofesi sebagai buruh tani atau peternak penggaduh. Dengan latar belakang peternak seperti itu, istilah “mensarjanakan” bukan berarti membuat mereka akan dididik menjadi sarjana tetapi ingin membuat mereka berwawasan lebih baik, lebih profesional, dan lebih cerdas seperti peternak berkualifikasi sarjana dalam menjalankan usaha peternakannya.

Dalam perkembangannya, setelah gagasan tersebut diterapkan di tiga kabupaten di provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir (OKI) mulai awal 2013, namanya diubah menjadi SPR atas masukan dari rekan saya yang ahli sosiologi IPB Dr Sofyan Sjaf. SPR dijalankan dengan konsep dan sistem yang belum definitif. Jadi benar-benar “*learning by doing*” yang didukung penuh oleh Asril, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan saat itu.

Kelayakan Usaha

Secara teoritis dan memang dapat dibuktikan, peternak mestinya harus memiliki sapi minimal 7-10 ekor. Ini angka yang layak secara ekonomis. Namun fakta di lapangan menunjukkan, mayoritas peternak tidak sanggup memelihara sapi sejumlah itu. Umumnya mereka tidak punya

tenaga untuk memberi pakan dan tidak punya lahan untuk menyediakan kandang bagi ternaknya.

Mereka akan terus bertahan dengan angka 2-3 ekor per peternak. Peternak seperti ini merupakan sasaran utama SPR. Mereka diajak untuk mau berusaha secara kolektif bersama peternak lainnya sekampung atau sedesa atau sedusun dengan menerapkan konsep SPR-1111. Caranya dengan pendampingan secara terstruktur, tersistem, dan terus menerus sampai maksimal 4 tahun. Yang diajarkan tidak hanya perihal teknis, justru yang lebih penting adalah perihal nonteknis seperti kelembagaan, bisnis, ekonomi, kepemimpinan, dan lain sebagainya.

Dalam satu SPR di suatu dusun atau suatu desa, minimal harus ada 1.000 ekor indukan, maksimal ada 100 pejantan, diterapkan 10 strategi berusaha secara kolektif untuk mencapai satu visi yaitu peternak berdaulat. Membentuk SPR dengan mengumpulkan 1.000 ekor induk dan maksimal 100 pejantan mungkin tidak terlalu sulit. Tantangan terbesar adalah menjalankan minimal 10 strategi untuk mencapai satu visi itu. Memang berat tetapi harus dijalankan jika peternak ingin diubah nasib dan kondisi kehidupannya.

Memadukan Koperasi dan Pemuliaan

Konsep SPR-1111 untuk membangun usaha kolektif adalah memadukan prinsip koperasi plus prinsip pemuliaan ternak. Prinsip koperasi adalah membangun kekuatan ekonomi secara bersama seluruh anggota SPR.



Istilah “mensarjanakan” bukan berarti membuat mereka akan dididik menjadi sarjana tetapi ingin membuat mereka berwawasan lebih baik, lebih profesional, dan lebih cerdas seperti peternak berkualifikasi sarjana dalam menjalankan usaha peternakannya.

Semua pemilik ternak yang tergabung dalam SPR bertindak sebagai anggota koperasi dan memiliki saham secara proporsional. Mereka semua mengikuti aturan yang digariskan dalam koperasi tersebut.

Yang dibisniskan tidak hanya ternak tetapi komoditas lain yang dimiliki oleh semua peternak anggota SPR. Semua barang dibisniskan secara kolektif. Dengan prinsip koperasi ini, diharapkan akan terus terjalin hubungan antar sesama anggota SPR.

Sedangkan prinsip pemuliaan ternak adalah meningkatkan potensi genetik ternak melalui upaya sistematis, terukur, dan visioner. Tidak mungkin melakukan program pemuliaan dalam populasi yang hanya puluhan ekor sapi apalagi di bawah 10 ekor seperti kebanyakan peternak memilikinya. Sampai kiamat, peternak berskala kecil yang punya sapi di bawah 10 ekor tidak akan dapat melaksanakan program pemuliaan sendiri.

Untuk itu, SPR menetapkan minimal harus ada 1.000 ekor indukan jika ingin melaksanakan pemuliaan. Padahal kebanyakan dari mereka hanya sanggup beternak di bawah 10 ekor. Jadi satu-satunya jalan bagi peternak kecil untuk melaksanakan program pemuliaan adalah berhimpun.

Berawal dari 1.000 ekor indukan ini, pencatatan individu mulai dilakukan secara terpadu. Pemilik 1.000 ekor tadi ratusan peternak tetapi hanya ada satu database dalam setiap SPR. Ternak sapi dikandangkan di masing-masing peternak pemiliknya tetapi cara memelihara dan memperlakukan ternak sapi dalam SPR mengikuti standard baku. Kandangannya, cara memberi pakan, formula ransum yang digunakan, dan semua pengelolaan ternak dilakukan secara seragam.

Dengan perlakuan seperti itu, kinerja setiap ekor sapi dipantau secara terus menerus dan dievaluasi setiap tahun. Ini bukan pekerjaan fisik tetapi pekerjaan intelektual sehingga pengelola data ini minimal harus berkualifikasi sarjana, dan idealnya sarjana peternakan yang memiliki latar belakang pemuliaan dan genetika ternak.

Sinergi Dengan Akademisi

Jumlah 1.000 ekor indukan yang dikelola dalam satu manajemen di Indonesia merupakan jumlah besar. Semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah pusat hanya memiliki kurang dari 1000 ekor sapi betina indukan per UPT. Jadi satu SPR lebih besar dari satu UPT dalam jumlah sapi yang dikelola.

Dengan adanya program pemuliaan ini, karena peternak tidak memiliki kapabilitas untuk itu, maka harus terjaga hubungan antara peternak dan komunitas kampus. Para akademisi dan mahasiswanya dapat pula menjadikan lokasi SPR sebagai arena penelitian dan praktikum.

Hasil penelitian dapat didedikasikan kembali kepada peternak yang tentu saja memberi keuntungan bagi peternak. Adapun akademisi dapat menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah yang tentu saja memberi keuntungan kepada akademisi tersebut.

Konsep SPR sangat baik tetapi saya sangat menyadari juga bahwa sangat besar tantangannya. Namun itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk meningkatkan daya saing peternak.

Diharapkan seluruh akademisi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia “turun gunung” membantu jutaan peternak untuk memperbaiki dirinya. Apalagi jika ditambah peternak komoditas lainnya (di luar sapi), jumlah peternak dapat mencapai 10 juta di Indonesia.

Sementara itu, di Indonesia hanya ada sekitar 70 perguruan tinggi yang memiliki program studi peternakan dengan jumlah mahasiswa total sekitar 7.000 sampai dengan 7.500 jiwa. Kondisi ini menuntut mahasiswa dan peternak kecil harus disinergikan melalui SPR karena interaksi dua komponen tersebut akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

Yang menjadi pertanyaan, apakah itu semua cukup dilakukan dalam 20 bulan untuk bertanding di pasar bebas ASEAN? Tentu saja tidak. Namun konsep SPR mengarah ke peningkatan daya saing dan suatu saat peternak berskala kecil dapat bersaing di level ASEAN. Dukungan pemerintah, kalangan kampus, asosiasi, dan masyarakat sangat mutlak untuk menjadikan peternak lebih cerdas dan lebih berdaulat.■

Maret 2014

Moratorium Riset dan Kajian Peternakan

Fakta yang diperoleh saat ini menunjukkan bahwa mayoritas kondisi peternak dan ternak tidak mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka. Mereka tidak mampu mengakses teknologi, banyak potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pakan tidak termanfaatkan secara maksimal, masih ditemukan banyak ternak tak terurus oleh peternaknya, karena masih banyak peternak yang berkategori prasejahtera. Kondisi seperti itu yang mendominasi usaha peternakan di banyak pelosok desa di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, lebih dari 50 perguruan tinggi negeri dan swasta yang mendirikan jurusan atau fakultas peternakan dan puluhan ribu sarjana peternakan telah dihasilkan. Penelitian dan kajian di bidang peternakan juga terus dilakukan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di luar negeri. Industri peternakan ayam ras, sapi impor, dan pengolahan hasil ternak di Indonesia juga berkembang pesat.

Hingga saat ini, hasilnya jelas dan mengagetkan yaitu (a) populasi ternak lokal yang meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan kuda menurun; (b) ternak lokal hasil persilangan naik dan jumlahnya melampaui sebagian besar jumlah bangsa ternak lokal; (c)

produk pangan asal ternak semakin beragam dan terus berkembang industri pengolahannya; tetapi (d) kondisi peternak sejak Indonesia merdeka sampai saat ini tidak berubah.



Riset Peternakan Sudah Cukup

Fenomena di atas meyakinkan kita semua bahwa banyak hasil riset yang dilakukan kalangan perguruan tinggi dan lembaga penelitian tidak sampai ke peternak ber-

Selama ini, bukan tidak ada teknologi yang diterapkan ke peternak kecil. Di beberapa lokasi dalam jumlah kecil dan terbatas, teknologi peternakan telah diterapkan. Namun kita butuh masif. Besar-besaran, sistematis, dan terstruktur. Juga dihargai secara seimbang dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.

skala kecil secara masif. Biaya riset yang disediakan pemerintah dalam jumlah triliunan rupiah selama puluhan tahun tidak dapat dinikmati peternak dan ternak lokal kita di Indonesia. Apa yang dihasilkan oleh para akademisi maupun peneliti tidak dapat digunakan secara maksimal oleh para peternak yang mayoritas berskala kecil.

Para peneliti dan akademisi menikmati dunianya sendiri. Mereka meneliti dan melakukan kajian di bidang peternakan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi peternak. Mereka menulis hasil penelitiannya dan kemudian memublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional. Karir mereka sebagai akademisi dan sebagai peneliti juga terus menanjak. Beberapa diantaranya mencapai jenjang tertinggi sebagai guru besar atau sebagai ahli peneliti utama.

Dalam keterbatasannya, para peternak juga menikmati sendiri dunianya. Mereka yang secara rata-rata hanya memiliki satu atau dua ekor sapi atau 5 ekor kambing/domba masih sering menjual ternaknya yang masih produktif. Mereka tidak peduli bahwa sapi betina yang dijual dan dipotong ternyata dalam keadaan bunting dan mengandung janin di dalamnya. Mereka masih membuang atau membakar limbah pertanian yang melimpah di kala panen, tetapi mereka menelantarkan ternaknya dalam keadaan kurus di musim kering. Menyedihkan.

Perguruan Tinggi Hanya Menara Gading

Ternyata perguruan tinggi memang dirancang secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk tidak peduli atau tidak perlu mengalihkan teknologi yang dihasilkan kepada peternak sebagai pemelihara ternak. Berdasarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri, setiap dosen di perguruan tinggi dituntut menerapkan tridharma perguruan tinggi yang intinya terdiri atas unsur (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Kenaikan jenjang seorang dosen dari jabatan asisten ahli sampai guru be-

sar sangat ditentukan oleh dua unsur dalam tridharma itu yaitu (1) pendidikan dan pengajaran; dan (2) penelitian. Jabatan seorang dosen akan meningkat jika lebih dari 45% kegiatannya memenuhi unsur pendidikan dan pengajaran dan/atau jika lebih dari 45% kegiatannya juga memenuhi unsur penelitian. Unsur ketiga berupa pengabdian kepada masyarakat cukup seadanya saja karena kegiatan dosen untuk unsur ini hanya dibatasi maksimal 10% dari seluruh kegiatannya.

Peraturan Menteri tersebut di atas secara jelas membuat semua dosen tidak akan pernah tertarik menghabiskan waktu, energi, dan pikirannya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah untuk siapa sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikuasai oleh para intelektual dari kampus yang dibangun oleh uang rakyat itu?

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, industri peternakan di Indonesia sangat maju tetapi ternak yang dipelihara pada level industri adalah ternak impor. Tidak ada ternak lokal yang dikelola secara industri. Sarjana peternakan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi juga banyak terserap di situ, tetapi sarjana peternakan yang menjadi peternak untuk mengembangkan ternak lokal kurang dari 5-10%. Artinya, peningkatan sumber daya manusia di bidang peternakan di Indonesia sebenarnya lebih banyak dimanfaatkan untuk pengembangan industri peternakan di luar negeri.

Transfer Teknologi ke Peternak Kecil Secara Masif, Mutlak!

Selama ini, bukan tidak ada teknologi yang diterapkan ke peternak kecil. Di beberapa lokasi dalam jumlah kecil dan terbatas, teknologi peternakan telah diterapkan. Namun kita butuh masif. Besar-besaran, sistematis, dan terstruktur. Juga dihargai secara seimbang dalam kegiatan tridharama perguruan tinggi.■

September 2014

Peternakan di Bawah Jokowi – JK

Dua puluh Oktober 2014, Jokowi (Joko Widodo) dan JK (Jusuf Kalla) masing-masing telah dilantik sebagai presiden ke tujuh dan wakil presiden (wapres) ke dua belas di Republik Indonesia. Ratusan tokoh nasional dan belasan tamu manca negara hadir dalam pelantikan tersebut. Syukuran rakyat sebagai wujud sukacita atas dilantiknya Jokowi – JK juga digelar dan dipusatkan di Monumen Nasional. Rangkaian prosesi di dalam Gedung MPR RI dan di lapangan terbuka tersebut merupakan tontonan paling menarik dalam sejarah pelantikan presiden dan wapres di Indonesia. Selamat mengemban amanat rakyat bagi kemajuan bangsa Indonesia, tuan presiden dan wakil presiden.

Dengan kepemimpinan Jokowi yang suka *blusukan* untuk mencari dan mendengar suara hati rakyat, kita sangat berharap pemerintahan Jokowi-JK benar-benar lebih memperhatikan peternak kecil dalam arti yang sebenarnya, yaitu menjadikan peternak kecil lebih berdaulat dan berdaya saing. Sebab selama ini peternak kecil terasa termarginalkan.

Dari data yang terhimpun di banyak laporan resmi, hingga berakhirnya pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ternyata kita semua termasuk pemerintah hanya terlena dengan kemajuan ternak yang berbasis industri. Ternak lokal yang dipelihara mayoritas peternak kecil berdasarkan pendekatan tradisional terlupakan. Akibatnya perkembangan komoditas ternak ayam yang padat modal dan padat teknologi meningkat tajam sedangkan populasi ternak lokal termasuk sapi, kerbau, kambing, dan unggas lokal menurun. Padahal pemilik dan pemelihara ternak lokal ini adalah peternak berskala kecil yang merupakan tulang punggung bangsa dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan di Indonesia.



Dengan kepemimpinan Jokowi yang suka *blusukan* untuk mencari dan mendengar suara hati rakyat, kita sangat berharap pemerintahan Jokowi-JK benar-benar lebih memperhatikan peternak kecil dalam arti yang sebenarnya, yaitu menjadikan peternak kecil lebih berdaulat dan berdaya saing. Sebab selama ini peternak kecil terasa termarjinalkan.

Perlunya Bersinergi

Sejak kemerdekaan sampai berakhirnya pemerintahan SBY-Boediono, triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebenarnya telah dikururkan dalam upaya meningkatkan produktivitas ternak lokal. Dana itu bukan saja berasal dari Kementerian Pertanian atau khususnya dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Dana juga dikururkan negara melalui berbagai pintu Kementerian diantaranya kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian sosial, kementerian dalam negeri, kementerian negara riset dan teknologi, kementerian daerah tertinggal, kementerian koperasi dan UKM, dan lain-lain. Bahkan lembaga internasional yang bersifat hibah atau pinjaman lunak juga ikut menggelontorkan dana untuk tujuan yang sama yaitu memperbaiki kinerja peternak dan ternak lokal. Tapi kenapa hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional? Dan justru impor ternak hidup dan daging makin bertambah?

Sadar atau tidak, rasa gotong royong antar lembaga pemerintah sudah tidak ada lagi di negara kesatuan ini. Masing-masing lembaga mementingkan egonya sendiri. Yang lebih mengesankan, ego lembaga itu bukan antar lembaga setingkat kementerian, bukan pula antar direktorat jenderal (eselon 1), tetapi ego lembaga itu terjadi antar lembaga level lebih bawah yaitu subdirektorat (eselon 3) yang berada di bawah direktorat (eselon 2). Setiap subdirektorat memiliki program sendiri yang tidak (boleh) bersinggungan dengan program subdirektorat lain. Jika bersinggungan justru akan menimbulkan masalah administrasi keuangan negara. Dengan demikian, ego lembaga yang sedemikian kuat itu memang disebabkan oleh sistemnya. Sistem penganggaran pembangunan di bidang peternakan sampai saat ini telah membuat dinding pemisah antar lembaga tersebut semakin tebal.

Semua program dari banyak kementerian itu memang didedikasi-

kan bagi peternak berskala kecil. Namun sebagian besar uang program tersebut dialokasikan untuk belanja barang seperti pembelian ternak sedangkan yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas peternaknya sendiri sangat minim. Cukup sering terjadi bahwa petani yang memperoleh bantuan ternak tidak bisa beternak atau bahkan baru tahu jenis ternak yang diterimanya. Akibatnya, baru beberapa minggu dipelihara, ternaknya sakit dan berakhir kematian karena mereka tidak mengerti cara merawat ternaknya. Alih-alih meningkatkan produktivitas ternak lokal, yang terjadi justru penurunan populasi ternak.

Di setiap program yang bersifat sektoral tersebut, tidak banyak petani yang memperoleh bantuan. Biasanya berkisar 50 sampai dengan 100 orang per kabupaten. Dalam perkembangan pasca pemberian bantuan tersebut, ternaknya berkembang biak atau mati bukan hal penting lagi. Yang terpenting dalam setiap program adalah uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Selesai! Memang dalam hal laporan administrasi keuangan tidak ada yang salah tetapi ketidakberdayaan peternak mengembangbiakkan ternak telah membuat banyak program di bidang peternakan tidak memberikan hasil maksimal. Karena pendekatannya hanya proyek sesaat, kondisi peternak yang menjadi “objek pembangunan” tidak berubah ditinjau dari segala aspek kehidupannya.

Mestinya, triliunan rupiah yang dialokasikan di banyak kementerian untuk program peternakan diarahkan ke beberapa target yang sama melalui pengorganisasian yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. Berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) nya masing-masing, setiap lembaga seharusnya mengalokasikan anggaran ke target tersebut. Kementerian pertanian menysasar penyediaan fasilitas pengelolaan pakan atau perbaikan kandang atau hal teknis lainnya, sedangkan dana perguruan tinggi dari kementerian pendidikan tinggi menysasar target yang sama untuk melakukan pendampingan karena memiliki ribuan mahasiswa. Kementerian riset dan teknologi maupun badan penelitian pertanian menysasar introduksi teknologi bagi peternak ke target yang sama. Kementerian koperasi dan UKM bisa menysasar peternak dalam hal peningkatan pengetahuan perkoperasiannya juga ke target yang sama. Dengan demikian, peternak dan ternak di satu target yang sama difasilitasi oleh banyak kementerian namun memiliki tupoksi yang berbeda. Perbedaan tupoksi ini yang disinergikan ketika membangun peternakan di level paling bawah ini.

Masih Menara Gading

Yang juga sangat menyedihkan adalah peran perguruan tinggi yang tidak memihak kepada peternak kecil tetapi lebih berorientasi ke peternakan yang berbasis industri. Akademisi dari kampus enggan turun ke bawah mendampingi jutaan peternak berskala kecil karena pemerintah tidak menghargai sama sekali dan itu dibenarkan secara hukum karena diperkuat dengan peraturan pemerintah. Ini sangat luar biasa aneh karena ketidakberpihakan akademisi kepada peternak berskala kecil dilindungi pemerintah. Cerita berikut adalah buktinya.

Peraturan pemerintah yang tidak memihak peternak berskala kecil harus segera direvisi jika pemerintah ingin mengubah nasib peternak kecil. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diberi penghargaan yang sama dengan kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian. Dengan demikian, slogan tridharma perguruan tinggi benar-benar diterapkan secara adil. Namun demikian, perlu ada redefinisi tentang pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan ini layak diberi penghargaan yang sama dengan kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian. Tanpa merevisi peraturan pemerintah tersebut, perguruan tinggi akan tetap hanya berdiri megah sebagai menara gading di negeri sendiri.

Kenaikan jabatan seorang dosen dari asisten ahli sampai profesor ditentukan oleh kinerja masing-masing individu berdasarkan kontribusi ilmiahnya di bidang (a) pendidikan/pengajaran; (b) penelitian; dan (c) pengabdian masyarakat. Untuk bidang (a) pendidikan/pengajaran; dan (b) penelitian; kontribusi yang diberikan seorang dosen minimal harus 45% (dulu 25%); sedangkan untuk bidang (c) pengabdian kepada masyarakat maksimal harus 10% dari total nilai kinerja. Karena hanya 10%, maka kegiatan pengabdian masyarakat tidak boleh banyak, asalkan ada. Kalau kelebihan dicoret dan hangus. Dengan kriteria seperti ini, siapa pun tidak tertarik turun ke bawah untuk mengabdikan pada peternak berskala kecil. Akibatnya ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan hanya berputar-putar di perguruan tinggi, sedangkan mayoritas peternak kecil tetap saja buta teknologi.

Peraturan pemerintah yang tidak memihak peternak berskala kecil

harus segera direvisi jika pemerintah ingin mengubah nasib peternak kecil. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diberi penghargaan yang sama dengan kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian. Dengan demikian, slogan tridharma perguruan tinggi benar-benar diterapkan secara adil. Namun demikian, perlu ada redefinisi tentang pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan ini layak diberi penghargaan yang sama dengan kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian. Tanpa merevisi peraturan pemerintah tersebut, perguruan tinggi akan tetap hanya berdiri megah sebagai menara gading di negeri sendiri.

Bersamaan dengan dimulainya pemerintahan Jokowi–JK, saatnya kita semua bergerak untuk mendukung pernyataan Jokowi yang memiliki visi “Membangun Indonesia dari pinggir”, yang dalam bidang peternakan saya artikan sebagai membangun Indonesia melalui pencerdasan dan pemberdayaan jutaan peternak kecil yang menguasai lebih dari 98% populasi ternak lokal di Indonesia.■

November 2014

Revisi UU No.18 Tahun 2009

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan SBY–Boediono, pada 17 Oktober 2014 Presiden SBY telah menandatangani berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ada 25 ketentuan UU No. 18 yang direvisi dan diberlakukan dalam UU No.41, yang terdiri atas satu ketentuan mengenai penghapusan pasal, satu perubahan judul bagian, tujuh penyisipan pasal baru, dan 16 perubahan pasal. Secara lebih rinci, ketentuan baru yang disusun atas inisiatif DPR RI tersebut dapat dibaca di naskah UU baru tersebut.

Dengan adanya revisi ini, ternak diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu ternak bibit, ternak indukan, dan ternak bakalan. Selama ini, hanya ada dua yaitu bibit dan bakalan. Namun ada kesan bahwa pemilahan tiga macam ternak tersebut hanya berlaku pada ternak ruminansia. Padahal, terminologi seperti itu harus dapat diterapkan juga untuk ternak non-ruminansia karena memang sangat mudah membedakan ketiganya. Ternak bibit selain memiliki reproduksi normal untuk berkembangbiak juga memiliki sifat unggul hasil seleksi selama bertahun-tahun, berbiaya besar, dengan metode ilmiah yang jelas arahnya dan tersistem.

Itu jelas berbeda dengan ternak indukan, yang kriterianya hanya di-



dasarkan pada normalitas fungsi reproduksinya tanpa mempertimbangkan tingkat mutu genetiknya. Ternak indukan hanya dimanfaatkan untuk perkembangbiakan dan tidak untuk memperbaiki mutu genetik turunan berikutnya. Selain ada istilah indukan, ada pula istilah betina produktif. Tampaknya ada perbedaan makna. Indukan dimaknai sebagai ternak betina yang telah kawin dan juga beranak sedangkan ternak betina produktif dimaksudkan sebagai ternak yang fungsi reproduksinya terbukti normal karena telah dikawinkan dan menghasilkan keturunan sedangkan ternak betina produktif memiliki fungsi reproduksi normal tetapi belum dikawinkan. Dengan kata lain, indukan sudah pasti ternak betina produktif tetapi ternak betina produktif belum tentu indukan.

Klasifikasi ternak tersebut mestinya berlaku untuk semua komoditas ternak, termasuk unggas. Pada ayam ras pedaging misalnya, DOC *Final Stock* (FS) itu dikategorikan sebagai ternak bakalan. DOC *Parent Stock* (PS) dikategorikan sebagai indukan, dan DOC *Grand Parent Stock* ke atas (GPS) dikategorikan sebagai bibit. Tidak seperti yang berkembang sampai hari ini, bahwa semua DOC ayam ras (GPS, PS, FS) disebut bibit. Karena semua disebut bibit, maka yang berkembang saat ini GPS disebut bibit dasar, PS disebut bibit induk, dan FS disebut bibit sebar. Ini memang bisa dimengerti tetapi secara ilmiah kurang tepat. Di UU hasil revisi, definisi bibit dan bukan bibit sudah sangat jelas.

Terminologi ternak bakalan, indukan, dan bibit sangat penting karena memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi berbeda dalam industri peternakan. Perbedaan tersebut juga penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang adil dan proporsional. Misalnya, investor dalam pembentukan bibit ternak lokal mestinya diberi insentif tinggi oleh pemerintah. Kemudian importir ternak bibit dari luar negeri karena tidak tersedianya bibit di dalam negeri mestinya juga diberi insentif walaupun tidak setinggi insentif yang diberikan kepada pembibit ternak lokal. Demikian juga investor yang mengimpor indukan untuk usaha dikembangbiakkan di dalam negeri mestinya diberi banyak kemudahan dalam urusan importasinya. Sebaliknya pengimpor ternak bakalan perlu dikenai pajak karena usaha penggemukan memberi dampak ekonomi yang lebih rendah dibanding usaha pembiakan dan pembibitan. Apalagi pengimpor daging beku, ini perlu dipajaki lebih tinggi lagi karena sebenarnya yang menikmati keuntungan secara ekonomi hanya segelintir orang dan peternak dari negara pengekspor.

Namun demikian, menyamakan persepsi antar instansi pemerintah

Orientasi peternak yang masih sangat tradisional dalam mengusahakan ternaknya perlu diubah ke arah yang lebih profesional.

Peternak yang selama ini hanya beternak secara sambilan harus diubah menjadi pebisnis ternak yang menguntungkan. Peternak yang selama ini beternak secara sendiri sendiri perlu diarahkan beternak secara kolektif dengan memperkuat koperasi sebagai basis bisnisnya.

Dan masih banyak lagi perubahan mental peternak yang harus dilakukan untuk mengubah kebiasaan lama yang banyak salahnya ke kebiasaan baru sesuai dengan ipteks yang dinamis perkembangannya.

tentang klasifikasi ternak bakalan, indukan, dan bibit ternyata tidak mudah. Contoh yang bisa dipetik adalah upaya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyusun peraturan impor sapi indukan. Sudah hampir dua tahun, ketentuan mengimpor sapi indukan ini belum tuntas. Secara teknis, direktorat jenderal tersebut mestinya menjadi acuan instansi lain dalam penyusunan peraturan yang melibatkan lintas instansi tersebut. Namun itu tampak belum terjadi.

Mudah-mudahan dengan adanya revisi UU dan diklasifikannya ternak secara lebih jelas dapat diikuti dengan revisi peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan hal itu, misalnya aturan tentang besaran bea masuk berbagai macam ternak. Jika tidak direvisi, maka beberapa pasal dalam UU no. 41 tahun 2014 bisa tidak operasional karena berbenturan dengan peraturan lain yang kewenangannya tidak di Kementerian Pertanian. Jadi semua peraturan yang terkait akibat adanya revisi UU No. 18 Tahun 2009 harus segera dievaluasi dan disesuaikan dengan UU No. 14 Tahun 2014 tersebut.

Hal penting lainnya yang direvisi adalah ketentuan mengenai negara pengekspor ternak dan produk hewan ke dalam wilayah Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2014, ternak dan produk hewan dapat diimpor dari negara manapun sepanjang (a) memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan; (b) bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner; dan (c) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. UU sebelumnya membatasi negara tertentu saja yang dapat memasukkan ternak dan produk hewan ke Indonesia.

Pengaturan negara pengekspor ternak dan produk hewan merupakan substansi yang cukup banyak dibahas dalam penyusunan UU No. 41 tersebut. Ini beralasan karena Indonesia memang belum mampu menyediakan 100% bahan pangan asal ternak bagi 240 juta penduduknya. Ke depan jumlah impor akan makin tinggi jika pembiakan ternak lokal di Indonesia tidak digarap secara serius karena data Badan Pusat Statistik RI menunjukkan adanya penurunan populasi ternak lokal untuk hampir seluruh komoditas ternak.

Pada 2014, dari sumber yang dapat dipercaya dinyatakan bahwa Australia sebagai negara pengekspor terbesar ternak sapi ke Indonesia tidak sanggup lagi memenuhi jumlah sapi yang dibutuhkan Indonesia. Kekurangan stok sapi di Australia diakibatkan oleh adanya negara selain Indonesia yang juga mengimpor sapi dalam jumlah lebih besar dari biasanya. Kelangkaan sapi ini mengakibatkan naiknya harga sapi di Australia. Ini tentu akan berimbas pada naiknya harga daging sapi di Indonesia. Tentu saja ini situasi yang tidak baik. Semakin tinggi ketergantungan bangsa Indonesia kepada bangsa lain untuk urusan bahan pangan akan mengancam kedaulatan bangsa di bidang pangan.

Konsekuensinya perlu ada perubahan mendasar dalam pembangunan sektor peternakan ini. Peternak sebagai mayoritas pemilik ternak lokal di Indonesia selama ini kurang digarap secara terarah dan sistematis. Mereka mencintai ternak dan totalitasnya sebagai peternak tidak diragukan lagi. Namun demikian, mayoritas dari mereka hanya berpendidikan rendah dan buta ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tenaga yang dikeluarkan untuk usaha beternak tidak sebanding dengan performa ternak yang dipelihara. Apalagi sebagian besar dari mereka tidak berbisnis tetapi hanya melakukan usaha sampingan.

Program pemerintah selama ini tampaknya kurang memberi dampak signifikan terhadap perkembangan populasi ternak. Lebih dari 50% anggaran per program biasanya digunakan untuk belanja ternak. Ternak yang dibeli dari satu provinsi/kabupaten diberikan kepada peternak di provinsi/kabupaten lainnya. Dalam banyak program, pergerakan ternak betina yang kadang-kadang berjarak jauh (antar provinsi antar pulau) justru seringkali mengakibatkan banyaknya kematian dan juga mengurangi kinerja reproduksinya.

Akan lebih bijaksana apabila pemerintah secara total membenahi peternaknya dulu. Orientasi peternak yang masih sangat tradisional dalam mengusahakan ternaknya perlu diubah ke arah yang lebih profesional.

Sumber Daya Peternakan

Peternak yang selama ini hanya beternak secara sambilan harus diubah menjadi pebisnis ternak yang menguntungkan. Peternak yang selama ini beternak secara sendiri-sendiri perlu diarahkan beternak secara kolektif dengan memperkuat koperasi sebagai basis bisnisnya. Dan masih banyak lagi perubahan mental peternak yang harus dilakukan untuk mengubah kebiasaan lama yang banyak salahnya ke kebiasaan baru sesuai dengan iptek yang dinamis perkembangannya.

Mengubah orientasi berpikir peternak yang akan mengubah wawasan dan perilaku peternak tradisional jelas memerlukan proses panjang. Ini menyangkut pendidikan mental yang tidak dapat dilakukan melakukan pendekatan proyek. Ini pekerjaan besar mengingat mayoritas peternak bukan tenaga terdidik dan berkarakter tradisional. Pekerjaan ini harus dikerjakan secara sinergi antar kementerian dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Mayoritas peternak perlu ditingkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek sehingga mereka menjadi lebih cerdas, lebih terampil, dan diharapkan dapat mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Jokowi–JK dengan Nawacitanya yang salah satunya membangun Indonesia dari pinggir, dari kalangan marginal, atau dari kalangan tak terdidik sebagaimana pada komunitas peternak berskala kecil.■

Maret 2015

Urus Peternaknya Dulu Jika Ingin Swasembada Daging

Selama ini pemerintah cenderung hanya mengurus ternak dengan berbagai programnya. Menggunakan dana besar, sapi dibeli dari daerah produsen dan diberikan kepada peternak di daerah lain yang jarang populasi sapi. Itu selalu dilakukan dalam rangka pengembangan populasi untuk mensukseskan program swasembada daging. Tapi, dalam rangka swasembada daging juga, daerah produsen ternak mulai menghambat keluarnya sapi dari daerahnya karena takut populasi sapi terkurus. Jadi ada indikasi penurunan populasi sapi.

Ini tampaknya sejalan dengan fenomena saat ini. Jutaan peternak sebagai pemilik 98% ternak sapi lokal di Indonesia belum diurus secara benar. Peternak tidak dipantau dalam mengelola sapi indukannya sehingga populasinya stagnan dan bahkan menurun. Data di beberapa kecamatan yang saya pantau menunjukkan bahwa jumlah populasi sapi hampir sama sejak 2003 sampai dengan 2015 ini. Peternak hanya memelihara sapi indukan selama 4–5 tahun dengan hanya menghasilkan 2–3 ekor pedet selama hidupnya. Padahal potensi hidupnya bisa 20 tahun dengan jumlah anak yang dihasilkan mencapai 18 ekor sapi baru. Saya yakin fenomena seperti itu terjadi secara merata di banyak daerah.

Adu argumen antara pemerintah dan importir terus berlangsung



hingga detik ini. Pemerintah merasa yakin bahwa swasembada dapat dicapai sedangkan para importir menyatakan sebaliknya. Berhasil tidaknya swasembada daging sangat tergantung pada ketersediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) daging sapi di dalam negeri. Menariknya, dua kubu tersebut menggunakan data yang berbeda. Untuk ketersediaan daging, angka versi pemerintah lebih tinggi daripada angka versi importir sedangkan untuk permintaan daging, angka versi pemerintah lebih rendah daripada angka versi importir. Dengan data masing-masing itu, importir menghendaki jumlah sapi dan daging yang diimpor lebih banyak sedangkan pemerintah menghendaki sebaliknya. Sampai kiamat perdebatan itu tidak akan pernah bisa diselesaikan kalau demikian.

Pada prinsipnya pembangunan peternakan sapi pedaging di Indonesia tidak akan terlepas dari sapi indukan. Sapi indukan ini berfungsi sebagai “pabrik biologi” penghasil sapi jantan dan betina. Sapi jantan disembelih untuk penghasil daging bagi manusia. Untuk itu, pemerintah harus fokus mengurus peternak yang memiliki sapi indukan saja.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa (a) masih banyak ditemukan sapi betina produktif disembelih di Rumah Potong Hewan di banyak daerah. Cukup sering terjadi janin ditemukan dari perut sapi betina produktif yang disembelih tadi; (b) harga daging sapi terus merangkak naik dan semakin mahal. Menurut importir, fenomena ini memperkuat argumen perlunya impor sapi dan daging beku lebih banyak agar harga bisa diturunkan dan berkurangnya populasi sapi betina produktif dapat dicegah. Namun ketika quota impor sapi dan daging beku diperlonggar, situasi di lapangan tidak berubah yaitu harga daging tetap tinggi dan sapi betina produktif tetap disembelih juga.

Tarik ulur dua kubu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi bagi masyarakat terus berlanjut dengan masing-masing merasa bertujuan baik. Kementerian Pertanian yang diwakili Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tetap bertahan mengurangi quota impor sehingga melindungi peternak sapi lokal domestik. Di sisi lain importir ingin quota impor tetap diperlonggar agar harga daging menurun dan lebih terjangkau masyarakat banyak. Namun, fakta di lapangan bertentangan dengan niat baik kedua belah pihak. Peternak tidak menikmati untung banyak dan harga daging tetap tinggi.

Apakah keributan para elit di Jakarta tersebut berdampak kepada jutaan peternak sapi lokal di seluruh Indonesia? Pantauan saya di banyak daerah dan langsung berdiskusi dengan para peternak menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti dan merasa tidak perlu mengerti serta tidak ingin mengerti tentang apa yang diperdebatkan oleh para pejabat tinggi tersebut. Bagi mereka terlalu berat memikirkan diskusi para elit di Jakarta. Soal harga daging murah atau mahal, mereka tidak peduli karena itu bukan urusan mereka. Bagi peternak, mereka hanya bertugas memelihara dan mencarikan pakan ternak sapi. Pada saat tidak punya uang, mereka akan jual sapi dan jika masih ada uang, sapi diper-tahankan.

Jadi, menurut saya, perdebatan tentang swasembada daging merupakan kegiatan buang-buang energi dan sangat tidak produktif karena tidak ada dampak apapun kepada jutaan peternak kecil yang mendominasi kepemilikan sapi di dalam negeri. Para elit adu kepintaran, adu pengalaman, dan adu strategi dalam rangka mencapai tujuan masing-masing tetapi data yang dijadikan acuan berbeda dan akurasi data yang diacu masing-masing pihak juga meragukan semua pihak. Siapa yang bisa menghitung jumlah sapi lokal di Indonesia secara tepat dengan kondisi dan lokasi peternak yang tersebar di Indonesia yang sangat luas ini dan rata-rata kepemilikannya hanya 2 ekor per peternak. Ini jelas bukan pekerjaan mudah.

Dengan kondisi usaha peternakan yang bersifat sambilan dan tradisional, akan sangat sulit menghasilkan data *supply and demand* secara akurat sehingga kebijakan yang diambil untuk menyusun kebijakan bisa menjadi salah. Oleh karena itu, dalam acara Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Menteri pertanian menyatakan bahwa tidak ada lagi program swasembada daging. Yang ada adalah program peningkatan produktivitas ternak. Untuk ternak sapi, salah satu kegiatan yang dilakukan di 2015 ini adalah pemasukan sapi indukan sebanyak 30 ribu ekor.

Pada prinsipnya pembangunan peternakan sapi pedaging di Indonesia tidak akan terlepas dari sapi indukan. Sapi indukan ini berfungsi sebagai “pabrik biologi” penghasil sapi jantan dan betina. Sapi jantan disembelih untuk penghasil daging bagi manusia. Untuk itu, pemerintah harus fokus mengurus peternak yang memiliki sapi indukan saja.

Berbagai hal yang perlu diurus pemerintah diantaranya adalah: **Pertama**, penerbitan Buku Pemilik Ternak Indukan (BPTI) sebagai dokumen negara. Data setiap ternak sapi indukan termasuk ciri-ciri individu serta perjalanan hidupnya harus dicantumkan dalam BPTI. Ini setara dengan

Mengingat bahwa 98% populasi ternak lokal dimiliki oleh peternak kecil, maka saatnya pemerintah mengubah orientasinya dalam pengembangan peternakan di Indonesia. Yang tadinya pemerintah sering membuat program yang secara langsung mengurus ternaknya harus diubah menjadi program yang secara intensif mengurus kemampuan peternaknya agar dapat mengurus ternaknya secara lebih produktif.

perlunya negara menerbitkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) untuk setiap kendaraan bermotor. Adanya BPTI ini akan mempermudah pemerintah menghitung populasi ternak indukan dan perkembangannya karena sudah tersistem.

Kedua, pemandulan 90% sapi jantan nonpemacek di seluruh Indonesia sehingga peternak harus menggunakan teknik IB (Inseminasi Buatan) untuk perkawinan antara sapi indukan dan sapi pejantan. 10% sapi jantan yang tidak dimandulkan akan diseleksi untuk dijadikan calon pejantan pemacek. Dengan demikian, silsilah sapi dari generasi ke generasi akan terpantau secara berkesinambungan karena identitas indukan dan pejointannya selalu tercatat rapi. Parameter seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, frekuensi beranak, dan jumlah anak per induk secara nasional akan terungkap secara lebih akurat. Jika silsilah sapi selalu tersedia secara konsisten maka suatu saat peternak dapat menghasilkan sapi berkualifikasi bibit.

Ketiga, pemberian penghargaan kepada peternak yang dapat mempertahankan sapi indukannya beranak 5 kali, 10 kali, 15 kali, dan 20 kali secara proporsional. Misalnya, peternak memperoleh sejumlah uang dan sertifikat dari kepala dinas peternakan kabupaten/kota setempat jika indukannya beranak 5 kali, dari bupati/walikota setempat jika indukannya beranak 10 kali, dari gubernur jika indukannya beranak 15 kali, dan dari Presiden RI jika indukannya beranak 20 kali atau lebih. Pemberian penghargaan kepada prestasi sapi indukan jauh lebih bermanfaat daripada penghargaan kepada sapi jantan berdasarkan bobot badan seperti yang selama ini ada.

Adanya indikasi terjadinya pengglonggongan sapi yang diikuti dalam acara kontes ternak di Lamongan Jawa Timur memicu kemarahan banyak pihak. Hanya untuk mengejar ambisi jadi juara, peternak rela menyakiti ternaknya dengan memberi makan dan minum dalam jumlah

besar sesaat agar bobot badannya mencapai maksimum. Jika indikasi itu dapat dibuktikan dan ternyata benar adanya, maka pemerintah perlu mengambil sikap tegas.

Tidak mudah untuk mengerjakan tiga urusan tadi. Perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat menyelesaikannya. Namun jika tiga urusan awal itu sukses, maka ketersediaan data sapi indukan akan menjadi akurat dan akan dapat diterima semua pihak. Berbagai program akan dapat direncanakan berdasar kalkulasi yang tepat dan hasilnya juga akan signifikan karena melibatkan peternak yang betul-betul peternak.

Dalam rangka memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 ini, penguatan kemampuan dan profesionalitas peternak kecil merupakan hal mutlak. Globalisasi perdagangan barang dan jasa menuntut profesionalitas dari setiap insan manusia termasuk peternak kecil. Tanpa peningkatan daya saing manusianya, Indonesia akan melemah sebagai suatu bangsa. Dan ini akan sangat berbahaya dalam jangka panjang. Mengingat bahwa 98% populasi ternak lokal dimiliki oleh peternak kecil, maka saatnya pemerintah mengubah orientasinya dalam pengembangan peternakan di Indonesia. Yang tadinya pemerintah sering membuat program yang secara langsung mengurus ternaknya harus diubah menjadi program yang secara intensif mengurus kemampuan peternaknya agar dapat mengurus ternaknya secara lebih produktif. Dan dalam rangka mengurus peternaknya, pemerintah tidak mungkin sendiri. Insan kampus yang dipenuhi manusia kompeten dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dijadikan partner strategis untuk mempercepat peningkatan kemampuan peternak yang jumlahnya banyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalangan pelaku usaha swasta yang kuat secara finansial maupun jaringan bisnisnya juga perlu dirangkul untuk berperan aktif mengurus peternak kecil sehingga dalam jangka panjang dapat dijadikan mitra bisnisnya. Pendekatan sinergi antar komponen bangsa yang berbeda latar belakangnya ini akan dapat membuat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan asal hewan di negerinya sendiri.■

Juni 2015

Sapi Indonesia *versus* Australia

Dalam konteks peternakan sapi, Indonesia dan Australia tak layak dibandingkan karena bukan perbandingan apel ke apel. Meski demikian, saya ingin menyajikan dinamikanya dan bagaimana akhir dari perbandingan tersebut saat ini.

Di Indonesia, lebih dari 98% ternak dikuasai oleh 6,5 juta peternak kecil dengan skala kepemilikan 2–3 ekor per peternak. Ternak dipelihara di belakang rumah dan peternak memberi makan di sisa waktunya setelah usaha pokoknya selesai. Hanya kurang dari 2% sapi ternakan dikuasai perusahaan ternak besar di Indonesia. Yang dipeliharapun sapi bakalan dari Australia.

Di Australia, sapi ternakan dikuasai hanya ratusan peternak besar dengan skala kepemilikan puluhan ribu ekor per peternak. Ternak dipelihara di lahan pastura puluhan ribuan hektar. Ini satu beda pokok. Masih banyak beda lain yang semuanya mengarah pada daya saing peternakan sapi di Australia jauh lebih tinggi daripada di Indonesia.

Di Australia pada Juni 2013 harga daging sapi Rp 37.830 per kg, lebih rendah ketimbang harga pada Desember 2012 sebesar Rp 42.195 per kg. Mungkin salah satu penyebab penurunan harga itu dipicu kebijakan pemerintah Indonesia membatasi impor daging sapi dan impor sapi.

Di Indonesia sebaliknya. Sejak November 2012, harga daging sapi naik hingga menembus angka di atas Rp 100.000 per kg pada Juni 2013.



Padahal, harga yang wajar menurut beberapa peternak adalah Rp 75.000 per kg. Berdasarkan harga itu, sangat jelas konsumen di Indonesia paling dirugikan. Idealnya konsumen membeli daging dengan harga murah, tetapi peternak tetap untung. Kalau membuat harga daging murah dengan bebas membuka keran impor daging dari Australia, peternak yang buntung seperti kejadian pada 2009 dan 2010. Jadi itu cara yang tidak pas. Perlu dicari solusi agar terjadi keseimbangan yang menguntungkan peternak sebagai produsen dan konsumen.

Pandangan saya begini. Karena ada pengetatan kuota impor daging sapi dan impor sapi bakalan, para Pengusaha Penggemukan Sapi (PPS) membeli sapi bakalan dari peternak kecil. PPS ini pada posisi membutuhkan sapi sehingga harga sapi bakalan di peternak lumayan tinggi dan peternak pun sumringah. Namun tingginya harga di peternak kecil masih masuk kalkulasi untung di pihak PPS. Akibatnya, para belantik (perantara) gigit jari karena kesulitan mendapatkan sapi. Peternak lebih suka menjual sapi kepada pengusaha besar daripada kepada belantik karena harga lebih baik. Hanya peternak yang terdesak situasi saja yang melepas sapi kepada belantik.

Hal ini berimbas kepada para jagal kecil. Pasokan sapi sulit didapat sehingga daging di pasaran langka. Hukum ekonomipun berjalan: harga daging melonjak naik. Situasi seperti ini mulai tampak sejak November 2012.

Kesempatan harga daging yang tinggi di Indonesia ini tidak disia-siakan PPS. Mereka mengerem pelepasan sapi mereka untuk dipotong sehingga harga daging tetap tinggi. Mumpung ada kesempatan mengeruk untung banyak, mengapa tak dilakukan.

Selama ini yang untung besar importir daging saja, bukan importir sapi bakalan, karena selisih harga daging di Australia dan di Indonesia jauh. Jadi, pihak yang berwajah murung pada situasi saat ini adalah belantik, jagal kecil, importir daging sapi, dan konsumen! Yang gembira: PPS.

Peran Pemerintah

Bagaimana pemerintah harus memainkan peran? Dalam jangka pendek dan sudah dilaksanakan adalah mengimpor daging sapi. Importirnya BULOG, dengan harapan harga daging sapi turun sampai ke Rp 75.000 per kg. Jika langkah ini berhasil dan digunakan terus selanjutnya, ini bisa berbahaya. Pelan tapi pasti, sapi lokal kita habis terkuras. Hasil

Sensus Pertanian 2013 mengindikasikan kekhawatiran ini.

Sensus Pertanian 2013 (Kompas 17 Juli 2013) menyimpulkan populasi sapi turun 19% dari data yang dirilis pada 2011. Kita menghormati data ini karena diterbitkan BPS yang kompeten. Dosa akibat hasil itu seolah-olah dibebankan kepada Kementerian Pertanian saja, lebih khusus ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), sebagai lembaga pemerintah yang berwenang teknis dalam peternakan. Tak semudah itu!

Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke Ditjen PKH menjalankan program swaembada daging sapi dan kerbau hanya sanggup membenahi usaha persapian di Indonesia tidak lebih dari 10% populasi sapi lokal yang dikuasai peternak kecil itu. Misalnya, kegiatan pengendalian pematangan sapi betina produktif, hanya sanggup ditargetkan (2103) 142.520 sapi; distribusi pejantan pemacek ke wilayah non-inseminasi buatan ditargetkan 6.250 ekor; peningkatan gizi pakan ditargetkan untuk sekitar 32.000 sapi.

Anggaran yang tidak banyak itu juga digunakan untuk kegiatan lain yang tak langsung berdampak pada peningkatan populasi sapi seperti pembentukan kelompok baru bagi peternak pemula, pelatihan bagi inseminator, peningkatan keterampilan peternak.

Jika kegiatan yang ditargetkan 2013 itu berhasil 100%, jelas dampaknya hanya dirasakan oleh, dugaan saya, tidak lebih dari 400.000 ekor sapi. Padahal, jumlah sapi lokal betina produktif di Indonesia yang perlu dibenahi dan ditingkatkan produktivitasnya sekitar 3,5 juta ekor. Jadi, banyak ternak lokal dan peternak kecil yang tak tersentuh program swasembada. Banyak pula peternak yang tidak tahu program swasembada daging karena kebanyakan dari mereka lulusan SD/SMP saja.

Jadi, peternak kecil di Indonesia bertanding sendiri dengan peternak di Australia untuk memenuhi kebutuhan daging sapi bagi konsumen Indonesia khususnya di Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang, dan Bekasi). Siapa yang menang? Dua-duanya masih semangat beternak sapi, tapi juara saat ini: PPS. Importir daging sebagian berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan menyeret petinggi partai.

Momentum ini harus mengubah strategi pemerintah membangun peternakan sapi di Indonesia dengan anggaran terbatas itu. Gotong royong pemerintah, pengusaha, dan peternak kecil harus dioptimalkan.■

Pembodohan Sistematis Terhadap Peternak

Memang ironis. Ribuan sarjana peternakan dari puluhan perguruan tinggi di Indonesia enggan menjadi peternak. Mayoritas sarjana peternakan bekerja di industri peternakan atau di perusahaan peternakan atau sekalian di luar bidang peternakan. Di sisi lain jutaan peternak yang tersebar di seluruh Indonesia tidak dapat kuliah di perguruan tinggi karena berbagai keterbatasan. Fenomena ini telah berlangsung puluhan tahun hingga detik ini. Jadi tidak mengherankan jika kondisi ternak lokal seperti sapi, kerbau, kambing/domba, dan unggas yang mayoritas dipelihara peternak berpendidikan rendah makin terdegradasi kualitasnya dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan yang sangat cepat terjadi pada industri pengolahan hasil ternak dan diversikasi produknya sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pasar semakin terbuka lebar di Indonesia tetapi penyediaan bahan baku di dalam negeri tidak dapat mengimbangi permintaan produk ternak yang terus meningkat. Ketergantungan impor akan semakin besar jika kondisi peternak dibiarkan dalam kondisi keterbatasan dan tak memahami ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan secara baik.

Ada dua hal utama yang membuat mayoritas peternak tetap dalam kebodohan. **Pertama**, cara yang dilakukan pemerintah dalam membina peternak kurang tepat. Apalagi dengan program bantuan sosial yang berorientasi pada belas kasihan dan pemerataan kesejahteraan. Program ini sangat rawan korupsi dan mengeksploitasi peternak sebagai objek penderitaan serta menjadi tumbal pembangunan peternakan.

Sebagai contoh pembinaan yang dilakukan selama ini. Peternak kecil diminta berkelompok dengan anggota 20–30 peternak per kelompok. Setiap kelompok diberi 20–30 ekor sapi betina sehingga masing–masing peternak memelihara seekor sapi. Pembuatan kandang, penyediaan pakan, dan obat-obatan difasilitasi oleh pemerintah selama satu tahun. Setelah itu, peternak harus bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup ternaknya. Dalam perjalanannya, terkadang ternaknya mati karena tak diurus secara baik, terkadang sakit kemudian dijual, terkadang disakiti sehingga sakit beneran dan akhirnya dijual, dan terkadang sengaja dijual dengan berbagai alasan. Namun ada pula yang dipelihara dengan

baik sampai beranak pinak.

Kondisi seperti itu jamak ditemukan di masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum bagi komunitas peternakan. Namun demikian, kejadian seperti itu terus berulang dan berulang lagi. Ratusan millar rupiah per tahun digelontorkan ke segala penjuru tanah air untuk kegiatan yang lebih banyak mubazirnya itu. Kenapa? Ternyata program itu memang banyak madunya. Yang paling banyak menikmati madunya adalah para pedagang sapi sedangkan peternaknya tetap saja tak beranjak nasibnya.

Pihak lain yang diuntungkan dengan program bantuan sosial seperti itu adalah politisi di parlemen. Dengan program bantuan sosial tersebut, para wakil rakyat menggunakan pengaruhnya agar birokrat yang menangani program itu mengalokasikan sapi dan fasilitasnya kepada konstituennya. Dasar pemilihannya bukan karena profesionalitas peternak tetapi karena loyalitas peternak ke partainya. Praktek seperti ini tidak hanya dijalankan satu partai tertentu tetapi hampir semua partai yang memiliki akses terhadap program bantuan sosial berperilaku sama saja.

Tentu saja, pihak yang babak belur adalah para birokrat yang bertanggung jawab terhadap implementasi program bantuan sosial. Para birokrat telah bersusah payah membuat kriteria calon penerima bantuan, menyusun persyaratan lokasi program, serta menetapkan spesifikasi ternak. Namun demikian, berbagai kriteria dan ketentuan itu tidak dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan karena intervensi dari



Mayoritas sarjana peternakan bekerja di industri peternakan atau di perusahaan peternakan atau sekalian di luar bidang peternakan. Di sisi lain jutaan peternak yang tersebar di seluruh Indonesia tidak dapat kuliah di perguruan tinggi karena berbagai keterbatasan. Fenomena ini telah berlangsung puluhan tahun hingga detik ini. Jadi tidak mengherankan jika kondisi ternak lokal seperti sapi, kerbau, kambing/domba, dan unggas yang mayoritas dipelihara peternak berpendidikan rendah makin terdegradasi kualitasnya dari waktu ke waktu.

partai yang luar biasa kuatnya. Oleh karena itu, adanya kebijakan moratorium program bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sangat melegakan bagi sebagian orang yang mengerti nasib peternak tetapi tentu saja sangat menjengkelkan bagi orang yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja.

Kedua, tanpa disadari oleh hampir semua kaum intelektual negeri ini, selama ini pemerintah tidak berpihak kepada peternak dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan di Indonesia. Peternak dibiarkan dalam kebodohan oleh para akademisi karena kebijakan yang kurang tepat dalam memberikan penilaian kinerja akademisi dalam meniti karirnya sampai mencapai jabatan fungsional tertinggi sebagai profesor.

Dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) No. 17 Tahun 2013 disebutkan adanya ketentuan mengenai pembobotan terhadap kegiatan tridharma perguruan tinggi dari unsur pendidikan dan pengajaran; penelitian; pengabdian; dan penunjang tridharma perguruan tinggi. Untuk kenaikan jabatan fungsional dosen dari asisten ahli menjadi lektor; kemudian dari lektor menjadi lektor kepala; dan dari lektor kepala menjadi guru besar, unsur pendidikan dan pengajaran diberi bobot paling sedikit antara 35% sampai 55%. Unsur penelitian diberi bobot paling sedikit 25% sampai 45%. Unsur pengabdian dan unsur penunjang masing-masing hanya diberi bobot paling banyak 10%.

Dengan pembobotan seperti ini, para akademisi bekerja keras untuk mengajar dan membimbing mahasiswa; serta melakukan penelitian dan memublikasikan hasil penelitiannya. Mereka hanya melakukan pengab-

dian kepada masyarakat ala kadarnya karena kegiatan ini hanya dibatasi maksimal 10% dari seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi. Tidak boleh lebih dan yang penting ada.

Akibatnya banyak dosen dapat mencapai jenjang profesor karena banyak memublikasikan hasil risetnya walalupun hasil riset tersebut tidak bermanfaat bagi peternak. Mereka tidak banyak melakukan pengabdian kepada peternak untuk alih teknologi karena kegiatan itu tidak dihargai berdasarkan sistem pembobotan tersebut. Dengan kata lain, ada pembodohan terhadap peternak yang dilakukan para intelektual kampus di seluruh Indonesia. Mengenakan!!!

Kedua hal tersebut telah membuat negara agraris dan negara bahari yang sangat membanggakan ini tidak dapat mandiri dan berdaulat pangan. Berbagai macam produk peternakan diimpor. Bibit ternak untuk semua komoditas ternak lokal tidak tersedia di negeri ini. Para peternak dibiarkan oleh semua kaum intelektual kampus yang hanya asyik dengan penelitian dan penelitian saja. Jabatan fungsional tertinggi sebagai profesor dapat diraih karenanya, tetapi hampir semua hasil risetnya tak bermakna bagi peternak yang mendominasi kepemilikan ternak di negeri ini.

Bersinergi Mendampingi Peternak

Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya perlu ditinjau ulang, khususnya lampiran IV beserta seluruh ketentuan yang terkait. Lingkup kegiatan dan kriteria dalam melakukan pengabdian perlu diredifinisi. Selanjutnya pembobotan unsur pengabdian dalam menilai kinerja dosen untuk kenaikan jabatan fungsionalnya tidak dimarginalkan lagi jika kaum intelektual diharapkan perannya dalam mencerdaskan peternak yang mayoritas berpendidikan rendah itu.

Cara yang ditempuh dalam membina para peternak juga harus dilakukan melalui pendekatan lain yang lebih cerdas dan lebih profesional. Ini perlu melibatkan direktorat jenderal teknis, direktorat jenderal pendidikan tinggi, dan lembaga penelitian. Satu contoh cara pembinaan. Peternak dalam satu kawasan dihimpun untuk membentuk usaha bersama sehingga minimal ada 1.000 ekor sapi betina produktif yang terhimpun dalam kawasan. Satu kawasan ini bisa berupa satu dusun atau satu desa atau satu kecamatan. Dalam populasi sebanyak 1.000 ekor sapi itu, dilakukan program seleksi dengan tujuan memilih sapi berkualitas baik untuk dijadikan indukan dan menyingkirkan sapi berkualitas rendah un-

tuk dipotong sebagai penghasil daging.

Para peternak yang terhimpun dalam satu manajemen usaha bersama itu diajari berbagai hal yang bersifat teknis maupun nonteknis. Para pengajar atau pendampingnya berasal dari perguruan tinggi maupun dari lembaga penelitian. Para mahasiswa juga dapat dilibatkan dalam pendampingan kepada peternak yang telah terhimpun dalam satu usaha bersama tersebut. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Kuliah Kerja Profesi (KKP) atau kegiatan lainnya yang berorientasi pada transfer teknologi dari kampus ke peternak.

Pendekatan itu akan dapat berhasil jika ketiga institusi tersebut bersinergi sejak dari perencanaan dan implementasinya, serta evaluasi kegiatan yang dilakukan. Pendampingan harus dilakukan lebih dari satu tahun dan sebaiknya maksimum empat tahun dengan harapan para peternak di kawasan itu dapat mandiri dan berdaulat. Bersama, pasti bisa mewujudkan kedaulatan peternak.■

Data Akurat untuk *Grand Design* Perunggasan

Dalam tiga tahun terakhir ini, nasib baik belum berpihak kepada peternak ayam ras pedaging (*broiler*). Perusahaan besar pun juga menderita kerugian. Diperkirakan pada 2014 lalu, kerugian yang diderita industri perunggasan secara nasional berkisar di Rp 7–10 triliun. Jumlah angka yang fantastik. Yang lebih mengesankan, kerugian sebesar itu lebih dikarenakan tidak akurasinya dalam memprediksi kebutuhan konsumsi daging ayam per kapita per tahun.

Data GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas) yang diterbitkan majalah TROBOS Livestock edisi Februari 2015 menunjukkan bahwa konsumsi daging ayam pada 2012 sebesar 6,9 kg/kapita/tahun tetapi DOC FS (ayam umur sehari *Final Stock*) diproduksi dengan target konsumsi 7,5 kg/kapita/tahun. Jadi kelebihan pasokan setara 0,8 kg/kapita/tahun. Pada 2013, konsumsi 7,8 kg/kapita/tahun tetapi target produksinya dibuat 8,6 kg/kapita/tahun sehingga kelebihan pasokan setara 0,8 kg/kapita/tahun.



Akurasi data dalam industri perunggasan nasional menjadi prasyarat penting. Baik data untuk menentukan jumlah pasokan ayam (*supply*) maupun data untuk menentukan jumlah permintaan ayam (*demand*). Ini sangat penting untuk membuat prediksi target konsumsi daging ayam setiap tahun agar tidak meleset jauh. Juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai macam kebijakan nasional di perunggasan.

Pada 2014, kelebihan pasokan setara 1,3 kg/kapita/tahun karena konsumsi hanya 8,6 kg/kapita/tahun tetapi dipasang target 9,9 kg/kapita/tahun. Kesalahan menentukan target konsumsi yang hanya selisih kurang dari 1 kg/kapita/tahun ternyata berakibat kelebihan pasokan ayam 3 juta ekor per minggu atau meleset sekitar 6%.

Bisakah angka 6% diturunkan menjadi 1% agar kerugian triliunan rupiah dapat dihindari? Secara teoritis bisa tetapi pada praktiknya tidak semudah membalik tangan. Akurasi data dalam industri perunggasan nasional menjadi prasyarat penting. Baik data untuk menentukan jumlah pasokan ayam (*supply*) maupun data untuk menentukan jumlah permintaan ayam (*demand*). Yang justru tidak mudah adalah dalam menentukan data permintaan ayam. Padahal ini sangat penting untuk membuat prediksi target konsumsi daging ayam setiap tahun agar tidak meleset jauh.

Oleh karena itu, penyajian data statistik peternakan untuk ayam ras pedaging perlu direvisi. Dari sisi pasokan, populasi ayam ras pedaging yang disajikan dalam data statistik selama ini adalah jumlah ayam FS. Padahal umur ayam FS rata-rata hanya sebulan.

Jika ingin menyajikan data populasi ayam pedaging, yang dihitung mestinya adalah ayam PS (*Parent Stock*) sebagaimana pada ayam ras petelur. Ini menyangkut umur ayam PS. Setiap tahun mestinya disajikan jumlah ayam apkir, jumlah ayam yang mulai memproduksi, serta parameter teknis lainnya seperti angka kematian dan angka kelahiran.

Untuk data ayam FS, tidak hanya disajikan jumlah ayam FS secara umum tetapi perlu lebih spesifik. Misalnya, jumlah ayam FS diklasifikasikan menjadi tiga kelas. Kelas A (ringan) dengan bobot badan saat dipotong <1 sampai dengan 1,3 kg; kelas B (sedang) dengan bobot badan >1,3 sampai dengan 1,6 kg; dan kelas C (berat) dengan bobot badan >1,6

kg. Atau jika perlu dibuat lebih banyak kelas lagi supaya lebih rinci.

Dengan data yang lebih rinci seperti itu, akurasi data pasokan ayam maupun data permintaan ayam akan lebih tinggi. Ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai macam kebijakan nasional di perunggasan.

Dari sisi pasokan, dengan mengetahui data ayam PS secara rinci, kita akan tahu kapasitas terisi di setiap perusahaan pembiakan (ayam PS) dan di setiap perusahaan pembibitan (ayam GPS). Ini berimbas pada kejelasan dan kepastian dalam menentukan jumlah ayam GPS yang di-impor.

Dari sisi permintaan, dengan mengetahui data ayam FS secara rinci, kita akan mendapat informasi lebih akurat tentang konsumsi daging dan jumlah ayam FS yang seharusnya diproduksi. Dengan demikian, target konsumsi yang dibuat menjadi lebih mendekati kenyataan dan kesalahan memprediksi target konsumsi benar-benar dapat diturunkan dari 6 % menjadi kurang dari 1%.

Selain itu, data pendukung yang memacu perkembangan bisnis dan industri perunggasan juga perlu lebih dibuat rinci. Misalnya perihal infrastruktur. Mungkin dapat disajikan data jumlah *farm* yang belum memperoleh pasokan listrik atau yang pasokan listriknya sering mati (*byar pet*). Juga terkait jalan akses menuju *farm*. Berapa jumlah jalan yang rusak parah dan yang bagus, serta data aspek lainnya yang secara langsung mempengaruhi daya saing produk perunggasan. Seluruhnya bisa dilakukan jika semua pihak termasuk pemerintah mau berkomitmen memperbaiki industri perunggasan ini secara menyeluruh.

Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat tetapi data yang disajikan dalam bisnis dan industri perunggasan tampaknya belum mencerminkan adanya perkembangan teknologi informasi tersebut. Jika kita tidak berbenah diri dan mengubah pendekatan kita dalam menyajikan data-data sebagaimana diuraikan di atas, maka daya saing perunggasan nasional akan terus lemah dan tidak pernah akan menjadi negara eksportir produk perunggasan. Sebaliknya kita akan selalu menjadi negara super defensif yang selalu ketakutan menghadapi ancaman negara lain yang lebih kuat daya saingnya.■

Maret 2015

Unggas Perlu Perlakuan Sama Seperti Sapi

Kebijakan pemerintah tentang swasembada daging telah meningkatkan gairah peternak untuk kembali menekuni usaha peternakan sapi karena harga sapi di tingkat peternak sangat baik. Memang dengan kebijakan tersebut, pemerintah terus membatasi kuota impor daging beku dan sapi bakalan sampai hanya 10% pada 2014 nanti.

Di sana-sini memang ada keluhan kesulitan mencari sapi, tapi hasil sensus sapi dan kerbau 2011 lalu mengindikasikan bahwa persediaan sapi di dalam negeri masih mencukupi kebutuhan daging secara nasional 2012 dan diprediksi juga mencukupi sampai 2014. Dengan demikian pemerintah tetap bertahan pada kebijakannya untuk membatasi kuota impor dan memang pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang telah direncanakan sendiri.

Jelas ada korelasi kuat antara pembatasan impor dengan harga sapi di dalam negeri yang berakhir dengan suasana kondusif bagi peternak untuk beternak. Mengapa hal yang sama tidak dilakukan terhadap komoditas ayam pedaging (*broiler*). Fluktuasi harga bakalan ayam (*Day Old Chicken*, DOC/ayam umur sehari) dan harga ayam hidup yang



tinggi telah berlangsung bertahun-tahun. Suatu saat produksi DOC *over supply* sehingga harga DOC terjun bebas.

Telur terpaksa diaborsi agar tidak menetas dan bahkan banyak telur tetas dijual sebagai telur konsumsi. Keadaan sebaliknya (kelangkaan DOC) juga terjadi yang membuat harga DOC melangit. Bagi peternak berskala kecil, fluktuasi harga yang sering terjadi membuatnya gulung tikar hingga saat ini.

Kalau sapi bisa dikendalikan pasokan dagingnya, mestinya pasokan ayam juga bisa dikendalikan oleh pemerintah karena banyak sedikitnya *broiler* di Indonesia ditentukan oleh populasi ayam *Grand Parent Stock* (GPS) yang 100% diimpor. Bila menghitung sapi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan dimiliki oleh jutaan peternak saja bisa, mestinya menghitung ayam GPS yang hanya dimiliki belasan perusahaan pembibitan ayam merupakan pekerjaan yang amat sangat mudah.

Dengan membiarkan usaha beternak *broiler* tanpa pengendalian populasi oleh pemerintah, jelas terjadi perang bisnis antar pelaku usaha. Namun adu kekuatan perusahaan besar tidak membuat salah satu mati. Akibat perang tersebut, yang justru mati adalah peternak berskala kecil.

Dengan siklus hidup dan pola kehidupan “ayam industri” yang sudah tetap, maka memprediksi *supply-demand* daging ayam juga sangat mudah. Memprediksi jumlah ayam GPS yang diimpor pastinya dapat dilakukan karena pada sapi juga bisa.

Yang memiliki otoritas dalam menentukan jumlah ayam GPS yang diimpor adalah pemerintah juga. Jadi, supaya adil perlakuannya dalam menangani komoditas sapi dan komoditas ayam, mestinya pemerintah juga mengatur secara ketat impor ayam GPS-nya.

Dengan membiarkan usaha beternak *broiler* tanpa pengendalian populasi oleh pemerintah, jelas terjadi perang bisnis antar pelaku usaha. Dalam bisnis dikenal istilah “*jika saya tidak mematikan usaha pesaing saya, maka usaha saya yang akan dimatikan*”.

Namun adu kekuatan perusahaan besar tidak membuat salah satu mati. Akibat perang tersebut, yang justru mati adalah peternak berskala kecil. Situasi seperti sudah sering terjadi dan tampaknya ada pembiaran

perang bisnis dalam industri perunggasan.

Selama pemerintah tidak memainkan peran dan otoritasnya dalam mengendalikan populasi ayam di sektor hulu (pembibitan), upaya yang dilakukan komunitas perunggasan agar peternak berskala kecil juga ikut menikmati gurihnya industri *broiler* akan sia-sia. Program *check-off* yang dicontohkan berhasil di negara lain dan dibahas berkali-kali kandas di tengah jalan karena tidak semua perusahaan perunggasan mendukungnya.

Kesepakatan antara pengusaha untuk mengatur *supply and demand* juga tak manjur hasilnya karena fluktuasi harga masih terjadi. Jelas energi dan pemikiran terbuang sia-sia walaupun kepuasan sesaat juga diperoleh bila merasa menang dalam perangnya.

Silaturahmi antar pengusaha juga terganggu jika dalam suasana usaha tidak kondusif. Sumpah serapah terkadang muncul dalam dialog dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Secara keseluruhan, industri perunggasan beraura kurang sehat.

Jadi, waktunya pemerintah mengoptimalkan otoritasnya dalam rangka mewujudkan suasana *ayem tentrem* bagi seluruh pelaku usaha mulai dari kecil sampai kelas kakap dalam industri perunggasan di Indonesia. Para pengusaha juga sangat mengharapkan ketegasan pemerintah untuk mengatur usaha perunggasan ini sebagaimana yang sedang dilakukan pada komoditas sapi.■

Oktober 2012

Pembibitan

Salah Kaprah Pemahaman Bibit

Masalah pembibitan (termasuk pembenihan ikan) di Indonesia telah lama dibicarakan karena hingga saat ini Indonesia memang belum mampu menyediakan bibit atau benih secara mandiri. Untuk komoditas ayam ras (bukan ayam lokal) pedaging maupun petelur, bibitnya masih 100% impor. Untuk komoditas ternak lokal lainnya, tidak ada juga usaha perbibitan yang dikembangkan secara khusus.

Namun, dalam diskusi di berbagai forum, masih banyak pihak yang mengklaim bahwa usaha pembibitan di Indonesia telah berkembang. Tampaknya masih cukup banyak pihak yang memahami bibit secara salah. Pemahaman tentang ternak bibit menjadi tambah rancu karena adanya definisi bibit yang dibagi menjadi bibit dasar, bibit induk, dan bibit sebar.

Contoh pemahaman yang salah terjadi pada ayam ras pedaging (*broiler*). Yang dimaksud bibit sebar adalah DOC (*Day Old Chick*) ayam potong; bibit induk adalah *Parent Stock* (PS); sedangkan bibit dasar adalah *Grand Parent Stock* (GPS). Jika PS dan GPS disebut bibit, itu sangat betul. Tapi kalau DOC ayam potong (*final stock*) disebut bibit juga, ini merupakan kesalahan fatal.

Lain lagi dengan komoditas ternak ruminansia besar. Semua betina yang bisa beranak disebut sebagai bibit. Demikian juga untuk ternak jantan. Semua ternak jantan yang sanggup mengawini ternak betina dan membuatnya beranak disebut juga sebagai bibit. Ini juga pemahaman yang salah dalam konteks pengembangan usaha perbibitan ternak.

Akibatnya, ketika ada program pembibitan ternak, yang terjadi adalah pendistribusian ternak betina (ada juga yang berstatus bunting) ke wilayah yang akan dikembangkan men-



jadi wilayah sumber bibit. Akibat lain yang muncul sampai hari ini adalah pelarangan perkawinan silang antar bangsa ternak khususnya yang melibatkan ternak lokal di banyak wilayah.

Yang dilarang adalah ternak milik peternak. Padahal secara ekonomis, ternak hasil persilangan memang lebih besar dan lebih memberikan banyak keuntungan. Ini termasuk kebijakan yang perlu ditinjau ulang. Biarkan masyarakat berupaya memanfaatkan ternak miliknya sendiri.

Yang penting, pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan ternak lokal melalui usaha pembibitan ternak secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan. Menurut kaidah ilmiah, sejatinya bibit adalah ternak jantan/betina yang mampu bereproduksi dan berkembang biak; serta memiliki sifat unggul dan lebih unggul daripada rata-rata populasinya yang diakibatkan karena proses pemuliaan melalui seleksi dan/atau kawin silang.

Melakukan pengembangan usaha pembibitan ternak adalah melakukan program pemuliaan pada populasi ternak yang sudah ada untuk ditingkatkan mutu genetiknya. Karena ini berjangka waktu panjang, maka peternak yang berusaha di bidang pembibitan harus memiliki kriteria yang lebih “cerdas” daripada peternak yang hanya sekedar membudidayakan ternak.

Ternak jantan atau betina yang hanya bisa berreproduksi dan berkembang biak saja disebut sebagai pembiak dan bukan bibit. Jadi usaha pembibitan adalah upaya strategis dan berjangka waktu panjang untuk menghasilkan bibit sebagaimana didefinisikan itu. Bukan pendistribusian betina produktif yang bisa beranak.

Dengan kata lain, melakukan pengembangan usaha pembibitan ternak adalah melakukan program pemuliaan pada populasi ternak yang sudah ada untuk ditingkatkan mutu genetiknya. Karena ini berjangka waktu panjang, maka peternak yang berusaha di bidang pembibitan harus memiliki kriteria yang lebih “cerdas” daripada peternak yang hanya sekedar membudidayakan ternak.

Jumlah ternak dalam populasi yang akan dikembangkan menjadi bibit juga harus banyak. Jika populasi ternak tersebut dimiliki banyak

Perbibitan

orang, maka mengorganisasi peternak untuk mencapai tujuan pembibitan ternak mutlak diperlukan.

Inilah tantangan besar dalam melibatkan peternak berskala kecil untuk berusaha di bidang pembibitan ternak yang benar dalam bentuk *Village Breeding Centre* (VBC). Memang berat dan tidak semua komunitas dapat diorganisir, namun saya yakin bahwa ada komunitas yang mau dan mampu menerapkan *Village Breeding Centre* (VBC) secara benar dan tepat.

Percayalah, jika yang dimaksud dengan mengembangkan usaha pembibitan ternak lokal adalah kegiatan yang telah banyak dilakukan selama ini (yang sebenarnya program pembiakan ternak dan bukan pembibitan), maka mutu genetik ternak lokal kita akan terus merosot baik sifat reproduktivitas maupun produktivitasnya.

Mengapa? Karena memang tidak ada program terarah dan ter-sistem untuk meningkatkan mutu genetiknya tetapi berkutat mengembangkan ternak saja. Hasil pembiakannya? Ternak yang berpenampilan baik justru dijual sehingga tinggal ternak berpenampilan jelek yang dipelihara.

Bagaimana ini disebut pembibitan? Karena pembibitan ternak mensyaratkan tersedianya peternak cerdas, berpengalaman, serta memerlukan jumlah ternak yang banyak, manajemen, dan pengorganisasian yang baik, maka usaha pembibitan harus dilaksanakan secara profesional dan terukur. Dalam konteks ini, kita harus mengapresiasi siapapun yang mau menanamkan modalnya di bidang perbibitan (termasuk perbenihan) di Indonesia.■

Agustus 2010

Segera Benahi Pembenihan dan Pembibitan!!!

Rencana implementasi Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 terus menggelinding ke publik. Tak kurang, Presiden RI dalam kunjungannya ke Australia pun mengangkat PSDS dalam pembicaraannya dengan kalangan eksekutif dan parlemen negeri kanguru tersebut.

Pro dan kontra pun semakin menyeruak di berbagai media cetak. Kelompok pro tentunya sangat berharap terwujudnya kemandirian dalam penyediaan daging sapi di Indonesia. Namun kelompok kontra menginginkan adanya kebebasan dalam berbisnis tanpa harus ada aturan yang dapat menghambatnya. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan kebijakannya.

Dalam *blue print* PSDS 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud swasembada adalah terpenuhinya 90% kebutuhan daging di Indonesia dari sapi lokal dan 10% sisanya dari impor. Padahal, dahulu negeri kita ini pernah mengekspor sapi ke luar negeri. Artinya, telah terjadi penurunan populasi ternak sapi lokal kita secara sangat signifikan. Kalau data statistik pemerintah menunjukkan adanya kenaikan populasi ternak, perlu ditanyakan bagaimana metode menampilkan angka-angka tersebut dalam buku statistik.

Karena itu, tidak bisa tidak, peternakan sapi dan juga komoditas ternak lainnya, harus ditata secara lebih serius dan visioner! Sekarang sudah ada Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pemerintah harus konsisten melaksanakan amanah dalam UU ini dan memberi contoh kepada masyarakat dan pelaku bisnis peternakan. Kalau pemerintah sendiri tidak konsisten dalam menerapkan UU tersebut, sampai hari kiamat tiba, swasembada yang 90% tidak akan tercapai apalagi kemandirian pangan. Omong kosong.

Penataan harus dimulai dari pembenihan dan pembibitan karena ini merupakan pencetak sumber benih dan sumber bibit. Pemerintah sangat berperan penting dalam pengembangan usaha pembenihan dan pembibitan ternak ini.

Yang harus dilakukan pemerintah, diantaranya, pertama adalah semua Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) milik pemerintah pusat maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) peternakan milik

Perbibitan

pemerintah daerah harus mengusahakan dan mengembangkan bibit sapi lokal. Sekarang ini masih ada unit milik pemerintah yang secara total mengembangkan sapi impor atau persilangannya. Ini bertentangan dengan makna yang terkandung dalam UU No. 18/2009 pasal 13 ayat 1-3, yang intinya bahwa ternak sapi lokal harus diprioritaskan dalam pengembangannya. Kalau pemerintah saja tidak melakukan bunyi pasal tersebut, apalagi masyarakatnya.

Kedua, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, BIB daerah, serta Balai Embrio Ternak (BET) juga harus mengusahakan benih sapi lokal saja. Sejak dulu sampai sekarang ini hampir semua BIB dan BET lebih banyak menyediakan benih sapi impor sehingga masyarakat peternak sudah kecanduan menyukai sapi impor yang performanya lebih besar dan secara ekonomis lebih menguntungkan.

Akibatnya di wilayah pulau Jawa khususnya populasi ternak lokal sulit ditemui. Dan semestinya BIB tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan semen, tetapi harus berperan penting dalam menyusun dan menerapkan kebijakan pemuliaan ternak sapi yang terarah, terstruktur, tersistem, dan berkelanjutan.

Ketiga, pewilayahan sumber bibit berdasarkan budaya masyarakat dan sumber daya alamnya harus dilakukan. Pemerintah harus menentukan secara tegas wilayah mana yang sapinya harus murni sapi lokal dan wilayah mana yang sapinya boleh disilang-silangkan.

Sekarang ini tidak ada kejelasan tentang hal itu sehingga subjektivitas dalam mengambil keputusan pengembangan pembenihan dan pembibitan ternak sangat kental sekali. Bisik-bisik dari kolega pun (yang berorientasi kepentingan pribadi) kadang-kadang bisa dijadikan landasan pengambilan keputusan. Jika terjadi, ini sangat tidak profesional dan



berbahaya.

Keempat, pemerintah harus memberikan insentif kepada investor yang mau berusaha di bidang pembenihan dan pembibitan. Tidak hanya kepada pelaku usaha berskala besar, tetapi juga yang berskala kecil. Program KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) sebagai salah satu upaya pemerintah membantu subsidi bunga kepada pelaku usaha pembibitan sapi masih terkendala oleh keraguan bank dalam menyediakan dana pengadaan sapi bibitnya. Jadi program ini belum berjalan semulus yang direncanakan.

Kelima, pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di bidang pembenihan dan pembibitan, mulai dari peternak kecil melalui pengembangan *Village Breeding Centre* (VBC) yang profesional; serta aparat pemerintah yang menangani masalah pembenihan dan pembibitan khususnya para pejabat fungsional di bidang pembibitan.

Penataan harus dimulai dari perbenihan dan perbibitan karena ini merupakan pencetak sumber benih dan sumber bibit. Pemerintah sangat berperan penting dalam pengembangan usaha perbenihan dan perbibitan ternak ini.

Keenam, pelaku usaha peternakan diberi kebebasan menentukan jenis ternak sapi yang dikembangkan sesuai dengan keinginannya. Pemerintah tidak boleh memaksa peternak harus memelihara ternak lokal saja karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia serta bertentangan dengan kesepakatan internasional. Apapun ternak yang dipelihara, yang penting diusahakan di dalam negeri. Yang berkewajiban mengembangkan ternak lokal pemerintah saja.

Saya yakin, melalui tindakan itu, pembenihan dan pembibitan ternak sapi akan dapat berhasil dalam mendukung terwujudnya swasembada daging yang sesungguhnya di Indonesia. Namun itu perlu waktu dan tidak dilakukan berbasis proyek semata.■

April 2010

Supaya Kualitas & Kuantitas Ternak Lokal Tak Tergerus

Masalah pembenihan dan/atau pembibitan ternak lokal di Indonesia telah dibincangkan sejak 30 tahun lalu. Namun selama itu pula kuantitas dan kualitas ternak lokal Indonesia semakin menurun dan secara faktual tidak tersedia bibit ternak lokal. Yang ada hanya ternak lokal betina yang bisa bunting dan beranak, serta ternak lokal jantan yang bisa menghasilkan sperma untuk mengawini ternak betina.

Dan, sekali lagi, ini bukan bibit! Lebih tepat disebut “pemiak”. Hal ini karena hanya berfungsi mengembangbiakkan populasi ternak tetapi tidak meningkatkan mutu genetik ternak dalam populasinya.

Untuk komoditas sapi potong, jumlah semua bangsa sapi lokal (sapi bali, SO, PO, hissar, dan lainnya) terus menurun dari waktu ke waktu. Jumlah yang meningkat adalah sapi persilangan antara bangsa sapi lokal dan bangsa sapi asing (luar negeri). Hal ini dikarenakan peternak lebih suka memelihara sapi persilangan mengingat bobotnya lebih berat ketimbang bobot sapi lokal dan secara ekonomi lebih menguntungkan.

Balai inseminasi buatan milik pemerintah sebagai produser semen



juga memproduksi lebih banyak semen sapi asing daripada semen sapi lokal. Dalam jangka panjang, penggunaan teknologi IB (Inseminasi Buatan) untuk persilangan antar bangsa sapi secara tidak terstruktur dan tidak sistematis dapat membumihanguskan sapi lokal.

Sebaliknya untuk komoditas sapi perah, hanya satu bangsa sapi yang berkembang baik yaitu bangsa sapi Friesian Holstein (FH). Teknologi IB juga diterapkan tetapi bukan untuk persilangan antar bangsa sapi. Semen yang diproduksi pejantan juga berasal dari bangsa sapi FH. Semen tidak hanya digunakan untuk mengawini sapi betina FH tetapi juga untuk mengawini anak yang dihasilkan dari perkawinan IB tersebut. Ini sebagai salah satu bentuk perkawinan *inbreeding* (perkawinan antar kerabat).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat diharapkan untuk menerapkan secara konsisten peraturan pemerintah tentang sumber daya genetik hewan dan perbibitan ternak; memberi insentif atau fasilitas yang kondusif bagi investor yang mau bergerak di bidang perbenihan dan/atau perbibitan ternak; mengoptimalkan unit pelaksana teknis pusat dan daerah untuk pembibitan ternak lokal saja; dan meningkatkan peran dan fungsi Komisi Perbibitan Ternak Nasional secara lebih profesional sehingga dapat secara efektif membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan perbenihan dan/atau perbibitan ternak di Indonesia.

Peningkatan koefisien *inbreeding* sebesar 10% dapat menurunkan produktivitas sapi sebesar 3%. Jika *inbreeding* ini terus dilakukan, dapat dipastikan produktivitas akan terus menurun. Saat ini produksi susu sapi FH yang dipelihara masyarakat hanya mencapai rata-rata 12 liter per hari selama laktasi. Padahal potensinya bisa memproduksi rata-rata lebih dari 30 liter susu per hari jika dipelihara pada lingkungan yang optimal.

Pada komoditas kuda dan domba, potensi menghasilkan bibit bermutu tinggi sangat besar. Tanggal 16 November 2010 lalu, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) telah mengajukan surat permohonan pelepasan bangsa Kuda Pacu Indonesia (KPI) yang

merupakan hasil persilangan *grading up* selama lebih dari 35 tahun. Jika pelepasan sudah diakui oleh pemerintah sesuai aturan yang berlaku, maka KPI benar-benar merupakan bibit kuda Indonesia.

Pada ternak domba, hasil seleksi domba garut jantan untuk “seni ketangkasan” berpotensi dilepas juga sebagai bibit. Tentunya jika silsilah dan prestasinya tersedia secara lengkap dan didokumentasikan secara berkelanjutan.

Untuk ternak unggas dan babi, yang keduanya termasuk kelompok non ruminansia, bibit ternak lokal belum ada sedangkan yang tersedia di Indonesia adalah bibit ayam ras dan bibit babi ras yang seratus persen impor dari luar negeri. Sebaliknya beberapa bangsa unggas lokal dan babi lokal menurun tajam populasinya, bahkan sebagian bangsa terancam punah.

Melihat situasi pembenihan/pembibitan seperti diuraikan di atas, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sangat diharapkan untuk (1) menerapkan secara konsisten peraturan pemerintah tentang sumber daya genetik hewan dan pembibitan ternak yang saat ini masih berupa “rancangan matang” dan sudah di meja Kementerian Hukum dan HAM; (2) memberi insentif atau fasilitas yang kondusif bagi investor yang mau bergerak di bidang pembenihan dan/atau pembibitan ternak.

Lalu (3) mengoptimalkan unit pelaksana teknis pusat dan daerah untuk pembibitan ternak lokal saja; dan (4) meningkatkan peran dan fungsi Komisi Pembibitan Ternak Nasional (KPTH) secara lebih profesional sehingga dapat secara efektif membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembenihan dan/atau pembibitan ternak di Indonesia. Selamat menyambut tahun baru 2011 dan semoga sukses untuk seluruh komunitas peternakan dan kesehatan hewan.■

Desember 2010

Genetika dan Pemuliaan Kuda

Pendahuluan

Menurut buku yang ditulis Soehardjono (1990) yang menyitasi sejarah tentang keberadaan kuda di Indonesia dari ensiklopedia jaman Belanda di 1919, di Indonesia terdapat dua jenis kuda yaitu (i) Kuda Batak dan (ii) kuda sandel atau kuda timor. Kedua jenis kuda itu, menurut buku tersebut, diduga masih dalam satu ras karena keduanya memiliki banyak kemiripan postur dan warna. Selain kedua jenis itu, ada jenis kuda silangan antara kuda arab dan kuda sandel yang hasilnya disebut kuda Kaili dan dikembangkan di Minahasa. Masyarakat di ketiga wilayah tersebut membawa kudanya ke berbagai pulau dan daerah lain di Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri. Sebaliknya, beberapa jenis kuda asing dari luar negeri dimasukkan ke Indonesia melalui kegiatan perdagangan antar negara, diantaranya kuda mongol dari daratan China.

Empat jenis kuda itu melakukan perkawinan diantara mereka sehingga terjadi perkawinan silang. Karena perkawinan silang tidak dilakukan secara sistematis dan tak ada catatan yang memonitor semua hasil persilangannya sejak dulu hingga sekarang, maka semua keturunan hasil persilangan tidak jelas lagi proporsi gennya hingga saat ini. Perkawinan kerabat dekat (*inbreeding*) juga tak terhindarkan karena pada umumnya kuda dipelihara oleh peternak berskala kecil di pedesaan. Dalam perjalanannya, kuda yang tidak jelas lagi asal usulnya secara pasti itu dikembangkan secara turun temurun di daerah masing-masing. Karena itu, masyarakat memberi nama rumpun kuda itu sesuai dengan nama daerah tempat pemeliharaannya, diantaranya yaitu kuda makasar, kuda gorontalo, kuda sumba, kuda sumbawa, kuda bima, kuda flores, kuda savoe, kuda roti, kuda sumatra, kuda jawa, kuda bali, kuda lombok, dan kuda kuningan. Kebanyakan semua kuda itu diklaim sebagai rumpun kuda lokal daerah setempat.

Jadi, mengambil sari cerita buku tersebut, tampaknya semua rumpun kuda lokal berasal dari sumber yang sama yaitu kuda batak, kuda sandel, kuda kaili, dan kuda mongol. Dengan kata lain, patut diduga bahwa kuda asli di Indonesia hanya ada dua yaitu kuda batak dan kuda sandel walaupun keduanya hampir mirip. Adapun rumpun lainnya merupakan kuda hasil persilangan “tak terkontrol” antar berbagai jenis kuda yang ada di Indonesia. Selain itu, sampai sekarang pemasukan jenis kuda

dari luar negeri ke Indonesia untuk tujuan tertentu masih dilakukan misalnya kuda Thoroughbred untuk pacuan kuda.

Sejak dahulu hingga saat ini, mayoritas ternak kuda masih dipelihara peternak berskala kecil yang pada umumnya digunakan untuk alat angkut di pedesaan. Sampai dengan di 2011, populasi kuda di Indonesia mencapai 408.665 ekor dengan populasi terbesarnya di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 138.776 ekor dan di provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 105.981 ekor. Di provinsi lainnya, populasi kuda jumlahnya tidak lebih dari 17.000 ekor per provinsi. Secara lebih lengkap perkembangan populasi kuda di 2008 sampai dengan 2011 disajikan pada **Tabel 1**. Namun tidak ada informasi tentang jumlah setiap jenis kuda atau setiap rumpun kuda yang ada di setiap provinsi.

Tabel 1. Populasi Kuda di Enam Provinsi Sentra Produksi dan di Indonesia

Urutan ke	Provinsi	Populasi (ekor)			
		2008	2009	2010	2011
1	Sulawesi Selatan	112.174	117.293	133.430	138.776
2	Nusa Tenggara Timur	104.019	105.378	113.367	105.981
3	Nusa Tenggara Barat	77.997	77.837	76.517	72.909
4	Jawa Tengah	14.639	14.264	15.152	15.872
5	Jawa Barat	13.717	15.114	13.929	14.080
6	Maluku	10.559	11.541	12.033	13.109
7	Total (INDONESIA)	392.864	398.758	418.618	408.665

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012, halaman 70

Apakah secara genetis kuda batak dan kuda sandel memang merupakan kuda asli Indonesia? Pertanyaan ini memerlukan penelitian komprehensif dan akan lebih akurat hasilnya jika dilakukan melalui pendekatan molekuler. Ini dapat dilakukan menggunakan penciri DNA inti (*nuclear DNA marker*) atau penciri DNA mitokondria (*mitochondrial DNA marker*) yang secara masif telah banyak dilakukan pada komoditas ternak lainnya. Penelitian yang dilakukan Islami (2007) dengan menggunakan runutan gen *cytochrome b* sepanjang 326 pasang basa sebagai penciri DNA menunjukkan bahwa runutan DNA kuda Sumba berbeda sendiri ketika dibandingkan dengan runutan DNA kuda korea, kuda australia, dan beberapa runutan DNA kuda yang diperoleh dari *genebank*. Runutan DNA kuda lainnya sama kecuali hanya satu basa saja yang berbeda. Ini mengin-

Idealnya seleksi buatan dilakukan pada satu populasi tertentu dengan rumpun yang sama. Ini dapat berupa rumpun murni dan dapat pula berupa rumpun hasil persilangan terstruktur. Biasanya seleksi buatan dilakukan untuk meningkatkan kesamaan genetik antar individu dalam satu populasi atau untuk meningkatkan kemurnian genetik individu dalam satu populasi.

dikasikan bahwa berdasarkan informasi pada lokus tersebut (salah satu segmen gen *cytochrome b*), kuda Indonesia berbeda dengan kuda asing.

Untuk mengetahui apakah berbagai rumpun kuda di Indonesia itu juga berbeda secara genetik, Berliana (2007) mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan sampel DNA dari kuda Sandel Arab, kuda Jawa, kuda Sumatera Barat, kuda Priangan, kuda Sumba, kuda Sumbawa, dan kuda thorighbred, dengan menggunakan runutan DNA penyandi 12SRNA sepanjang sekitar 400 pasang basa sebagai pencirinya. Hasilnya adalah tidak ada perbedaan secara signifikan diantara semua kuda tersebut. Jadi berdasarkan lokus tersebut, antar rumpun kuda di Indonesia adalah serupa. Namun demikian, minimnya jumlah sampel dan kurang beragamnya lokus yang digunakan dalam dua penelitian itu membuat informasi yang diperoleh masih terlalu *premature* untuk disimpulkan seperti itu. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi jika ingin menjawab pertanyaan di atas.

Pemuliaan Kuda

Dalam program pemuliaan, secara konvensional hanya ada dua strategi yang digunakan yaitu persilangan dan seleksi. Persilangan adalah perkawinan antara ternak jantan dan ternak betina yang masing-masing berasal dari rumpun berbeda dalam satu spesies yang sama. Persilangan juga dapat berasal dari rumpun berbeda dari spesies yang berbeda juga. Maksud dilakukan persilangan biasanya adalah menggabungkan berbagai sifat yang dikehendaki dari rumpun yang berbeda tadi agar supaya anak yang dihasilkan memiliki beberapa sifat unggul yang berasal dari rumpun yang berbeda tersebut. Sifat yang dikehendaki dari kuda untuk tujuan pacuan misalnya adalah postur tubuh tegap dan ramping, jangkauan kaki lebar, adaptasi terhadap lingkungan tinggi, dan kemampuan

Perbibitan

berlari sangat cepat. Intinya, penentuan sifat yang dikehendaki peternak sangat tergantung dari tujuan yang ingin dicapai dalam program pemuliaan.

Ada beberapa cara persilangan, diantaranya yang terstruktur adalah (i) persilangan antara dua rumpun, tiga rumpun, atau bahkan empat rumpun; (ii) persilangan balik (*backcross*) yaitu anak betina hasil persilangan antara dua rumpun berbeda dikawinkan lagi dengan pejantan dari rumpun asal Bapaknya; (iii) persilangan dalam rumpun. Semua cara persilangan itu mengarah pada pemanfaatan efek positif dari persilangan yang dikenal sebagai heterosis dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak hasil persilangannya.

Di luar negeri, dari penelusuran informasi beberapa perusahaan peternakan kuda melalui internet, menunjukkan bahwa sudah cukup banyak kuda hasil persilangan telah dibuat dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing rumpun, diantaranya adalah: (i) **Spanish-Normans** yang merupakan kuda hasil persilangan antara Andalusians (indah, inteligensi tinggi, dan kompak posturnya) dan Percherons (tegap dan kuat). Kuda untuk olahraga ini sangat potensial untuk seni melompat (*jumping*) dan untuk latihan tunggangan dan pengendalian kuda; (ii) **Warlander** yang merupakan kuda hasil persilangan antara Andalusians dan Friesian (pertulangan kokoh dan kompak postur tubuhnya); (iii) **Hispanoarabe**



yang merupakan kuda hasil persilangan antara Andalusians dan Arab (dibuat untuk membentuk kuda pacu); (iv) **Azteca** yang merupakan kuda hasil persilangan antara Anadalusians dan The American Quarter (tampilan indah dengan karakter dan tingkah laku menawan); dan masih ada beberapa rumpun lain yang merupakan hasil persilangan terkontrol.

Setiap tindakan selalu ada pro dan kontra. Demikian pula untuk persilangan antar rumpun kuda. Bagi kelompok pro, manfaat persilangan sangat signifikan yaitu mampu menggabungkan sifat terbaik dua rumpun ke dalam satu rumpun; tinggi kuda bertambah; variasi warna tubuh bertambah; daya adaptasi lebih baik; dan mampu menciptakan kuda ideal untuk keahlian tertentu. Namun beberapa kelompok kontra justru berpendapat bahwa kuda hasil persilangan berpotensi tidak mewarisi sifat terbaik dari dua rumpun tetua yang digunakan; menghasilkan postur tubuh yang tidak diinginkan; dan mewarisi kelemahan atau ketidaksempurnaan rumpun kuda yang digunakan dalam persilangan.

Pendekatan lain dalam program pemuliaan adalah seleksi. Ini merupakan kegiatan hati-hati untuk memilih ternak terbaik berdasarkan parameter tertentu dalam rumpun yang sama dan dalam satu populasi tertentu. Pada prinsipnya seleksi dibagi menjadi seleksi alam dan seleksi buatan. Seleksi alam merupakan terpilihnya individu terbaik dan mampu menyesuaikan diri dengan alam sehingga dapat berkembang biak secara turun temurun. Lebih lanjut seleksi alam dibagi lagi menjadi dua yaitu seleksi seksual dan seleksi ekologis. Seleksi buatan adalah terpilihnya ternak terbaik karena intervensi manusia melalui berbagai kriteria yang dibuatnya. Idealnya seleksi buatan dilakukan pada satu populasi tertentu dengan rumpun yang sama. Ini dapat berupa rumpun murni dan dapat pula berupa rumpun hasil persilangan terstruktur. Biasanya seleksi buatan dilakukan untuk meningkatkan kesamaan genetik antar individu dalam satu populasi atau untuk meningkatkan kemurnian genetik individu dalam satu populasi.

Dari penelusuran internet juga, beberapa contoh program seleksi yang dilakukan untuk menghasilkan kuda rumpun murni (*purebred*) diantaranya adalah : (i) **Clydesdale** yang sudah ada sejak 300 tahun lalu, sebagai kuda tipe pekerja sehingga banyak digunakan sebagai kuda angkut di pedesaan; (ii) **Arabian** yang merupakan kuda asli dari semenanjung arab, sebagai salah satu rumpun tertua, dan sudah ada sejak 4.500 tahun lalu serta tersebar di hampir seluruh dunia; (iii) **Thoroughbred** yang banyak dimanfaatkan sebagai kuda pacu dan olah raga ketang-

kasan berkuda, berasal dari Inggris dan dikembangkan sejak 350 tahun lalu; (iv) **American Quarter** yang merupakan kuda hasil persilangan terstruktur dan salah satu kuda paling populer di Amerika Serikat dengan karakter sangat bagus untuk pacuan jarak jauh dan bagus juga untuk tampilan (*horse show*); (v) **American Paint** yang juga merupakan kuda hasil persilangan terstruktur yang diperkirakan mulai dikembangkan di 1940 di Amerika Serikat; dan (vi) **Appaloosa** yang juga merupakan satu diantara kuda terpopuler di Amerika Serikat. Nama appaloosa ini diakui secara resmi di negara bagian Idaho Amerika Serikat pada 1975. Masih ada beberapa rumpun kuda murni asli atau murni hasil persilangan terstruktur lainnya yang dipelihara dan dikembangkan secara profesional sebagai kegiatan bisnis di komunitas perkudaan.

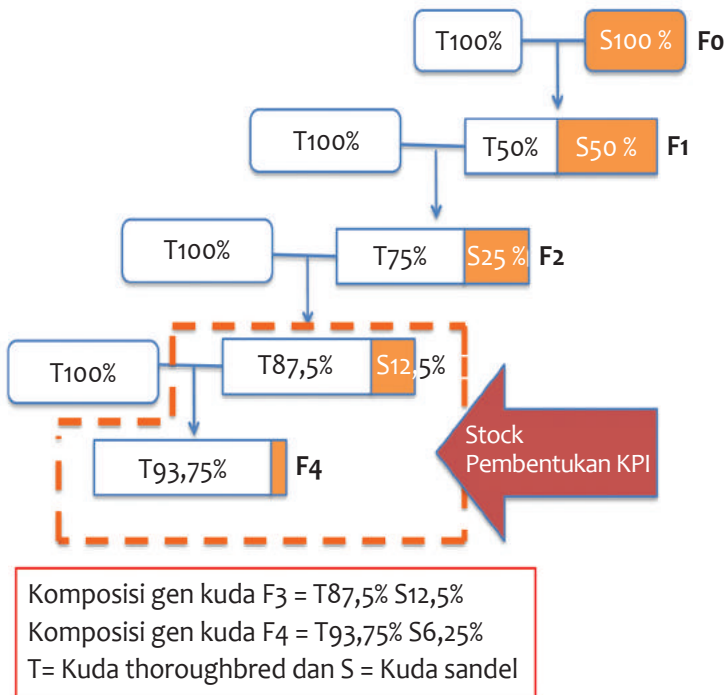
Kuda Pacu Indonesia (KPI)

Ini sebuah nama rumpun baru yang dibentuk khusus untuk menghasilkan kuda pacu tangguh dan mampu berlari secara optimal yang nantinya dapat diproduksi secara berkelanjutan di Indonesia untuk tujuan komersial. Kuda Pacu Indonesia (KPI) dibuat melalui pendekatan persilangan (*grading up*). Niat membuat rumpun baru itu pada awalnya merupakan keinginan pribadi pasangan pecinta kuda yaitu Bapak dan Ibu Soehardjono pemilik *Pamulang Equestrian Centre* (Soehardjono, 1990) dengan mendatangkan kuda pejantan Thoroughbred dari Australia ke Indonesia. Kuda pejantan itu dikawinsilangkan dengan kuda betina sandel dari Indonesia. Ini dimulai pada 1968. Dalam perjalanannya, ide membuat KPI ini dijadikan program resmi oleh Persatuan Olahraga Berkuda Indonesi (PORDASI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke II di Bandung pada 1975.

Dalam Munas II di Bandung itu, para praktisi kuda maupun pakar pemuliaan ternak menetapkan skema persilangan dalam pembuatan KPI sebagai berikut ; Kuda Thoroughbred jantan (Fo jantan) dikawinsilangkan dengan kuda Sandel betina (Fo betina) untuk menghasilkan kuda persilangan Thoroughbred-Sandel (TS-F1) dengan proporsi gen 50%T50%S. Kemudian kuda TS-F1 betina dikawinsilangkan lagi dengan kuda T-Fo jantan untuk menghasilkan kuda TS-SB1 dengan proporsi gen 75% T25%S. Selanjutnya kuda TS-SB1 betina dikawin-silangkan lagi dengan kuda T-Fo jantan untuk menghasilkan kuda TS-SB2 dengan proporsi gen 87,5%T12,5%S. Kemudian TS-SB2 betina dikawinsilangkan lagi dengan T-Fo jantan untuk menghasilkan kuda TS-SB3 dengan proporsi

gen 93,75%T6,25%S. Kuda TS-SB2 dan TS-SB3 baik jantan maupun betina ini pada dasarnya merupakan stok akhir hasil persilangan antara kuda Thoroughbred dan kuda Sandel dalam pembuatan kuda KPI. Selanjutnya kuda KPI dihasilkan melalui tiga cara yaitu: (i) perkawinan antara TS-SB2 jantan dan TS-SB2 betina; (ii) perkawinan antara TS-SB3 jantan dan TS-SB3 betina; dan (iii) perkawinan antara TS-SB2 jantan dan TS-SB3 betina atau sebaliknya. Dengan demikian, secara teoritis, kuda KPI memiliki proporsi gen dari kuda Sandel (S) antara 6,25% sampai 12,5% dan dari kuda Thoroughbred (T) antara 87,5% sampai 97,75%. Secara diagramatis, skema persilangan sistematis untuk menghasilkan KPI disajikan pada **Gambar 1 dan Gambar 2**.

Diagram skema persilangan pembentukan KPI sebenarnya disajikan dalam satu Gambar sehingga skema itu dapat dilihat secara utuh. Diagram ini dipisah menjadi dua gambar dengan maksud untuk memperjelas tahapan penting dalam pembentukan KPI. **Gambar 1** menunjuk-



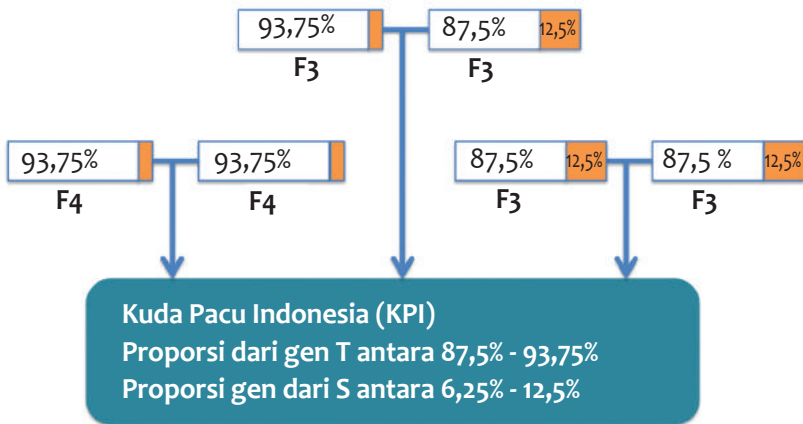
Gambar 1. Persilangan *grading up* digunakan untuk meningkatkan kandungan gen *Thoroughbred* ke ternak Sandel Indonesia, *grading up* dihentikan sampai menghasilkan keturunan F3 dan F4 dan ini merupakan *stock* pembentukan Kuda Pacu Indonesia (KPI)

kan terbentuknya populasi SB2 dan populasi SB3 yang sangat tergantung pada ketersediaan individu kuda thoroughbred murni dan kuda Sandel murni.

Dalam hal ini, keputusan untuk berhenti sampai SB3 sudah tepat karena populasi SB3 masih mengandung proporsi gen kuda Sandel yang berkontribusi pada kemampuan adaptasi lingkungan yang lebih baik serta daya tahan terhadap penyakit. Jika persilangan dilanjutkan lebih dari SB3, maka proporsi gen kuda Sandel berkurang dan bahkan mendekati tidak ada. Ini berarti kembali ke kuda thoroughbred murni, yang akhirnya sama maknanya dengan membeli kuda thoroughbred murni ke Indonesia dan dipertahankan kemurniannya selama di Indonesia.

Dalam rangka menjamin terbentuknya populasi kuda SB2 dan SB3 ke depan, ketersediaan kuda sandel murni juga perlu diperhatikan dan dipastikan adanya. Memang kemurnian kuda sandel Fo masih menimbulkan pro-kontra mengingat kuda tersebut tidak jelas asal usulnya sebagaimana diuraikan di atas dan merupakan hasil persilangan tak terkontrol yang dilakukan secara turun temurun. Dengan menggunakan penciri DNA yang ragamnya tinggi dalam jumlah memadai, sebenarnya kemurnian kuda sandel dapat dideteksi. Namun demikian, jika hasilnya menunjukkan bahwa kuda sandel Fo ternyata tidak murni, maka pertanyaan yang lebih sulit untuk dijawab adalah bagaimana kemudian cara memurnikannya karena terbentuknya semua kuda sandel di Indonesia melalui perkawinan tak terkontrol secara turun temurun. Oleh karena itu, pro-kontra kemurnian kuda sandel Fo tidak perlu diperpanjang dan cukup diakhiri dengan kesepakatan bersama bahwa kuda sandel Fo dengan kriteria tertentu dianggap murni. Yang terpenting adalah bahwa populasi kuda sandel Fo yang ada harus dipertahankan kemurniannya sebagai stok dalam pembentukan populasi SB2 dan SB3 berikutnya.

Dalam konteks pelestarian kuda sandel di Indonesia, jika kuda sandel ini dipelihara peternak berskala kecil, maka harus ada upaya serius dari seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, praktisi/peternak, dan asosiasi) untuk mengembangkan wilayah sumber bibit kuda sandel. Di wilayah tersebut, para peternak dibina dan didampingi agar dapat melakukan kegiatan peningkatan mutu genetik ternak kuda sandel melalui seleksi atau pemurnian. Aturan, kriteria, dan mekanisme penetapan wilayah sumber bibit sudah tersedia yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian RI No. 48/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Pewila-



Gambar 2. Semua hasil perkawinan kuda jantan dan kuda betina sesama F3, sesama F4, dan antara F3 dan F4 menghasilkan Kuda Pacu Indonesia (KPI)

yahan Sumber Bibit.

Gambar 2 menunjukkan pembentukan KPI yang hanya tergantung pada ketersediaan populasi SB₂ dan SB₃ baik jantan maupun betina. Ini merupakan kontribusi PORDASI yang sangat signifikan dalam menyediakan stok kuda pembentuk KPI. Dengan adanya populasi tersebut, impor kuda pejantan thoroughbred dari luar negeri dapat ditiadakan. Populasi kuda SB₂ dan SB₃ ini harus dipertahankan proporsi gennya dan dikendalikan agar tidak terjadi perkawinan dengan kuda rumpun lainnya.

Berdasarkan program pemuliaan melalui persilangan *grading up* seperti diuraikan dalam **Gambar 1** dan **Gambar 2**, KPI dapat disebut sebagai rumpun baru di Indonesia. Selain baru, rumpun KPI juga unik (khas) karena hanya kuda KPI yang diperoleh melalui persilangan antara kuda Thoroughbred dan kuda Sandel dengan proporsi gen tertentu dan terdefinisi. Dalam hal ini, rumpun KPI tidak harus memiliki ukuran dan postur tubuh yang persis sama, tidak harus berwarna sama antar individu, dan tidak harus berkecepatan sama larinya. Keseragaman sempurna seperti itu tidak akan mungkin tercapai kecuali semua ternak dihasilkan melalui teknologi *cloning*. Dalam populasi kuda KPI, pasti ada keragaman warna karena pengaruh warna tetuanya yang juga tidak persis seragam.

Apakah setiap individu kuda KPI benar-benar memiliki komposisi genetik yang merupakan kombinasi dari dua jenis kuda berbeda dengan proporsi gen minimal 87,5% dari kuda thoroughbred dan minimal 6,25% dari kuda sandel? Kita tidak tahu secara pasti dan tidak perlu tahu kepastiannya karena tidak mungkin melakukannya. Proporsi gen terse-

Dalam konteks pelestarian kuda Sandel di Indonesia, jika kuda sandel ini dipelihara peternak berskala kecil, maka harus ada upaya serius dari seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, praktisi/peternak, dan asosiasi) untuk mengembangkan wilayah sumber bibit kuda sandel. Di wilayah tersebut, para peternak dibina dan didampingi agar dapat melakukan kegiatan peningkatan mutu genetik ternak kuda sandel melalui seleksi atau pemurnian. Aturan, kriteria, dan mekanisme penetapan wilayah sumber bibit sudah tersedia yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian RI No. 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit.

but hanya berdasarkan teori peluang saja. Fakta biologisnya tidak persis seperti itu. Yang membedakan kuda KPI dari kuda lainnya adalah catatan silsilahnya yang menunjukkan bahwa setiap kuda KPI dihasilkan melalui skema program pemuliaan seperti disajikan pada dua gambar di atas. Proses pembentukan KPI ini merupakan *intellectual property right* (Hak Kekayaan Intelektual/HKI) milik PORDASI sedangkan kuda KPI adalah produk dari program pemuliaan tersebut. Jadi program pemuliaan yang diterapkan secara konsisten ini berharga mahal karena memerlukan dedikasi tinggi, organisasi yang matang, ketelitian, dan disiplin melakukan pencatatan informasi penting selama hampir 40 tahun.

Karya Anak Bangsa

Sangat jelas bahwa cara yang dilakukan untuk menghasilkan kuda KPI senada dengan cara yang dilakukan di luar negeri untuk menghasilkan rumpun baru kuda. Artinya, KPI merupakan karya besar dan fenomenal yang dihasilkan putra-putri bangsa Indonesia melalui ketekunannya dan kecintaannya terhadap kuda. KPI juga merupakan *pioneer* dalam konteks penerapan ilmu pemuliaan pada ternak lokal di Indonesia, yang mestinya dicontoh oleh para praktisi pada komoditas ternak lokal lainnya dalam rangka menghasilkan bibit unggul ternak lokal di Indonesia. Apa yang dilakukan para pemulia kuda di negara maju sama seperti apa yang dilakukan PORDASI di Indonesia dalam membentuk KPI ini. Fakta ini merupakan peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia ini membangun usaha pembibitan ternak di Indonesia.

Selama ini, hampir semua *textbook* (buku ajar) yang ditulis ilmuwan asing atau bahkan ilmuwan Indonesia sendiri selalu menggunakan contoh kasus usaha peternakan di luar negeri karena memang mereka melakukan program pemuliaan dalam menghasilkan ternak bibit. Dengan adanya KPI ini, paling tidak ada contoh nyata keberhasilan program pemuliaan ternak yang wajib dimasukkan dalam setiap buku ajar genetika dan pemuliaan yang diterbitkan di Indonesia. Ini informasi yang mahal harganya dan merupakan inspirasi bagi praktisi di komoditas lainnya untuk mau mengembangkan bibit bersertifikat.

Kita para generasi penerus di bidang genetika dan pemuliaan perlu belajar dari para pendahulu. Para pakar dan praktisi perkudaan telah berdiskusi panjang lebar untuk akhirnya menyepakati pola persilangan yang digunakan untuk membentuk KPI. Pola itu juga sudah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional II PORDASI pada 1975. Artinya kesepakatan itu sudah mengikat seluruh anggota PORDASI karena Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam PORDASI, dan terbukti bahwa kesepakatan itu dijalankan secara konsisten dan disiplin tinggi selama hampir 40 tahun. Oleh karena itu, apapun usulan untuk mengubah program pemuliaan atau memodifikasi atau memberi nama lain selain KPI tidak mungkin diterima. Perubahan program pemuliaan dan nama KPI hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional PORDASI. Berdasarkan informasi dari Biro Registrasi Kuda (BRK), dari waktu ke waktu jumlah kuda KPI makin bertambah dan prestasi dalam pacuan juga semakin meningkat. Jelas bahwa ini suatu proses panjang yang tidak akan dapat terwujud tanpa dilandasi kecintaan komunitas perkudaan terhadap kudanya.

Perlindungan Hukum Bagi KPI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4468/Kpts/SR.120/7/2013 tentang Pelepasan Rumpun Kuda Pacu Indonesia, KPI secara legal formal telah ditetapkan pelepasannya sebagai rumpun baru. Ini merupakan pelepasan pertama sejak Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak diberlakukan untuk umum. Keputusan Nomor 4468 tersebut sejatinya lebih merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah kepada pemilik hak kekayaan intelektual dalam pembentukan KPI (dalam hal ini PORDASI) terhadap kemungkinan tindakan ilegal dan bentuk penghargaan negara atas prestasi yang dicapai dalam meng-

hasilkan rumpun KPI. Pemberian perlindungan hukum ini sangat penting karena KPI merupakan karya nyata anak bangsa di bidang genetika dan pemuliaan ternak, yang cara menghasilkannya dilalui dengan ketekunan, kehati-hatian, kedisiplinan, dan dengan metode ilmiah yang benar, serta memerlukan anggaran besar.

Pada prinsipnya pelepasan dan penetapan rumpun ternak itu berbeda dan secara substantif sangat berbeda. Penetapan rumpun ternak lebih menekankan legitimisasi terhadap status asal muasalnya suatu rumpun ternak ada di suatu wilayah tertentu yang berdasarkan kajian ilmiah merupakan wilayah sebaran asli geografisnya. Adapun pelepasan

Tabel 2. Perbedaan prinsip antara penetapan dan pelepasan Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008

Perihal	Penetapan
Yang dapat melakukan permohonan	Bupati/Walikota dan Gubernur
Persyaratan yang harus dipenuhi	Ada informasi asal usul atau silsilah ternak; sifat kualitatif dan kuantitatif; dan wilayah sebaran.
Pengujian	Uji observasi terhadap dipenuhinya persyaratan tersebut di atas; dan memiliki nilai populasi efektif 50.
Pihak yang menguji	Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak
Jangka waktu penyelesaian	Satu bulan sejak surat permohonan diterima (untuk semua komoditas ternak)
Persyaratan khusus lain	Tidak ada
Aspek yang dinilai	Deskripsi rumpun; silsilah/asal usul; produktivitas; dan sifat unggul yang dianggap perlu
Nama rumpun	Tidak ada ketentuan
Penarikan kembali	Tidak ada ketentuan

rumpun ternak dimaksudkan memberikan legitimasi terhadap cara atau metode pemuliaan (proses) dalam menghasilkan rumpun baru. Oleh karena itu, permohonan untuk penetapan rumpun hanya boleh dilakukan oleh bupati/walikota dan Gubernur (sebagai penguasa wilayah) sedangkan untuk pelepasan rumpun dilakukan oleh perorangan atau lembaga atau asosiasi. Untuk lebih rinci, perbedaan antara penetapan dan pelepasan disajikan pada **Tabel 2**.

Proses permohonan untuk pelepasan KPI sangat lama dan jauh lebih lama dari ketentuan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tersebut di atas, khususnya Pasal 11 Ayat (2) yang berbunyi

rumpun/galur ternak berdasarkan

Pelepasan

Pemulia, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Kelompok Peternak, Gabungan Kelompok Peternak, Korporasi,

Ada informasi asal usul atau silsilah ternak; metode dan cara mendapatkan rumpun ternak; sifat kualitatif dan kuantitatif;

Uji performa sifat kualitatif dan kuantitatif di berbagai agroekosistem

Laboratorium yang terakreditasi atau BPTU milik pemerintah, BBIB, BIB, BET, dan Balai Penelitian Ternak

Enam bulan (unggas); Sembilan bulan (ruminansia kecil dan non ruminansia); satu tahun (ruminansia besar) sejak surat permohonan diterima.

Produsen memberikan jaminan terjaganya mutu dan kontinuitas ketersediaannya; memberikan standar produktivitas yang telah teruji.

Deskripsi rumpun; silsilah/asal usul; produktivitas; dan sifat unggul yang dianggap perlu.

Menggunakan bahasa Indonesia dan maksimal dua kata; tidak sama dengan nama rumpun yang sudah ada; bukan nama alam, nama orang, bukan symbol kenegaraan, dan bukan nama pewayangan

Pelepasan rumpun dapat ditarik kembali atau dibatalkan keputusannya jika: rumpun tersebut membahayakan keamanan hayati, kesehatan lingkungan, dan kesehatan manusia; dan tidak lagi sesuai dengan deskripsi yang telah ditetapkan.

KPI merupakan karya besar dan fenomenal yang dihasilkan putra-putri bangsa Indonesia melalui ketekunannya dan kecintaannya terhadap kuda. KPI juga merupakan *pioneer* dalam konteks penerapan ilmu pemuliaan pada ternak lokal di Indonesia, yang mestinya dicontoh oleh para praktisi pada komoditas ternak lokal lainnya dalam rangka menghasilkan bibit unggul ternak lokal di Indonesia.

“Jangka waktu penyelesaian pelepasan rumpun atau galur ternak terhitung sejak diterimanya surat permohonan ditetapkan untuk ternak unggas selama 6 (enam) bulan, ruminansia besar 1 (satu) tahun, ruminansia kecil 9 (sembilan) bulan dan non ruminansia selama 9 (sembilan) bulan”. PORDASI telah mendaftarkan permohonan kepada Menteri Pertanian RI sejak Mei 2010 tetapi baru mendapatkan SK-nya pada 1 Ramadhan 1434 atau 9 Juli 2013. Jadi diperlukan waktu tiga tahun lebih untuk menerbitkan Keputusan Menteri tentang pelepasan KPI.

Sebenarnya aturan dan mekanisme permohonan pelepasan rumpun baru kepada pemerintah itu sederhana. Dengan menggunakan formulir tertentu (terlampir dalam Peraturan Menteri No. 19 tersebut di atas), pemohon mengajukan surat permohonan izin pelepasan rumpun baru. Dalam surat permohonan itu, juga dilampirkan deskripsi rumpun ternak yang isinya terdiri atas (1) nama dan alamat pemohon, (2) nama rumpun ternak, (3) ciri spesifik sifat kualitatif, (4) ciri spesifik sifat produksi, (5) ciri spesifik sifat reproduksi, dan (6) metode pemuliaan yang digunakan. Informasi itu ditambah informasi lain dari hasil visitasi langsung ke peternakan dibahas oleh Komisi Penilaian yang kemudian menerbitkan berita acara sebagai salah satu bahan pertimbangan Menteri Pertanian untuk menerbitkan keputusan tentang pelepasan rumpun.

Namun mekanisme yang sederhana itu ternyata dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Yang jelas, diperlukan waktu lebih dari tiga tahun. Tentu saja ini sangat disayangkan. Mestinya bentuk apresiasi seperti ini oleh pemerintah kepada masyarakat yang secara mandiri telah mampu menghasilkan karya besar ini lebih dipermudah, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang sudah digariskan dalam Peraturan Menteri.

Apa yang dikerjakan para praktisi perkudaan di bawah naungan PORDASI dalam menghasilkan rumpun KPI perlu dicontoh oleh praktisi komoditas lain yang peduli terhadap pengembangan dan peningkatan

an produktivitas ternak lokal kita. Dalam hal ini, PORDASI merancang strategi pemuliaannya dengan cara persilangan untuk memperbaiki performa kuda sandel di Indonesia menjadi kuda pacu unggul. Untuk komoditas lain, ayam kampung atau domba garut merupakan sumber daya genetik yang berpotensi digunakan untuk menghasilkan rumpun baru. Kepada pemerintah yang dalam hal ini diwakili komisi penilaian, penetapan, dan pelepasan rumpun atau galur ternak di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian (Ditjen PKH) Pertanian RI sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam menerapkan kebijakan kondusif ini sehingga dapat lebih memotivasi praktisi peternakan untuk bekerja lebih keras dan lebih giat lagi demi pembangunan peternakan di Indonesia.

Penutup

Karena ada ketidakjelasan komposisi genetik kuda lokal Indonesia, tampaknya diperlukan evaluasi genetik secara komprehensif secara molekuler dalam rangka memverifikasi berbagai cerita sejak jaman Belanda sampai saat ini. Terlepas dari jelas tidaknya komposisi genetik kuda yang ada di Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genetik dan pemuliaan ternak telah diterapkan dalam rangka membentuk Kuda Pacu Indonesia (KPI) melalui persilangan antara ternak kuda *native* Indonesia (sandel) dan ternak *exotic* (thoroughbred). Ini kontribusi riil dari masyarakat pecinta kuda melalui PORDASI kepada bangsa dan negara Indonesia dalam rangka mengurangi ketergantungan impor kuda *exotic* dari luar negeri. Legitimasi legal formal yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pecinta kuda (PORDASI) sudah selayaknya diberikan agar masyarakat pecinta ternak komoditas lainnya dapat mengikuti langkah yang dilakukan PORDASI dalam rangka menyediakan ternak bibit.■

Daftar Pustaka

- Berliana D. 2007. Analisis dan Evaluasi Genetik Kuda Pacu Indonesia. *Thesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Islami, R.Z. 2007. Evaluasi performans Kuda Pacu Indonesia dan variasi sekuens DNA mitokondria kuda (*Equus caballus*). *Thesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Oetari Soehardjono. 1990. *Kuda*. Penerbit: Yayasan Pamulang Equestrian Centre.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian RI No. 48/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak
- Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012. Penerbit: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.

Juli 2013

Ternak Betina Produktif

Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara jelas menyatakan, ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih. Setiap orang yang melanggar ketentuan itu dipidana kurungan satu sampai enam bulan dan/atau denda paling sedikit satu juta rupiah sampai lima juta rupiah (untuk kambing/domba).

Apabila yang dipotong adalah sapi/kerbau betina produktif, pelakunya dipidana tiga sampai sembilan bulan kurungan dan/atau denda lima juta rupiah sampai 25 juta rupiah. Ketentuan pidana dan denda ini dinyatakan pada Pasal 86 Undang-Undang tersebut.

Namun demikian, sampai hari ini, tampaknya belum pernah ada media yang memberitakan adanya pelanggaran pasal terkait. Tidak adanya pemberitaan bukan berarti tidak ada ternak ruminansia betina produktif yang dipotong sejak berlakunya Undang-Undang itu.

Yang terjadi adalah belum ada satu orang pun yang memotong ternak ruminansia betina produktif dipidana kurungan atau didenda jutaan rupiah. Semua orang di komunitas peternakan pasti tahu, masih terjadi pemotongan ternak ruminansia betina produktif baik sapi/kerbau maupun kambing/domba; dan semua orang tahu, tidak ada tindakan hukum terhadap pelanggar Pasal 18 ayat (2) itu.

Program pemerintah pusat mengenai pengendalian pemotongan sapi betina produktif telah digulirkan tiga tahun terakhir ini dalam upaya mensukseskan program swasembada daging. Tapi lagi-lagi pemotongan sapi betina produktif masih terus berlanjut setiap hari.

Tidak gampang bagi pemerintah untuk mengawasi sapi betina produktif yang lokasinya tersebar di puluhan ribu pelosok pedesaan. Dan yang pasti hampir semua peternak kecil tidak peduli terhadap ketentuan itu karena mayoritas peternak menganggap ternak sapinya sebagai tabungan yang bisa dijual untuk dipotong. Mereka juga berargumen, sapi yang dipotong adalah miliknya sendiri sehingga mereka dapat melakukan apapun terhadap sapinya.

Fenomena itu akan terus terjadi jika tidak dilakukan perubahan strategi. Jangan lagi menggunakan “ancaman” pidana dalam mengendalikan pemotongan betina produktif tetapi sebaiknya menggunakan cara “apresiasi”. Kepada peternak kecil yang ternak sapinya dapat beranak terus menerus sehingga mereka tidak menjual ternak betinanya

perlu diapresiasi dengan pemberian hadiah. Misalnya peternak diberi sertifikat “Satyalancana Budidaya Muda” plus uang Rp 500 ribu bila ternak betina yang dipelihara telah beranak lima kali atau lebih. Peternak diberi sertifikat “Satyalancana Budidaya Madya” plus uang Rp 1 juta bila ternak betina yang dipelihara telah beranak 10 kali atau lebih. Peternak diberi sertifikat “Satyalancana Budidaya Utama” plus uang Rp 1,5 juta jika ternak yang dipelihara telah beranak lebih dari 15 kali.

Adanya apresiasi dari pemerintah, peternak merasa dihargai jerih payahnya dalam memelihara ternak betinanya. Karena perlu ada bukti tertulis tentang frekuensi beranak, maka informasi tentang status reproduksi setiap sapi betina yang dipelihara mutlak harus tersedia.

Catatan tentang tanggal kawin dan tanggal beranak harus ada. Ini membuat pendataan sapi betina sebagai “pabrik” pedet menjadi sangat akurat. Yang penting lagi, populasi akan terus bertambah karena sapi betina akan dipotong jika sudah berumur tua dan tidak produktif lagi.

Jumlah uang yang diberikan tentunya hanya sebagai “penghargaan” atas dedikasi peternak yang secara konsisten memelihara ternak sapi betinanya dalam jangka panjang. Kepada setiap peternak penerima uang dan sertifikat, dinas peternakan setempat juga perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi di wilayahnya untuk melakukan pelatihan teknis maupun nonteknis, serta memberikan layanan kesehatan secara gratis agar ternak betina yang dipelihara dapat beranak terus secara lebih cepat.



Jika reprodktivitas sapi betina meningkat, maka populasi sapi juga akan bertambah secara cepat. Akibatnya, seleksi dapat diterapkan dalam upaya memilih ternak yang baik dan menyingkirkan ternak yang buruk. Dengan demikian, dari waktu ke waktu akan ada perbaikan mutu genetik. Dalam jangka panjang, tidak mustahil jika suatu saat nanti bangsa kita tidak hanya mencapai swasembada daging tetapi bisa mengulang kejayaan masa lalu yaitu dapat menjadi pengekspor sapi ke luar negeri.

Jika reprodktivitas sapi betina meningkat, maka populasi sapi juga akan bertambah secara cepat. Akibatnya, seleksi dapat diterapkan dalam upaya memilih ternak yang baik dan menyingkirkan ternak yang buruk.

Dengan demikian, dari waktu ke waktu akan ada perbaikan mutu genetik. Dalam jangka panjang, tidak mustahil jika suatu saat nanti bangsa kita tidak hanya mencapai swasembada daging saja tetapi bisa mengulang kejayaan masa lalu yaitu dapat menjadi pengekspor sapi ke luar negeri.

Fakta bahwa lebih dari 98% populasi sapi potong di Indonesia dimiliki peternak berskala kecil dengan rata-rata kepemilikan 2 ekor per peternak merupakan potensi besar yang harus dikelola secara lebih profesional. Kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang otoritas di bidang peternakan, perguruan tinggi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun peternak sebagai pemelihara ternak mutlak dilakukan dalam meningkatkan kinerja peternak dan ternaknya.■

Juni 2014

Impor Sapi Betina Produktif, Mendesak !

Menurut data statistik, jumlah sapi betina dewasa di 2012 adalah 6,6 juta ekor dan mungkin lebih dari 90% diantaranya adalah betina produktif (bisa beranak-pinak). Sapi betina produktif merupakan “pabrik daging”. Walaupun tidak semua penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 230 juta itu mengonsumsi daging sapi, kebutuhan daging sapi harus tercukupi dengan harga yang tidak terlalu mahal.

Dengan semakin meningkatnya harga daging sapi saat ini, ada indikasi bahwa jumlah sapi betina dewasa belum mampu memenuhi 90 % kebutuhan daging sapi di Indonesia. Untuk mencegah kenaikan harga daging sapi lebih tinggi lagi, dalam jangka pendek pemerintah akan mempercepat realisasi impor daging sapi dan impor sapi sesuai kuota yang diberikan di 2013 ini.

Mengimpor sapi betina produktif itu, sama maknanya memindahkan “pabrik daging” dari luar negeri ke Indonesia. Peraturan pemasukan sapi betina produktif perlu dibuat lebih kondusif dan tidak menyulitkan. Agar masuknya sapi betina produktif benar-benar dapat berperan sebagai “pabrik daging” dalam rangka mengurangi impor daging beku dan impor sapi bakalan.

Jika masih kurang, tampaknya kuota impornya juga akan ditambah. Dalam keadaan mendesak, importasi mungkin tidak bisa dihindari, tapi kalau setiap tahun keadaannya selalu mendesak, itu yang tidak benar. Tentu ada yang salah dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan peternakan sapi di dalam negeri.

Oleh karena itu, untukantisipasi jangka panjang agar tidak selalu impor daging sapi dan impor sapi bakalan, populasi sapi betina produktif harus ditambah sesegera mungkin. Dan, sapi produktif ini harus diimpor dari luar negeri.

Dalam pertemuan pakar perbibitan di Sentul tahun lalu, tidak ada satupun dari delapan pakar yang hadir tidak sepakat untuk menambah populasi betina produktif dari luar negeri. Minimal satu juta ekor! dan

Ternak Betina Produktif

idealnya 2 juta ekor!. Importasinya bertahap tentunya. Itu jauh lebih baik daripada selalu menambah impor daging beku atau menambah impor sapi bakalan.

Mengimpor sapi betina produktif itu, sama maknanya memindahkan “pabrik daging” dari luar negeri ke Indonesia. Kalau mengimpor daging beku artinya mengimpor sampah karena daging beku itu siap diolah dan disantap kemudian dibuang ke toilet. Sedangkan mengimpor sapi bakalan sama artinya dengan mengimpor daging hidup karena tiga bulan setelah diimpor sapihnya akan dipotong dan dimanfaatkan dagingnya.

Dengan pengandaian itu, untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia, impor sapi betina produktif akan memberi kontribusi paling signifikan (penyerapan tenaga kerja di kandang, transportasi, dan rumah potong hewan). Sedangkan impor sapi bakalan memberi kontribusi lebih sedikit (karena hanya dipelihara tiga bulan). Bahkan impor daging beku memberi kontribusi paling sedikit.



Karena berperan sebagai “pabrik daging”, impor sapi betina produktif dilakukan bukan untuk peternak berskala kecil. Mereka tidak sanggup menyediakan pakan hijauan dan gizi yang baik sehingga akan berujung pada penurunan kemampuan reproduksi sapi betina produktif tersebut.

Sapi betina ini paling ideal diusahakan oleh perusahaan besar atau dapat juga oleh koperasi peternak sapi yang telah memenuhi kemampuan memadai. Lebih baik juga sapi ini dipelihara melalui cara integrasi dengan tanaman kebun (misalnya kebun sawit yang sudah ada bukti keberhasilannya).

Dari banyak pantauan di lapangan, pemeliharaan sapi betina produktif secara intensif (tidak digembalakan) tidak menguntungkan secara ekonomis. Oleh karena itu, jika ada pihak manapun yang mau melakukan usaha pembiakkan sapi, pemerintah perlu memberi banyak kemudahan karena usaha ini akan membantu mempercepat penambahan populasi sapi sebagai penghasil daging dan menambah peluang pekerjaan bagi masyarakat; dan bagi perusahaan ada risiko tidak kecil.

Peraturan Lebih Kondusif

Peraturan pemasukan sapi betina produktif perlu dibuat lebih kondusif dan tidak menyulitkan. Agar masuknya sapi betina produktif benar-benar dapat berperan sebagai “pabrik daging” dalam rangka mengurangi impor daging beku dan impor sapi bakalan.

Keberadaan sapi betina produktif sejak tiba di Indonesia dimonitor secara terus menerus. Idealnya pemantau perkembangan sapi betina produktif itu dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hasil pantauannya akan lebih objektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Selama ini usaha pembiakan sapi dilakukan oleh peternak berskala kecil dengan kemampuan teknis sangat tidak memadai. Sapi betina produktif juga dipelihara dengan banyak keterbatasan sehingga kualitas sapi yang dihasilkan makin lama makin menurun kualitasnya. Jika tidak ada penambahan populasi sapi betina produktif dari luar negeri, dipastikan bahwa ke depan akan semakin banyak impor sapi bakalan dan impor daging baku dari luar negeri.■

Agustus 2013

Dilema Sapi Betina Produktif

Walaupun pemerintah telah mengimpor puluhan ribu daging sapi dan ribuan sapi pedaging siap potong, ternyata harga daging di berbagai wilayah belum turun. Bahkan ada yang menembus angka Rp 140.000 per kg. Terlepas dari apa yang terjadi di balik “keanehan” hukum ekonomi tersebut (suplai tinggi pasti harga turun tetapi ternyata tidak), yang jelas Indonesia perlu menambah populasi sapi sehingga stabilitas harga daging sapi dapat lebih terjamin.

Sebenarnya hal itu sudah disadari pemerintah di awal pencanangan program swasembada daging. Pada 2011 pemerintah telah melaksanakan program KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) dengan target mendatangkan satu juta ekor sapi bibit selama kurun waktu lima tahun, atau 200 ribu per tahun. Pemasukan sapi bibit dilakukan oleh perusahaan besar atau koperasi dengan pendanaan dari pinjaman bank. Pemerintah dalam hal ini memberi subsidi bunga.

Tetapi sampai Juni 2013, hanya 20 ribu ekor bibit yang diimpor dan ternyata sapi yang dimasukkan juga bukan kelas bibit. Sekitar 13% saja



Indonesia perlu menambah populasi sapi sehingga stabilitas harga daging sapi dapat lebih terjamin. Sebenarnya hal itu sudah disadari pemerintah di awal pencanangan program swasembada daging. Pada 2011 pemerintah telah melaksanakan program KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) dengan target mendatangkan satu juta ekor sapi bibit selama kurun waktu lima tahun, atau 200 ribu per tahun. Pemasukan sapi bibit dilakukan oleh perusahaan besar atau koperasi dengan pendanaan dari pinjaman bank. Pemerintah dalam hal ini memberi subsidi bunga. Tetapi sampai Juni 2013, hanya 20 ribu ekor bibit yang diimpor dan ternyata sapi yang dimasukkan juga bukan kelas bibit.

subsidi bunga yang dimanfaatkan dengan mendatangkan sekian ribu ekor sapi betina produktif. Itu termasuk sapi perah dan yang mendatangkan adalah perusahaan penggemukan dan koperasi. Dari pantauan di lapangan, sapi yang diimpor melalui program KUPS memang bukan kelas bibit tapi betina produktif. Dapat dimaklumi bahwa saat itu mayoritas peternak menyebut bibit untuk betina produktif calon indukan.

Harga pemberitaan tentang sapi makin seksi sejak dicanangkan program swasembada daging 2014. Kasus impor daging menyeret petinggi salah satu partai dan kasus impor sapi betina produktif dari Australia yang di-PTUN-kan masih belum tuntas juga. Carut-marut persiapan makin memperjelas ketidaksiapan perangkat hukum di Indonesia menghadapi hal seperti itu. Banyak pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan investor frustrasi.

Impor ribuan sapi betina produktif yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan izin impor sapi bibit dimasalahkan. Badan Karantina masih menahan ribuan sapi tersebut di IKHS (Instalasi Karantina Hewan Sementara) dan sebagian sapi sudah melahirkan tetapi urusan belum tuntas. Pemerintah yang digugat para importir dinyatakan kalah dalam persidangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan sekarang naik ke tingkat banding. Belum tahun kapan rampungnya nanti.

Padahal kebutuhan sapi betina produktif sangat dibutuhkan untuk mempercepat penambahan populasi sapi dalam rangka keberhasilan program swasembada daging. Sejak program swasembada daging dicanangkan di 2010, pemerintah memerlukan sekitar 2 juta ekor untuk dikembangkan di Indonesia. Baru di 2012 ditetapkan kebijakan impor

Ternak Betina Produktif

sapi betina produktif dikeluarkan melalui program KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) untuk sebanyak 1 juta ekor, yang sampai saat ini baru terealisasi 13% atau baru diimpor sebanyak 130 ekor saja. Importasi dilakukan oleh pelaku usaha dengan subsidi bunga.■

Introduksi Teknologi

IB Bukan untuk Persilangan Saja !!!

Pada 2 Maret 2012 sembilan ekor pejantan unggul sapi *red wagyu* dipindahkan dari Victoria Australia ke Temanggung Jawa Tengah Indonesia. Dalam waktu tiga tahun, akan dipindahkan 300 ekor sapi betina unggul dan 100 ekor pejantan unggul *red wagyu*. Sapi-sapi tersebut akan digunakan sebagai penghasil sperma (semen) dan embrio yang utamanya ditujukan untuk ekspor walaupun juga untuk memenuhi permintaan domestik.

Ini babak baru industri perbenihan sapi di Indonesia. Sektor swasta mulai berminat menginvestasikan modal dan teknologi perbenihan di Indonesia, yang selama ini hanya ditangani pemerintah.

Penerapan IB Harus Dibenahi

Hampir semua semen yang diproduksi Balai Inseminasi Buatan milik pemerintah berasal dari sapi impor dan digunakan hanya untuk mengawinsilangkan sapi lokal agar menghasilkan sapi bertubuh besar dan produktivitas tinggi. Semen sapi lokal (misalnya sapi bali atau sapi madura) tidak diminati peternak sehingga produksinya tidak lebih dari 5 % dari total produksi semen secara nasional.

Masuknya investor swasta dalam industri pembenihan harus dijadikan awal pembenahan teknologi IB (Inseminasi Buatan) dalam rangka



mengembangkan usaha pembibitan ternak di Indonesia secara terarah dan terkendali. Ada tiga tujuan utama dengan tersedianya teknologi IB yaitu (1) Perbaikan mutu genetik ternak lokal; (2) Pembentukan bangsa (rumpun) baru ternak; dan (3) Peningkatan produktivitas ternak untuk menghasilkan daging dan susu.

Pertama, perbaikan mutu genetik ternak lokal dilakukan melalui seleksi. Sperma pejantan sapi lokal terpilih digunakan untuk meng-IB sapi betina lokal indukan unggul. Anak sapi yang dihasilkan diseleksi lagi dan seterusnya sehingga dalam jangka waktu tertentu mutu genetik sapi lokal dapat kembali ditingkatkan.

Karena usaha pembibitan memerlukan modal besar, pemerintah wajib memberikan insentif menarik bagi siapapun pengusaha yang ingin mengembangkan ternak lokal di Indonesia. Dengan adanya pengusaha bibit ternak sapi lokal, peternak sapi lokal berskala kecil juga semakin bergairah serta akan terjamin ketersediaan sapi lokal untuk di-IB dengan semen sapi impor.

Dalam konteks ini, teknologi IB tidak digunakan untuk persilangan. Ada persepsi keliru bahwa peng-IB-an sapi betina lokal dengan semen sapi impor sehingga anaknya menjadi sapi persilangan bertubuh besar dan cepat bertumbuh itu merupakan perbaikan mutu genetik ternak lokal. Persepsi ini harus diluruskan.

Kedua, pembentukan rumpun baru. Ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau pernah membuat kebijakan membentuk rumpun sapi brangus (persilangan antara sapi brahman dan sapi angus) karena menurut para ahli waktu itu, sapi persilangan ini cocok untuk kondisi Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Sekarang tidak ada lagi bekasnya karena tidak ada komitmen untuk mempertahankan dan mengembangkannya.

Ketiga, peningkatan produktivitas ternak. Saat ini IB digunakan ke arah peningkatan produktivitas ternak banyak. Semen impor di-IB-kan ke betina produktif bangsa apa saja tidak masalah, yang penting sapi hasil IB lebih besar atau lebih baik dari sapi lokal. Undang-Undang nomor 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah nomor 48/2011 tentang sumber daya genetik hewan dan

perbibitan ternak memberi peluang bagi swasta untuk berperan dalam mencapai tujuan ketiga ini.

Usaha Pembibitan Ternak Lokal

Kita perlu mengapresiasi para pengusaha *feedlot* (penggemukan sapi) yang telah berperan memproduksi daging untuk menopang kebutuhan nasional. Pada umumnya sapi diimpor dari Australia dan dipelihara sekitar tiga bulan, kemudian dipotong.

Ini jauh lebih baik daripada pengusaha importir daging karena kegiatan impor daging tidak memberikan banyak kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Namun, akan jauh lebih baik lagi dan sangat diapresiasi apabila para pengusaha *feedlot* mau melakukan usaha pembibitan atau setidaknya usaha pengembangbiakan ternak sapi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas dan reproduktivitas sapi lokal (misalnya sapi bali) sangat baik. Dipelihara dalam lingkungan apapun, sapi bali memiliki daya hidup tinggi dan kualitas dagingnya juga sangat disukai masyarakat. Jika ditangani secara serius dan profesional, sapi bali ini akan menghasilkan nilai ekonomi tinggi.

Namun, karena usaha pembibitan memerlukan modal besar, pemerintah wajib memberikan insentif menarik bagi siapapun pengusaha yang ingin mengembangkan ternak lokal di Indonesia. Dengan adanya perusahaan bibit ternak sapi lokal, peternak sapi lokal berskala kecil juga semakin bergairah serta akan terjamin ketersediaan sapi lokal untuk di-IB dengan semen sapi impor.

Jadi ada sinergi antara pengusaha bibit ternak lokal sebagai penghasil sapi betina lokal, perusahaan semen sapi benua genetik tinggi, dan peternak sapi persilangan. Tanpa peran swasta dalam usaha pembibitan, ternak sapi lokal akan terus terkikis. Pemerintah juga berkewajiban memberi insentif menarik bagi pengusaha yang berminat di usaha pembibitan ternak lokal.

Saatnya para investor menjadi patriot bangsa dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu ternak sapi lokal bagi pembangunan peternakan di Indonesia sehingga bangsa Indonesia mampu mandiri dan berdaulat pangan sumber protein hewani pencerdas bangsa. Semoga saja.■

April 2012

BET Cipelang : Pabrik Embrio di Lereng Gunung Salak

Seiring kemajuan di bidang teknologi reproduksi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian yang telah memiliki dua Balai Inseminasi Buatan masing-masing BIB Lembang Jawa Barat dan BBIB (Balai Besar IB) Singosari Jawa Timur, perlu membangun Balai Embrio Transfer (BET) di Cipelang Jawa Barat. Pendirian BET ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No.464/Kpts/OT.210/6/1994, *ruislag* dari Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Cisarua.

Di Cipelang, lokasi BET berada di lereng Gunung Salak. Ini dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu via jalan raya Ciawi–Sukabumi dan via Cipaku. Untuk kenyamanan mencapai ke lokasi BET, sangat tidak direkomendasikan melewati jalan raya Ciawi–Sukabumi. Selain padat kendaraan, sebagian besar jalannya rusak. Kasihan mobilnya dan yang jelas juga boros waktu karena hampir selalu terjebak macet.

Tentunya keberadaan BET Cipelang tidak hanya menjadi pabrik embrio tetapi sasaran yang lebih luas harus dapat dicapai yaitu peningkatan mutu genetik ternak, khususnya sapi, di Indonesia. Prinsip pemuliaan yang mengarah pada upaya pengembangan bibit ternak di Indonesia seharusnya menjadi acuan dalam pengembangan BET Cipelang ke depan.

Melalui Cipaku relatif cepat dan jalanan mulus walaupun di beberapa tempat ada kerusakan. Namun demikian, sekitar 5 km sebelum lokasi BET, jalan menuju ke sana rusak parah dan menanjak cukup tajam. Di sebelah kiri dan kanan jalan terhampar tanaman pangan atau hutan yang tampak tumbuh hijau. Hawa dingin pegunungan sangat terasa bila sudah mendekati lokasi tersebut.

Di lokasi BET Cipelang yang secara keseluruhan memiliki lahan seluas 90 hektar, kawasan yang tampak sepi dan terisolir di lereng gunung itu dilengkapi kantor utama, dua unit laboratorium, tujuh unit perkantoran, satu unit wisma tamu, 35 unit perumahan pegawai, gudang pa-

Introduksi Teknologi

kan, dan lain lain. Terhampar juga lahan untuk tanaman hijauan pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan 143 ekor sapi yang dipelihara. Dari sejumlah itu, 93 ekor adalah sapi donor embrio, 7 ekor penerima (resipien) embrio, 22 ekor bakalan, dan 21 ekor pedet.

Sejak berdirinya, BET Cipelang diberi tugas pokok dan melaksanakan fungsinya untuk memproduksi, mengembangkan dan menyebarkan embrio ternak. Pada prinsipnya, memproduksi embrio dapat ditempuh dengan dua cara yaitu *in vivo* dan *in vitro*.

Untuk cara *in vivo*, ternak (sapi) betina terpilih disuperovulasi sehingga tersedia cukup banyak sel telur (ovum) matang. Sapi ini kemudian di inseminasi buatan (IB) dengan semen dari pejantan terpilih juga. Pertemuan antara sel telur dan sperma (semen) menghasilkan embrio. Melalui teknik *flushing*, embrio diambil dari uterus sapi betina. Kemudian embrio ditampung dalam media khusus dan terakhir disaring sampai diperoleh embrio.

Untuk cara *in vitro*, teknik memproduksi embrio dimulai dari pengambilan *folikel* (bakal sel telur) sapi betina. *Folikel* ini kemudian dimatangkan dalam suatu media. Bila sudah matang, sel telur difertilisasi melalui teknik IVF (*in vitro fertilization*) dan terakhir ditumbuhkembangkan (*di-culture*). Embrio yang diproduksi tersebut selanjutnya dipindahkan ke sapi betina lainnya.

Dengan prinsip kerja seperti itu, embrio yang diproduksi harus ber-



asal dari ternak betina berkualitas genetik unggul dan jumlah embrio yang dihasilkan per ternak betina seyogyanya lebih dari satu. Melalui cara *in vivo*, rata-rata jumlah embrio yang diperoleh dari seekor sapi betina adalah delapan. Selanjutnya, masing-masing embrio dipindahkan ke ternak betina tidak berkualitas tetapi layak dan sanggup mengembangkan embrio tersebut di dalam rahimnya.

Untuk melaksanakan teknik memproduksi dan memindahkannya ke ternak lainnya, BET Cipelang tentu saja dilengkapi dengan berbagai fasilitas laboratorium yang cukup lengkap dan didukung oleh staf yang terampil dan menguasai teknik secara sangat baik. Kebanyakan dari mereka menempuh pelatihan di Jepang. Sampai saat ini, BET diperkuat oleh enam tenaga medik veteriner, 18 paramedik veteriner, dan 16 pengawas bibit ternak di bawah komando seorang Kepala Balai.

Dari data selama sepuluh tahun terakhir, produksi dan penyebaran embrio serta ternak yang dihasilkan disajikan pada Tabel berikut.

Tahun	Produksi embrio		Transfer ke		Pedet yang dihasilkan
	Sapi potong	Sapi perah	Sapi potong	Sapi perah	
94/95	319	81	194	20	24
95/96	740	35	186	3	44
96/97	1114	232	220	23	39
97/98	958	350	551	18	54
98/99	430	80	148	3	19
99/2000	665	167	241	4	32
2000	264	153	144	11	20
2001	226	67	266	8	36
2002	333	141	100	9	17
2003	351	126	82	14	41
2004	235	106	97	42	34
Jumlah	5.635	1.538	2.229	155	360

Dari tabel di atas terlihat bahwa 66,8% dari 5.635 embrio yang diperoleh secara *in vivo* dan *in vitro* dapat ditransfer ke sapi potong dan sapi perah. Dari jumlah embrio yang ditransfer pada sapi potong, 10% embrio terlahir menjadi pedet sedangkan pada sapi perah 16% embrio terlahir menjadi pedet. Persentase keberhasilan ini mungkin masih perlu ditingkatkan lagi agar penyebaran ternak bermutu genetik tinggi dapat lebih dipercepat.

Tentunya keberadaan BET Cipelang tidak hanya menjadi pabrik

Introduksi Teknologi

embrio tetapi sasaran yang lebih luas harus dapat dicapai yaitu peningkatan mutu genetik ternak, khususnya sapi, di Indonesia. Fasilitas yang ada di BET memang bukan untuk penelitian tetapi sudah difokuskan ke aplikasinya di lapangan.

Oleh karena itu, prinsip pemuliaan yang mengarah pada upaya pengembangan bibit ternak di Indonesia seharusnya menjadi acuan dalam pengembangan BET Cipelang ke depan. Ini akan dapat dicapai secara lebih cepat apabila ada sinergi dan kerjasama yang baik antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kendali direktorat Pembibitan seperti BPTU (Balai Pembibitan Ternak Unggul) dan BIB, serta pihak-pihak lainnya yang bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan sektor perbibitan di Indonesia. Tersedianya fasilitas pemerintah yang tentunya didukung dana cukup besar harus dimanfaatkan secara optimal.■

Maret 2006

Mandulisasi Sapi Lokal Jantan

Hasil observasi saya selama belasan tahun pada peternakan sapi pedaging di berbagai pelosok daerah se-Indonesia menunjukkan bahwa performa sapi lokal Indonesia semakin kecil dan berbeda semakin jauh dengan performa sapi silangan. Ini dikarenakan perkawinan sapi lokal tidak diatur dan tidak dikendalikan sebagaimana mestinya. Karena naluri, sapi jantan lokal telah dan akan selalu mengawini sapi betina manapun yang sedang birahi. Sapi jantan tersebut tidak tahu bahwa sapi betina itu adalah ibu kandungnya atau ibu tirinya atau kakak kandungnya atau kakak tirinya, atau temannya. Apalagi kalau pola pemeliharaan sapi diangon di padang penggembalaan atau di lahan perkebunan atau di kawasan hutan, maka perkawinan antar kerabat makin sering terjadi.

Peternak seringkali tidak menyadari bahwa perkawinan antar kerabat dekat dapat menurunkan produktivitas dan reproduktivitas sapi. Semakin dekat hubungan kekerabatan antara sapi jantan dan sapi betina yang dikawini, akan semakin buruk performa anak sapi yang dihasilkan. Hubungan kekerabatan dapat dihitung dan menghasilkan koefisien *inbreeding*. Teori pemuliaan ternak menyatakan bahwa adanya kenaikan 10 % koefisien *inbreeding* akan dapat menurunkan 3% performa anak sapi yang dihasilkan. Jadi, kalau perkawinan tak terkendali pada sapi lokal ini terus dibiarkan, performa sapi lokal kita akan semakin buruk dan terus memburuk.



Mandulisasi sapi lokal jantan perlu dilakukan di Indonesia untuk mencegah penurunan kualitas sapi lokal kita. Mandulisasi adalah kegiatan memandulkan sapi lokal jantan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Saya usulkan 90% sapi lokal jantan di Indonesia sebaiknya dimandulkan. Sisanya yang 10% diseleksi secara ketat untuk dijadikan pejantan pemacek. Hanya sapi pejantan terseleksi yang diberi tugas mengawini sapi betina birahi secara berkesinambungan dan terkontrol. Sapi jantan yang tidak terseleksi juga harus dimandulkan.

Tidak ada jalan lain. Mandulisasi sapi lokal jantan perlu dilakukan di Indonesia untuk mencegah penurunan kualitas sapi lokal kita. Mandulisasi adalah kegiatan memandulkan sapi lokal jantan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Saya usulkan 90% sapi lokal jantan di Indonesia sebaiknya dimandulkan. Sisanya yang 10% diseleksi secara ketat untuk dijadikan pejantan pemacek. Hanya sapi pejantan terseleksi yang diberi tugas mengawini sapi betina birahi secara berkesinambungan dan terkontrol. Sapi jantan yang tidak terseleksi juga harus dimandulkan.

Pemandulan merupakan operasi kecil dengan risiko kecil juga. Salah satunya adalah operasi memotong saluran *vas deferens*. Saluran ini merupakan jalan sperma dari testis ke ujung penisnya. Dengan terputusnya saluran ini, sperma tidak bisa dikeluarkan dari penis sehingga sapi jantan mandul tidak akan pernah bisa menghasilkan keturunan. Pemandulan idealnya dilakukan pada umur muda sekitar tiga bulan karena pada umur ini sapi mudah ditangani dan luka akibat operasi dapat segera disembuhkan.

Selain tidak dapat menghasilkan keturunan, banyak manfaat positif adanya pemandulan sapi jantan yaitu: **pertama**, perkawinan sapi antar kerabat dapat dihindari dan performa sapi lambat laun akan menjadi lebih baik. **Kedua**, perkawinan selanjutnya harus dilakukan dengan teknik inseminasi buatan (IB) sehingga identitas pejantan penghasil sperma dapat diketahui secara akurat. **Ketiga**, peternak harus belajar mende-teksi sapi betina birahi sehingga mereka tahu persis waktu yang tepat perkawinan sapi betina. Selama ini ada anggapan di komunitas peternak bahwa sapi betina dapat dikawinkan kapan saja. **Keempat**, catatan perkawinan sapi secara tertib menjadi keharusan untuk menghindari

kawin antar kerabat. **Kelima**, semua sapi betina menjadi akseptor IB. **Keenam**, program inseminasi buatan akan semakin efektif. **Ketujuh**, bobot badan sapi jantan pada umur potong menjadi lebih tinggi karena pertumbuhan sapi jantan mandul lebih cepat daripada pertumbuhan sapi jantan normal. **Kedelapan**, dalam jangka panjang mutu genetik sapi lokal secara gradual menjadi lebih baik. **Kesembilan**, pendapatan dan kesejahteraan peternak akan lebih baik karena harga jual sapi lebih baik mengingat performa sapi juga lebih baik.

Bagi pemerintah, dampak langsung yang diperoleh dengan gerakan mandulisasi ini adalah **pertama**, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Nasional maupun BIB Daerah akan berkembang semakin pesat. **Kedua**, populasi ternak sapi akan bertambah lebih cepat karena jarak beranak akan diperpendek akibat pelaksanaan IB yang terkontrol dan tercatat karena didukung oleh pemahaman peternak tentang IB yang semakin baik. **Ketiga**, program gertak birahi menjadi lebih efektif dan ini juga mempercepat penambahan populasi jika pelaksanaannya dilakukan secara profesional. **Keempat**, lambat laun program pemerintah untuk berswasembada daging sapi dapat tercapai.

Yang penting dicatat adalah pelaksanaan pemandulan sapi jantan di lapangan. Ini harus dilaksanakan melalui pendekatan *bottom-up* sehingga ada atau tidak ada program nasional bukan persoalan. Artinya, peternak harus didampingi, diajak diskusi, dan dipahami tentang makna pemandulan sapi jantan beserta manfaatnya. Para peternak pemilik sapi lokal jantan harus dibuat benar-benar mengerti sampai timbul kesadaran sendiri untuk memandulkan sapinya. Dalam rangka pendampingan, materi yang diberikan tidak hanya perihal pemandulan tetapi berbagai aspek teknis dan nonteknis lainnya. Proses pembelajaran ini sangat penting sehingga dalam waktu yang panjang akan terlahir generasi peternak cerdas walaupun pendidikan formalnya tidak harus berkualifikasi sarjana.■

April 2015

Tata Niaga Ternak

Deregulasi di Bidang PKH

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatannya, serta melayani kebutuhan masyarakat banyak, pemerintahan Jokowi–JK telah melakukan deregulasi dari aturan yang sudah ada termasuk sektor peternakan dan kesehatan hewan. Semangat deregulasi adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri dan usaha peternakan dan kesehatan hewan.

Ada beberapa aturan yang telah dipermudah di bidang impor sapi indukan dari Australia. Dengan adanya perubahan di protokol kesehatan hewan dalam importasi sapi indukan tersebut, ada pemangkasan biaya sebesar USD 170 (seratus tujuh puluh dolar Amerika Serikat) per ekor sapi. Jika ada pengadaan 10 ribu ekor sapi indukan, dengan aturan baru akan ada penghematan sekitar Rp 22 miliar (dengan asumsi 1 USD setara Rp 13.000). Dana itu dapat digunakan untuk menambah pembelian 1.000 ekor sapi indukan lagi.

Dipastikan bahwa deregulasi ini tidak merugikan siapapun dan tidak ada risiko besar yang diakibatkan. Justru sebaliknya keduanya akan memacu kegiatan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Melalui deregulasi ini membuat para pengusaha lebih semangat memenuhi ajakan pemerintah untuk mengembangbiakkan sapi di Indonesia dalam rangka memproduksi sapi bakalan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan impor dari negara lain. Untuk lebih mendorong para pengusaha melakukan pembiakan sapi sendiri, pemerintah juga telah mengusulkan agar tidak ada bea masuk pemasukan sapi indukan yang tadinya dikenakan 5% per ekor.

Dipastikan bahwa deregulasi ini tidak merugikan siapapun dan tidak ada risiko besar yang diakibatkan. Justru sebaliknya keduanya akan memacu kegiatan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Deregulasi itu penting supaya semua biaya *input* di bidang peternakan dan kesehatan hewan bisa ditekan, daya saing bisa ditingkatkan

sehingga dalam pasar global pelaku usaha dapat menembus pasar internasional karena produknya dapat dijual lebih murah di negara lain. Bisnis peternakan dan kesehatan hewan kita jangan berkutat di dalam negeri saja. Ini untuk mengantisipasi jenuhnya pasar dalam negeri yang semakin banyak diserbu produk asing dalam percaturan perdagangan internasional.

Sedikitnya sudah belasan kedutaan besar negara sahabat telah menemui saya dengan tujuan untuk menjual produk negaranya ke Indonesia. Kita harus balik mendatangi negara mereka untuk jualan produk peternakan dan kesehatan hewan dari Indonesia juga.

Dalam upaya berkompetisi di pasar global, pemerintah juga akan mempermudah atau memberi insentif bagi pelaku usaha yang produknya menembus pasar internasional. Aturan mengekspor sudah seharusnya lebih mudah daripada aturan mengimpor produk. Bukan sebaliknya, yang sampai saat ini masih dirasakan oleh beberapa perusahaan yang memerlukan izin ekspor.

Namun yang lebih penting lagi, kolaborasi antar negara dalam menjalankan bisnis peternakan dan kesehatan hewan perlu didorong lebih kuat dalam rangka menggerakkan ekonomi di negara yang saling bermitra. Kolaborasi yang lebih kondusif merupakan keniscayaan dalam kerangka bisnis global akibat kemajuan teknologi informasi yang membuat tak ada lagi sekat geografis.

Sebagai contoh pada komoditas sapi. Negara Australia dan Indo-



Deregulasi itu penting supaya semua biaya input di bidang peternakan dan kesehatan hewan bisa ditekan, daya saing bisa ditingkatkan sehingga dalam pasar global pelaku usaha dapat menembus pasar internasional karena produknya dapat dijual lebih murah di negara lain.

nesia yang bertetangga dekat secara geografis sangat berpotensi untuk berkolaborasi secara komprehensif dari hulu ke hilir sampai ke pemasarannya. Australia sebagai sumber ternak lebih efisien jika berorientasi pada pembiakan saja sedangkan Indonesia dengan ketersediaan banyak limbah pertanian dan dan perkebunan lebih tepat jika berorientasi pada usaha penggemukan.

Industri rumah potong hewan modern bertaraf internasional dapat dibangun di Indonesia yang kemudian dapat memasarkan dagingnya ke negara lain. Karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan halal menjadi salah satu kriteria produknya, pasar daging sapi dapat diarahkan ke banyak negara Islam di Timur Tengah atau negara lainnya. Negara lain pun, sepanjang memiliki nilai ekonomis strategis, bisa bermitra dengan Indonesia untuk tujuan serupa.

Kolaborasi strategis ini tidak harus meninggalkan peternak kecil yang rata-rata memiliki tiga ekor sapi. Mereka dapat dan harus dilibatkan dalam kemitraan antar negara tersebut melalui peningkatan kemampuan, profesionalitas, dan daya saingnya. Dalam kerangka ini pula, pendekatan baru pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang di dalamnya terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (SPR&SPR) diterapkan pada tahun anggaran 2016 ini.

Para peternak di SPR yang telah dibina secara terus menerus selama maksimal empat tahun dikembangkan untuk membentuk perusahaan kolektif berjamaah berbasis koperasi. Perusahaan kolektif yang telah terstandardisasi dapat dilibatkan dalam kolaborasi bisnis antar negara tersebut. Mereka dapat menjadi pemasok sapi, pakan, pelaku penggemukan, dan lain sebagainya.

Artinya, sinergi antara investor besar bertaraf global dan perusahaan kolektif berbasis kearifan lokal diharapkan akan dapat mengubah wajah pedesaan di Indonesia saat ini menjadi sumber kekuatan ekonomi baru dari pinggir yang berdampak pada de-urbanisasi maupun de-eks-

porisasi tenaga tak terampil ke luar negeri. Semoga ini bukan mimpi tapi pemikiran yang dapat segera dapat direalisasikan. Aamiin.■

Januari 2016

Mencermati Kisruh Daging Sapi

Harga daging sapi masih sangat tinggi. Kementerian Koordinator Perkonomian khawatir harga itu akan memicu inflasi. Akhirnya Kementerian Perdagangan diminta untuk mengimpor daging sapi dan sapi siap potong untuk menurunkan harga daging sapi.

Untuk itu, Bulog ditugasi mengimpor bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tersebut khususnya dalam menyambut hari-hari besar keagamaan tahun ini. Kebijakan terobosan yang bersifat sementara itu terpaksa diambil pemerintah karena stok sapi tak mencukupi.

Namun demikian, harga daging masih tetap sangat tinggi walaupun stok daging dan bahan baku daging sapi telah diimpor dan tersedia melimpah. Aneh dan membuat saya menjadi agak ragu tentang informasi adanya penurunan jumlah sapi sebesar 19% sebagaimana dirilis harian Kompas 17 Juli 2013 lalu. Atau ada penyebab lain lagi di balik itu semua ?.

Kondisi ini sangat membingungkan dan ada sesuatu yang terjadi secara tidak normal yaitu tidak berjalannya hukum ekonomi. Pasokan melimpah tetapi harga tetap tinggi. Malah berbagai pihak bertanya-tanya, dimana sapi siap potong dan daging sapi yang diimpor Bulog ?

Ada beberapa kemungkinan penyebab “tidak berjalannya” hukum ekonomi tersebut. **Pertama**, niat baik pemerintah untuk menurunkan harga daging melalui impor daging dan sapi siap potong via Bulog “dipelintir” oleh oknum tak bertanggung jawab. Bisa saja, oknum ini



berkolaborasi dengan pelaku usaha sehingga ikut menikmati keuntungan dari harga daging tinggi.

Kedua, para pelaku usaha (khususnya importir) “melawan” niat baik pemerintah ini karena kebijakan impor bahan pangan tersebut diserahkan kepada Bulog dan bukan kepada importir. Mereka merapatkan barisan untuk secara kompak membuat harga daging tetap tinggi dengan berbagai cara melalui jaringan perdagangannya.

Ketiga, masyarakat sebenarnya tetap menyukai ternak sapi lokal daripada sapi impor karena banyak berkembang isu bahwa sapi impor diberi hormon yang dagingnya tidak baik untuk dikonsumsi. Apakah isu hormon juga merupakan salah satu bentuk perang urat syaraf?

Saatnya kita mengedepankan profesionalitas masing-masing. Pemerintah sebaiknya tetap sebagai regulator dan jangan menjadi aktor. Biarkan pelaku usaha (dalam hal ini importir) yang bertindak sebagai aktor. Yang terpenting ada transparansi diantara keduanya. Jika semua bertindak profesional, mestinya semua akan jelas dan gamblang. Masyarakat juga tidak dibuat bingung.

Sampai kapanpun impor daging dan sapi bakalan akan selalu ada karena memang ada segmen pasarnya. Ini tidak perlu dipermasalahkan sepanjang tidak mengganggu usaha peternak sapi berskala kecil di Indonesia. Yang perlu menjadi perhatian para pengambil keputusan di Jakarta adalah mengelola, mendampingi, dan mencerdaskan para peternak lokal yang jumlahnya sekitar 6,5 juta.

Sampai kapanpun impor daging dan sapi bakalan akan selalu ada karena memang ada segmen pasarnya. Ini tidak perlu dipermasalahkan sepanjang tidak mengganggu usaha peternak sapi berskala kecil di Indonesia. Yang perlu menjadi perhatian para pengambil keputusan di Jakarta adalah mengelola, mendampingi, dan mencerdaskan para peternak lokal yang jumlahnya sekitar 6,5 juta.

Peternak kecil harus dijadikan mitra strategis bagi pemerintah karena mereka itu benar-benar peternak yang menyediakan salah satu bahan pangan bangsa Indonesia. Mereka jangan dianggap sebagai objek pembangunan yang perlu dikasihani untuk diberdayakan. Mereka

harus diajari menjadi subjek yang ikut membangun peternakan bersama pemerintah.

Oleh karena itu, pendekatan dalam memberdayakan peternak berskala kecil harus diubah strateginya. Pendekatan yang selama ini dilakukan adalah membentuk kelompok baru dengan pengadaan ternak dan berbagai sarannya. Ini rawan penyelewengan mulai dari pemilihan kelompok sampai implementasi kegiatan.

Seharusnya kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas peternak yang sudah ada melalui berbagai pelatihan dan pendampingan serta dilakukan secara berkelanjutan. Bukan proyek setahunan yang terkesan hanya buang-buang uang tanpa ada perubahan pola pikir dan perilaku peternak, yang hanya selalu ingin memperoleh bantuan.■

September 2013

Bersama Tingkatkan Kampanye Produk Peternakan

Pemerintah saat ini sedang menata industri perunggasan nasional yang dimulai dengan pendataan populasi bibit ayam secara akurat. Semua hasil pendataan akan menjadi acuan bersama pemerintah dan pelaku industri peternakan dan kesehatan hewan, yang selanjutnya akses data akan dipermudah melalui penerbitan *e-poultry*. Penggunaan *e-poultry* dimaksudkan agar semua pelaku industri perunggasan secara transparan mengetahui perkembangan bisnis perunggasan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, ke depan, peran asosiasi dan/atau perhimpunan bidang peternakan dan kesehatan hewan diperkuat agar dapat menjadi mitra pemerintah yang efektif. Satu asosiasi hanya dapat didirikan untuk satu komoditas ternak atau untuk satu kegiatan bisnis saja. Sebagai contoh, hanya ada satu asosiasi perusahaan peternakan ayam pedaging dan hanya ada satu asosiasi perusahaan peternakan ayam petelur. Contoh lainnya, hanya ada satu asosiasi perusahaan pembiakan sapi pedaging, dan lain-lain.

Jika telah terbentuk hanya satu asosiasi setiap komoditas ternak,



Kampanye gizi diharapkan dapat menyadarkan kalangan bawah dan seluruh lapisan masyarakat tentang arti penting mengonsumsi berbagai produk peternakan sebagai sumber protein pencerdas anak bangsa. Melalui berbagai pameran peternakan yang banyak digelar di Indonesia bisa menjadi ajang untuk melakukan promosi berbagai produk peternakan sekaligus tempat mencari masukan untuk perbaikan dalam penyajiannya.

maka pemerintah hanya akan mengakui dan memfasilitasi perusahaan yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Perusahaan yang tidak bergabung dalam asosiasi tidak akan dilayani oleh pemerintah. Ini merupakan bentuk kemitraan yang bertujuan agar industri peternakan di Indonesia semakin kondusif dan sasaran pemerintah dalam membina perusahaan peternakan sangat jelas.

Kemitraan pemerintah dan asosiasi tidak hanya terbatas pada penerapan industri peternakan saja tetapi juga harus mampu mempercepat pertumbuhan industri tersebut sehingga semua perusahaan peternakan terus berkembang dan keuntungan yang diperolehnya juga terus membesar. Salah satunya melalui kampanye gizi untuk mendorong peningkatan konsumsi daging, susu, dan telur.

Kampanye gizi diharapkan dapat menyadarkan kalangan bawah dan seluruh lapisan masyarakat tentang arti penting mengonsumsi berbagai produk peternakan sebagai sumber protein pencerdas anak bangsa. Isu meresahkan seperti bisulan yang diakibatkan banyak mengonsumsi telur atau mencret sebagai akibat terlalu banyak minum susu harus dinetralisir melalui kampanye tersebut.

Disisi lain, kita harus sering juga mempromosikan dan memasarkan produk peternakan di luar negeri melalui berbagai cara yang bersifat proaktif, misalnya selalu mengikuti pameran bertaraf internasional, mengunjungi negara sasaran ekspor dan lain sebagainya. Kegiatan promosi seperti ini harus secara rutin dilakukan sambil mengumpulkan informasi tentang perkembangan industri peternakan di negara lain dan tentang potensi pasarnya bagi produk Indonesia. Ini tentu saja memerlukan dana yang tidak kecil jika dilakukan secara terus menerus.

Check off system yang telah diwacanakan selama sepuluh tahun

terakhir ini perlu segera dilaksanakan dan peran asosiasi akan menjadi sangat vital. Melalui kesepakatan semua perusahaan peternakan yang tergabung dalam asosiasi, setiap perusahaan bisa saja diminta berkontribusi sehingga terakumulasi banyak dana di setiap asosiasi peternakan. Ini bisa terjadi jika asosiasi diberi kekuatan lebih besar dalam menata industri peternakan.

Penyadaran ke Produsen

Tidak hanya penyadaran kepada konsumen akan pentingnya mengonsumsi daging ayam dan telur tetapi harus diimbangi juga dengan penyadaran kepada produsen selaku pelaku perunggasan nasional karena tingkat keragamannya tinggi mulai dari pelaku usaha perunggasan yang masih sangat tradisional sampai modern. Pelaku usaha perunggasan yang sangat tradisional sampai yang belum modern ini harus terus diedukasi. Contohnya bagaimana membuat kandang yang strukturnya menganut sanitasi dan higienis termasuk dalam mengelola limbahnya.

Untuk di hilir perunggasan juga sangat disayangkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas masih belum berjalan dengan efektif. Tidak hanya itu, tampilan beragam produk hasil peternakan yang masih jauh dari sempurna perlu terus diperbaiki untuk lebih menarik minat pembeli atau konsumen. Melalui berbagai pameran peternakan yang banyak digelar di Indonesia bisa menjadi ajang untuk melakukan promosi berbagai produk peternakan sekaligus tempat mencari masukan untuk perbaikan dalam penyajiannya.

Melalui kampanye dan promosi berbagai produk peternakan termasuk perunggasan yang didalamnya ada daging ayam dan telur diharapkan dapat berdampak positif yaitu; **pertama**, masyarakat Indonesia lebih cerdas karena mendapat asupan makanan berkualitas dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi sehingga bisa menolak penyakit.

Kedua, perekonomian tumbuh akibat *multiplier effect* (efek berganda) jika industri perunggasan maju. **Ketiga**, jika industri perunggasan maju maka lapangan pekerjaan luas, tingkat pengangguran turun, dan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik karena banyak lapangan pekerjaan baru. **Keempat**, usaha perunggasan termasuk usaha peternakan lainnya yang kebanyakan berada di daerah pedesaan membuat kegiatan ekonomi lebih banyak di desa dengan demikian bisa mengurangi urbanisasi karena kegiatan produksi peternakan di desa menjanjikan. **Kelima**,

Tata Niaga Ternak

dengan kondisi seperti di atas maka cita-cita Pendiri Bangsa agar masyarakat Indonesia adil dan makmur bisa tercapai.■

Oktober 2015

Kapan Tak Lagi Impor Daging Sapi?

Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akhirnya tak kuasa juga menahan kesabarannya di bulan puasa gara-gara harga daging sapi tetap tinggi yaitu di angka Rp 100.000 per kg (Kompas, 14 Juli 2013). Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, harga yang wajar di pasaran adalah Rp 75.000 per kg. Kalau melihat angka seperti ini, tindakan jangka pendek yang harus dilakukan adalah impor daging beku supaya harga dapat distabilkan. Masalahnya dari tahun ke tahun, solusinya selalu impor dan impor lagi. Sampai kapan cara jalan pintas melalui impor ini digunakan setiap kali ada kenaikan harga daging sapi di pasaran?

Kasus Fathonah yang menyeret Presiden PKS Lutfi Hasan Ismail telah membuka mata kita semua bahwa ternyata keuntungan impor daging dari luar negeri (mayoritas dari Australia) sangat menggiurkan. Siapapun akan tertarik menjadi importir daging karena barangnya mudah didapat, hitungannya gampang, dan pendapatannya luar biasa banyak. Tidak heran jika isu kenaikan harga daging sapi yang tak kunjung turun menjadi berita amat sangat menggembirakan bagi para importir, siapapun importirnya.

Sumber dari www.indexmundi.com menyebutkan bahwa harga daging sapi di Australia pada Juni 2013 sekitar Rp 37.830 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) per kg. Harga ini lebih rendah dari harga pada Desember 2012 yang sekitar Rp 42.195 per kg. Jika daging itu dijual di Indonesia dengan harga seperti saat ini (yaitu Rp 100.000 per kg), maka sudah sangat jelas untungnya. Anggap saja, harga daging sapi sampai di Indonesia sebesar Rp 50.000 per kg, maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50.000 per kg. Jika impor 1.000 ton saja, untungnya sudah mencapai Rp 50 miliar. Siapapun akan tertarik mendapat kuota impor daging sebanyak-banyaknya!

Supaya adil danimbang, mestinya yang dimarahi jangan hanya para menterinya yang sudah bekerja membantu Presiden untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak kecil yang mendominasi kepemilikan 98% ternak sapi lokal di Indonesia. Saat ini para peternak semangat beternak dan ingin terus beternak karena secara ekonomis menguntungkan. Namun demikian, dengan harga daging yang terlalu tinggi, sebenarnya para peternak juga kurang nyaman karena mereka khawatir kalau tidak dapat membeli lagi sapi untuk dipelihara jika harga sapi ikut membumbung naik. Oleh karena itu, presiden perlu

Peraturan menteri tentang pemasukan betina produktif seyogyanya perlu segera diterbitkan. Bagaimanapun memasukkan sapi betina produktif dari luar negeri memberi manfaat lebih besar daripada impor sapi bakalan dan memberi manfaat jauh lebih besar lagi daripada impor daging beku.

mengingatkan para importir daging beku juga agar margin keuntungan yang diperoleh jangan terlalu lebar. Benar kata Menko Perekonomian bahwa harga yang wajar adalah Rp 75.000 per kg. Peternak juga masih merasa nyaman dengan harga daging seperti itu.

Dengan kata lain, harus ada ketegasan dari pemerintah yang memegang kunci keran impor daging sapi. Jika memang impor daging sapi merupakan solusi jangka pendek saat ini untuk mengendalikan harga daging sapi, maka harga harus dapat diturunkan sampai Rp 75.000 per kg karena keuntungan importir masih di atas 30% berdasarkan informasi harga di atas. Jika harga daging sapi tidak mencapai angka tersebut, pemerintah juga harus memberi sanksi kepada para importir. Apalagi jika yang diberi izin impor adalah Bulog, maka harga harus dapat diturunkan ke angka Rp 75.000 per kg. Kalau harga tidak bisa diturunkan, perlu dipertanyakan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan daging dengan harga terjangkau dan membantu peternak agar tetap terus beternak.

Melihat perkembangan saat ini, memang kita jangan lagi terpaku untuk hanya mengimpor 10% daging sapi pada 2014. Yang lebih penting adalah bahwa peternak kecil berpendapatan layak dan harga daging tidak lebih dari Rp 75.000 per kg. Jika harga daging tidak bisa turun, lebih baik pemerintah mengikuti cara salah satu anggota DPR RI yang pernah menghimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi jengkol ketika harga jengkol mencapai Rp 60.000 per kg. Pemerintah perlu menghimbau masyarakat juga untuk istirahat makan daging sapi dan beralih ke daging lainnya sampai harganya turun.

Dalam jangka panjang, kita perlu membuat presiden tidak marah lagi karena keprihatinan terhadap masalah harga daging sapi. Kalau semua berpikir jernih dan tidak berpikir egois, mestinya semua pihak dapat bersama membangun peternakan sapi di Indonesia secara lebih baik lagi. Saatnya membenahi usaha peternakan sapi di dalam negeri dengan cara yang lebih cerdas; dan ini bukan tugas menteri pertanian saja.

Bagi pemerintah, saatnya untuk fokus memberdayakan dan mencerdaskan peternak kecil dalam memelihara ternaknya secara lebih baik dan profesional. Mereka perlu diajari bisnis yang benar dan punya posisi tawar yang lebih baik. Satu-satunya cara adalah menghimpun peternak untuk berbisnis bersama dalam satu manajemen. Mereka harus berhimpun karena mereka tidak sanggup meningkatkan jumlah ternak yang dipelihara karena berbagai keterbatasan. Saya usulkan dalam satu himpunan peternak di suatu wilayah minimal terdapat seribu ekor betina indukan. Selanjutnya pemerintah memfasilitasi berbagai kebutuhan ternak yang sudah dimiliki peternak itu khususnya yang memerlukan perbaikan pakan, pemberian suplemen, pemberian vaksin, dan peningkatan kemampuan reproduksinya. Hasil survei IPB (Institut Pertanian Bogor) menunjukkan bahwa hanya 15% sapi yang memiliki kondisi tubuh yang baik. Sisanya sedang dan kurus.

Dalam melakukan “bisnis bersama satu manajemen”, peternak harus bersepakat untuk tidak lagi mengambil keputusan sendiri apakah ternaknya dijual atau tidak. Mereka harus sepakat pula bahwa ternak berkualitas baik dipertahankan, ternak berkualitas kurang baik dapat dijual. Harga jual sapi juga ditentukan bersama. Membuat agar beternak mau berhimpun dan melakukan bisnis bersama ini memang tidak mudah tetapi ini merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan. Pemerin-



tah harus memfasilitasinya melalui pendampingan sampai mereka benar-benar dapat mandiri. Dengan berhimpun, pemerintah juga mengetahui secara akurat, ternak mana yang perlu penanganan lebih intensif daripada ternak lainnya. Pelan tapi pasti, produktivitas ternak sapi akan meningkat dan dalam jangka panjang kualitas sapi milik peternak akan lebih baik.

Jika peternak yang rata-rata punya 2-3 ekor sapi berbisnis sendiri-sendiri seperti saat ini, mereka yang memiliki banyak keterbatasan sering diperdaya

Kepastian berusaha dan jaminan untuk dapat mengusahakan ternak secara integratif amat sangat dibutuhkan oleh para pengusaha yang ingin menginvestasikan uangnya membuka usaha pembiakan ternak di lahan perkebunan. Masih cukup banyak para pengusaha idealis yang ingin membangun peternakan di Indonesia dan ingin tidak tergantung lagi pasokan sapi bakalan dan daging dari Australia.

oleh para pedagang. Upaya meningkatkan produktivitas ternak dan peternaknya melalui “bisnis bersama dalam satu manajemen” ini diprioritaskan khususnya untuk peternak yang tinggal di daerah pemukiman padat penduduk dan padat sapinya juga; serta di daerah yang menjadikan usaha beternak sapi sebagai adat istiadat penduduknya. Jadi bukan membentuk himpunan peternak, kemudian membelikan 1.000 sapi untuk himpunan baru itu, tetapi “mendandani” kinerja peternak dan ternaknya yang sudah ada dan mau berhimpun.

Untuk daerah yang memiliki banyak padang penggembalaan dan jutaan hektar lahan perkebunan, maka yang perlu digalakkan adalah usaha pembiakan sapi. Dengan cara penggembalaan seperti itu biaya pemeliharaan sapi dapat ditekan. Di lokasi seperti itu, sapi yang dikembangkan sebaiknya sapi betina produktif impor karena kalau mengandalkan sapi betina produktif dari dalam negeri, jumlah tidak mencukupi saat ini. Usaha pembiakan secara ekstensif seperti ini juga lebih tepat diperuntukkan bagi perusahaan besar atau koperasi, sepanjang lembaga usaha itu telah profesional dalam dunia usaha ini.

Untuk menjamin agar sapi betina produktif benar-benar dikembangkan oleh perusahaan atau koperasi maka pemantauan secara periodik perlu dilakukan oleh pihak ketiga agar diperoleh hasil yang objektif dan kredibel. Oleh karena itu, peraturan menteri tentang pemasukan betina produktif seyogyanya perlu segera diterbitkan. Bagaimanapun memasukkan sapi betina produktif dari luar negeri memberi manfaat lebih besar daripada impor sapi bakalan dan memberi manfaat jauh lebih besar lagi daripada impor daging beku.

Potensi lahan perkebunan digunakan untuk usaha integrasi dengan sapi juga sangat besar. Sapi dapat memanfaatkan rumput dan tumbuhan yang tersedia di lahan perkebunan, sedangkan lahan perkebunan memperoleh feses sapi untuk memperbaiki kesuburan tanahnya. Sapi

juga dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut hasil perkebunannya. Cerita sukses tentang simbiosis mutualisme ini terjadi di beberapa perkebunan di Sumatera. Bahkan di Malaysia, integrasi semacam ini telah dilaksanakan sejak tiga puluh tahun lalu.

Yang menjadi kendala adalah masih ada resistensi dari pemilik atau penguasa perkebunan untuk melakukan usaha integrasi dengan sapi. Berbagai alasan dimunculkan yang intinya tidak dapat menerima keberadaan sapi di lahan perkebunan. Kendala besar lainnya adalah perihal perizinan. Ketika ingin minta izin untuk membuka usaha peternakan sapi di lahan perkebunan, hal itu akan sulit diimplementasikan karena secara legal formal kawasan perkebunan bukan untuk usaha peternakan. Oleh karena itu, kepastian berusaha dan jaminan untuk dapat mengusahakan ternak secara integratif amat sangat dibutuhkan oleh para pengusaha yang ingin menginvestasikan uangnya membuka usaha pembiakan ternak di lahan perkebunan. Masih cukup banyak para pengusaha idealis yang ingin membangun peternakan di Indonesia dan ingin tidak tergantung lagi pasokan sapi bakalan dan daging dari Australia.■

Juli 2013

Daging Sapi

Harga daging sapi masih sangat tinggi. Kementerian Koordinator Perkonomian khawatir harga itu akan memicu inflasi. Akhirnya Kementerian Perdagangan diminta untuk mengimpor daging sapi dan sapi siap potong untuk menurunkan harga daging sapi tersebut. Untuk itu, BULOG ditugasi mengimpor bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tersebut khususnya dalam menyambut hari-hari besar keagamaan tahun ini. Kebijakan terobosan yang bersifat sementara itu terpaksa diambil pemerintah karena stok sapi tak mencukupi.

Namun demikian, harga daging masih tetap sangat tinggi walaupun stok daging dan bahan baku daging sapi telah diimpor dan tersedia melimpah. Aneh dan membuat saya menjadi agak ragu tentang informasi adanya penurunan jumlah sapi sebesar 19% sebagaimana dirilis harian KOMPAS pada 17 Juli 2013 lalu. Atau ada penyebab lain lagi di balik itu semua?

Itu sangat membingungkan dan ada sesuatu yang terjadi secara tidak normal yaitu tidak berjalannya hukum ekonomi. Pasokan melimpah tetapi harga tetap tinggi. Malah berbagai pihak bertanya-tanya, dimana sapi siap potong dan daging sapi yang diimpor BULOG? Ada beberapa kemungkinan penyebab “tidak berjalannya” hukum ekonomi tersebut.

Pertama, niat baik pemerintah untuk menurunkan harga daging melalui impor daging dan sapi siap potong via BULOG “diplintir” oleh



Peternak kecil tersebut harus dijadikan mitra strategis bagi pemerintah karena mereka itu benar-benar peternak yang menyediakan salah satu bahan pangan bangsa Indonesia. Mereka jangan dianggap sebagai objek pembangunan yang perlu dikasihani untuk diberdayakan. Mereka harus diajari menjadi subjek yang ikut membangun peternakan bersama pemerintah.

oknum tak bertanggungjawab. Bisa saja, oknum ini berkolaborasi dengan pelaku usaha sehingga ikut menikmati keuntungan dari harga daging tinggi.

Kedua, para pelaku usaha (khususnya importir) “melawan” niat baik pemerintah tersebut karena kebijakan impor bahan pangan itu diserahkan kepada BULOG dan bukan kepada importir. Mereka merapatkan barisan untuk secara kompak membuat harga daging tetap tinggi dengan berbagai cara melalui jaringan perdagangannya.

Ketiga, masyarakat sebenarnya tetap menyukai ternak sapi lokal daripada sapi impor karena banyak berkembang isu bahwa sapi impor diberi hormon yang dagingnya tidak baik untuk dikonsumsi. Apakah isu hormon juga merupakan bentuk perang urat syaraf tersebut tidak ada yang benar.

Saatnya kita mengedepankan profesionalitas masing-masing. Pemerintah sebaiknya tetap sebagai regulator dan jangan menjadi aktor. Biarkan pelaku usaha (dalam hal ini importir) yang bertindak sebagai aktor. Yang terpenting ada transparansi diantara keduanya. Jika semua bertindak profesional, mestinya semua akan jelas dan gamblang. Masyarakat juga tidak dibuat bingung.

Sampai kapanpun impor daging dan sapi bakalan akan selalu ada karena memang ada segmen pasarnya. Ini tidak perlu dipermasalahkan sepanjang tidak mengganggu usaha peternak sapi berskala kecil di Indonesia. Yang perlu menjadi perhatian para pengambil keputusan di Jakarta adalah mengelola, mendampingi, dan mencerdaskan para peternak lokal yang jumlahnya sekitar 6,5 juta.

Peternak kecil tersebut harus dijadikan mitra strategis bagi pemerintah karena mereka itu benar-benar peternak yang menyediakan salah satu bahan pangan bangsa Indonesia. Mereka jangan dianggap sebagai objek pembangunan yang perlu dikasihani untuk diberdayakan. Mereka

harus diajari menjadi subjek yang ikut membangun peternakan bersama pemerintah.

Oleh karena itu, pendekatan dalam memberdayakan peternak berskala kecil harus diubah strateginya. Pendekatan yang selama ini dilakukan adalah membentuk kelompok baru dengan pengadaan ternak dan berbagai sarannya. Ini rawan penyelewengan mulai dari pemilihan kelompok sampai implementasi kegiatan. Seharusnya kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas peternak yang sudah ada melalui berbagai pelatihan dan pendampingan serta dilakukan secara berkelanjutan. Bukan proyek setahunan yang terkesan hanya buang-buang uang tanpa ada perubahan pola pikir dan perilaku peternak, yang hanya selalu ingin memperoleh bantuan, bantuan, dan bantuan.■

September 2013

Permasalahan Kecukupan Protein Hewani dan Solusinya

Pendahuluan

Bahan pangan sumber protein asal ternak meliputi daging, susu, dan telur. Komoditas daging, dipenuhi mayoritas dari sapi pedaging, kerbau, domba, kambing, dan unggas pedaging. Komoditas susu dipenuhi mayoritas dari sapi perah dan sedikit dari kambing perah. Komoditas telur mayoritas dipenuhi dari unggas petelur termasuk ayam petelur, itik, dan puyuh. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 240.000.000 jiwa dan kondisi sosial ekonomi saat ini, jumlah konsumsi daging di Indonesia mencapai 1.226,4 ton, susu 37.440 ton, dan telur 1.704.000 ton pada 2011 (olahan dari halaman 112 buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan). Dari data populasi ternak yang dipublikasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, jumlah ternak penghasil bahan pangan tersebut pada periode 2008 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi Berbagai Ternak Penghasil Bahan Pangan Protein Hewani (Dalam 000 Ekor)

No	Jenis Ternak	2008	2009	2010	2011
1	Sapi pedaging	12.257	12.760	13.582	14.824
2	Kerbau	1.931	1.933	2.000	1.305
3	Kambing	15.147	15.815	16.620	16.946
4	Domba	9.605	10.199	10.725	11.791
5	Babi	6.838	6.975	7.477	7.525
6	Ayam pedaging	902.052	1.026.379	986.872	1.177.991
7	Sapi perah	458	475	488	597
8	Kuda	393	399	419	409
9	Ayam petelur	107.955	111.418	105.210	124.636
10	Ayam lokal Indonesia	243.423	249.963	257.544	264.340
11	Itik	39.840	40.676	44.302	43.488
12	Puyuh	6.683	7.543	7.054	7.357

Populasi ternak tersebut dapat memproduksi daging, susu, dan telur di Indonesia dalam periode 2008 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi Daging, Susu, dan Telur Secara Nasional (Dalam 000 Ton)

No	Jenis Komoditas	2008	2009	2010	2011
1	Daging (semua ternak)	2.136,6	2.204,9	2.366,2	2.554,2
2	Susu (ternak perah)	647,0	827,2	909,5	974,7
3	Telur (unggas)	1.323,6	1.306,9	1.366,2	1.456,3

Jika kita sandingkan angka permintaan dan ketersediaan, maka bangsa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan daging putih yang berasal dari ayam dan babi saja. Untuk daging merah (sapi), telur dari ayam ras petelur maupun unggas lainnya serta susu masih belum dapat dipenuhi seluruhnya. Daging sapi masih diimpor sebanyak 10–20% dari total kebutuhan, susu masih diimpor sebesar 70–80% dari total kebutuhan.

Industri Peternakan di Indonesia

Perkembangan industri peternakan khususnya perunggasan di Indonesia sangat pesat. Industri ini mulai dari hulu sampai hilir yang meliputi usaha pembibitan, peralatan, pakan, obat-obatan, budidaya, pemotongan, pengolahan, dan penyimpanan. Aktivitas di industri melibatkan puluhan juta tenaga kerja dan triliunan rupiah hingga saat ini. Diantara banyak industri tersebut, industri hulu dan hilir memerlukan teknologi dan permodalan besar sehingga juga menumbuhkan ekonomi. Ini berbeda dengan industri di sektor budidaya yang lebih menekankan ketersediaan tenaga kerja.

Sebenarnya industri peternakan tidak hanya menghasilkan bahan pangan sumber protein saja tetapi ada produk samping lainnya yang juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Di luar pangan, produk peternakan diantaranya adalah feses dan air kencing ternak untuk bahan pembuat pupuk dan gas bio, kulit dan wool untuk sandang, serta tenaganya untuk membajak sawah. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila ternak dijadikan sebagai lokomotif pengembangan ekonomi pedesaan di belahan manapun di Indonesia.

Nilai investasi PMA pertanian di 2011 sebesar US\$ 1,26 miliar. Investasi tanaman pangan dan perkebunan sebesar US\$ 1,22 miliar (96,72 persen) masih menduduki peringkat pertama. Investasi peternakan sebesar US\$ 21,14 juta (1,67 persen) yang melebihi investasi kehutanan US\$ 10,33 juta (0,82 persen) dan perikanan sebesar US\$ 9,99 juta (0,79

persen). Namun pada 2012, nilai investasi PMA untuk peternakan menurun menjadi sebesar US\$ 19,82 juta (1,18 persen), yang lebih kecil dari investasi kehutanan US\$ 26,94 juta (1,61 persen) dan investasi perikanan sebesar US\$ 28,99 juta (1,73 persen) (Statistik Pertanian 2012).

Jika investasi PMDN peternakan dirinci menurut wilayah, terlihat bahwa sebaran investasi PMDN peternakan di 2011 relatif lebih merata, dengan sebaran investasi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar Rp 77,84 miliar (31,49 persen), Papua sebesar Rp 72,96 miliar (29,51 persen), Sumatera sebesar Rp 71,08 miliar (28,75 persen), Sulawesi sebesar Rp 13,42 miliar (5,43 persen) dan Kalimantan sebesar Rp 11,93 miliar (4,82 persen). Nilai investasi PMDN peternakan pada 2012 masih terkonsentrasi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan nilai investasi mencapai Rp 48,38 miliar (49,64 persen dari total PMDN peternakan di 2012). Sementara wilayah lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 49,07 miliar (50,36 persen dari total PMDN peternakan di 2012). Jika investasi PMA peternakan dirinci menurut wilayah, terlihat bahwa nilai investasi PMA peternakan pada periode 2011–2012 masih terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar US\$ 12,49 juta (59,12 persen dari total PMA peternakan di 2011) dan US\$ 16,85 juta (84,98 persen dari total PMA peternakan di 2012).

Di balik fakta tercukupinya kebutuhan bahan pangan asal ternak di Indonesia dan perkembangan investasi PMA dan PMDN, sebenarnya ada ancaman serius terhadap ketersediaan semua bahan pangan sum-



ber protein hewani tersebut secara berkelanjutan. Ternyata di bidang peternakan, masih tidak/belum ada kedaulatan bahan pangan asal hewani hingga saat ini, yang ditunjukkan dengan realita sebagai berikut ;

Seratus persen bibit ternak ayam ras pedaging dan ayam ras petelur yang diproduksi di Indonesia berasal dari impor, baik dari Amerika Serikat atau Eropa. Ini telah berlangsung puluhan tahun tepatnya sejak awal 1970. Di satu sisi perkembangan industri ayam ini membuat harga daging ayam dan telur dapat dijangkau masyarakat luas, tetapi di sisi lain kita tergantung mutlak dari pasokan bibit luar negeri.

Ayam asli dan ayam lokal Indonesia belum dikembangkan secara optimal sehingga performa produksi dan reproduksinya sangat jauh ketinggalan dengan ayam impor. Amat sangat sedikit usaha pembibitan ayam lokal Indonesia dikembangkan secara serius.

Bahan baku pakan ayam yang 50% diantaranya berupa jagung belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Secara rata-rata, bangsa Indonesia hanya mampu memenuhi 40–50% dari total kebutuhan jagung. Produksi jagung rendah dan kualitasnya juga sangat beragam.

Peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis perunggasan juga masih banyak yang diimpor. Ini mulai dari peralatan perkandangan, penetasan, budidaya, pengelolaan panen sampai pengolahan pascapanen. Dapat dikatakan hampir semua kebutuhan industri perunggasan didatangkan dari luar negeri.

Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perunggasan, integrasi vertikal dalam menjalankan usaha peternakan ini tidak terhindarkan. Satu perusahaan memiliki usaha pembibitan sampai pemotongan ayam dan bahkan produk akhirnya seperti *chicken nugget* dan sejenisnya

Secara keseluruhan 70% total potensi pasar unggas di Indonesia dikuasai sedikit perusahaan raksasa melalui bisnis yang bersifat integrasi vertikal tadi. Ini merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi menekan biaya produksi untuk menghasilkan produk dengan harga terjangkau masyarakat luas. Tidak mengherankan jika usaha peternakan mandiri di perunggasan akhirnya harus bergabung ke perusahaan raksasa yang memiliki usaha terintegrasi tadi.

Usaha ayam lokal dengan pengelolaan secara tradisional tidak dapat berdayasaing dengan ayam impor. Harga per kg bobot badan ayam lokal jauh lebih mahal dari per kg bobot badan ayam impor sehingga tidak memiliki daya saing. Oleh karena itu, pangsa pasarnya sangat

Semua pihak berniat baik tetapi situasi menjadi runyam ketika data tidak akurat dan ada kepentingan lain dibalik tujuan utama yang ingin dicapai. Perdebatan antar pihak untuk mengkomodasi kepentingan masing-masing secara proporsional dan profesional belum selesai hingga sekarang. Alih-alih meningkatkan daya saing untuk dapat bermain di pasar global, perdebatan yang tak kunjung selesai banyak menghabiskan energi dan seringkali merugikan peternak kecil dan konsumen.

kecil dan hanya dikonsumsi kalangan menengah ke atas atau untuk kebutuhan seremoni keagamaan dan budaya

Penyakit menular akibat penyebaran virus atau bakteri masih sering terjadi di Indonesia karena lemahnya profesionalitas para pelaku usaha peternakan yang berskala menengah ke bawah.

Tidak ada rasa persatuan tinggi antar pelaku usaha perunggasan sehingga mereka sering “perang saudara sesama bangsa Indonesia” dan bukan bersatu padu menghadapi “lawan bisnis dari luar Indonesia”

Untuk ternak sapi pedaging, lebih dari 98% populasi sapi pedaging di Indonesia dikuasai oleh peternak kecil dengan rata-rata kepemilikannya hanya 1-3 ekor per peternak dan tersebar di seluruh Indonesia. Mereka memelihara sapi betina untuk menghasilkan pedet dan membesarkannya. Mereka mengembangbiakkan sapi betinanya agar selalu tersedia ternak sapi. Populasi sisanya yang 2% dikuasai oleh peternak besar dengan skala ribuan atau bahkan puluhan ribu ekor sapi. Kebanyakan sapi yang dipelihara berasal dari impor atau merupakan hasil persilangan. Mereka seringkali melakukan usaha penggemukan, bukan usaha pengembangbiakan.

Produktivitas sapi yang dipelihara peternak berskala kecil rendah dan mutu genetiknya semakin menurun dari generasi ke generasi. Sapi dipelihara ala kadarnya di sisa-sisa waktu dan tenaga yang dimiliki setelah para peternak mengerjakan tugas utamanya yaitu bertani. Teknologi peternakan yang dikembangkan di lembaga penelitian dan perguruan tinggi tidak dapat diterapkan karena berbagai kendala teknis maupun nonteknis yang dihadapi.

Mayoritas peternak berpendidikan sekolah dasar atau sekolah

Semua pihak baik pemerintah maupun swasta harus bersinergi membenahi usaha dan industri peternakan yang berorientasi penguatan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan bebas ASEAN 2015 dan pasar bebas dunia 2020. Pemerintahan baru nanti harus memiliki komitmen jelas dan terukur bagi terwujudnya kebersamaan membangun peternakan nasional yang lebih maju. Pada dasarnya komponen bangsa yang terlibat dan dapat dilibatkan adalah birokrat pengambil kebijakan, pengusaha pelaku bisnis dan industri peternakan, akademisi penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komunitas peternak berskala kecil.

menengah pertama dengan keterbatasan pengetahuan yang menghambat upaya perkembangan usahanya di bidang persapian.

Posisi tawar peternak sangat rendah sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraan para peternak secara rata-rata jauh di bawah standar. Ini merupakan bentuk lain dari ketidakberdayaan peternak menghadapi bisnis di industri sapi.

Dan masih banyak lagi kelemahan yang dimiliki oleh peternak kecil di Indonesia yang menjadi tulang punggung bangsa dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan asal ternak sapi ini.

Jadi, dalam industri peternakan baik perunggasan, posisi peternak berskala kecil sangat lemah akibat terhimpit dalam perang industri antar pelaku kelas kakap. Untuk industri persapian, para pelaku industri kelas kakap berkolaborasi secara amat baik dengan pebisnis sapi dari Australia. Tingkat efisiensi dan produktivitas tinggi dalam industri sapi di Australia membuat harga per kg bobot badan sapi Australia jauh lebih murah dari harga per kg bobot badan sapi Indonesia. Karena situasi ini, impor sapi atau impor daging beku jauh lebih menguntungkan daripada melakukan usaha pengembangbiakan sapi. Hanya karena kecintaan para peternak dengan usaha beternaknya yang membuat mereka tetap bertahan memelihara sapi sambil dimanfaatkan sebagai tabungan hidup ketika suatu saat memerlukan dana segar untuk menopang kebutuhan hidup peternak kecil.

Regulasi dan Kebijakan di Bidang Peternakan di Indonesia

Dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mengatur bisnis dan industri peternakan di Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa peraturan pelaksanaan di bawahnya juga telah diterbitkan agar amanah dalam UU tersebut dapat diimplementasikan walaupun beberapa peraturan lainnya masih dalam taraf penyusunan.

Sebenarnya semangat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut sangat baik. Dalam UU tampak sekali bahwa pemerintah memberi layanan dan fasilitas yang adil bagi para pelaku usaha peternakan. Yang kecil dibantu dan diberi kemudahan banyak akses sedangkan yang besar juga diupayakan untuk dapat melakukan bisnisnya secara kondusif. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, tampaknya belum ada keterpaduan antara berbagai pihak dalam membangun peternakan yang lebih berdaya saing. Seringkali penyebab utama ketidakharmonisan tersebut adalah data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Hingga saat ini, keakuratan data yang ada di Indonesia masih banyak diperdebatkan, baik data dari pemerintah maupun data dari instansi nonpemerintah seperti asosiasi. Ini terjadi karena semua pihak memiliki kepentingan sendiri baik antar instansi dalam pemerintah maupun antar perusahaan besar yang berkecimpung dalam industri tersebut. Semua pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodasi. Inti yang dituju jelas bahwa produsen memperoleh keuntungan layak dan tentu saja tidak mau rugi di satu sisi. Di sisi lain, konsumen memperoleh produk peternakan dengan harga terjangkau.

Ketidakakuratan data menjadi celah bagi semua pihak untuk bertindak sesuai keinginannya dengan argumen masing-masing. Bagi kementerian pertanian, yang menjadi target utama adalah memberdayakan peternak dan meningkatkan pendapatan peternak. Impor sedapat mungkin dikurangi atau ditiadakan sehingga dapat menggairahkan peternak di dalam negeri. Bagi kementerian perdagangan, yang menjadi target utama adalah ketersediaan pasokan bahan pangan dengan harga terjangkau. Segala daya upaya dilakukan, misalnya impor daging dan impor sapi, agar tersedia komoditas tersebut bagi masyarakat. Bagi perusahaan, yang menjadi target utama adalah keuntungan dalam rangka membantu pemerintah menyediakan tenaga kerja.

Semua pihak berniat baik tetapi situasi menjadi runyam ketika data

tidak akurat dan ada kepentingan lain dibalik tujuan utama yang ingin dicapai. Perdebatan antar pihak untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing secara proporsional dan profesional belum selesai hingga sekarang. Alih-alih meningkatkan daya saing untuk dapat bermain di pasar global, perdebatan yang tak kunjung selesai banyak menghabiskan energi dan seringkali merugikan peternak kecil dan konsumen. Padahal akhir tahun 2015, pasar bebas Asia diberlakukan. Jika semua pihak tidak bersatu, maka daya saing produk Indonesia akan lemah dan Indonesia akan menjadi pasar menggiurkan bagi bangsa lain yang lebih kompak dalam membuat dan mengimplementasikan regulasinya.

Pemikiran dari IPB bagi DPR RI dan bagi Presiden RI beserta kabinetnya

Ternyata dalam industri peternakan di Indonesia memang harus ada pengklasifikasian usaha, yang pada dasarnya ada dua. **Pertama**, kelas peternak berskala kecil. **Kedua**, pengusaha di bidang peternakan berskala industri. Untuk komoditas sapi pedaging, 98% sapi di Indonesia dikelola peternak berskala kecil dengan kepemilikan 1-3 ekor per peternak. Hanya 2% yang dikelola perusahaan berskala industri. Untuk komoditas sapi perah, perusahaan besar berskala industri hanya tertarik dalam industri pengolahan susu. Pemeliharaan sapi dilakukan mayoritas oleh peternak kecil dengan kepemilikan rata-rata 2-4 ekor per peternak. Hanya sedikit sekali perusahaan berskala besar yang melakukan usaha budidaya dan pengolahan produknya. Untuk komoditas unggas khususnya ayam ras pedaging dan petelur, mayoritas ternak dikuasai perusahaan bermodal besar. Peternak skala kecil hanya melakukan budidaya ternak yang umumnya bermitra dengan perusahaan besar.

Dengan klasifikasi pelaku usaha di industri peternakan seperti itu, dalam lima tahun periode pemerintahan baru sejak Presiden dan Wakil Presiden RI dilantik Oktober 2014 mendatang, perlu dilakukan tahapan kegiatan yang jelas dan terukur untuk membenahi industri peternakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Semua pihak baik pemerintah maupun swasta harus bersinergi membenahi usaha dan industri peternakan yang berorientasi penguatan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan bebas ASEAN 2015 dan pasar bebas dunia 2020. Pemerintahan baru nanti harus memiliki komitmen jelas dan terukur bagi terwujudnya kebersamaan membangun pe-

ternakan nasional yang lebih maju. Pada dasarnya komponen bangsa yang terlibat dan dapat dilibatkan adalah birokrat pengambil kebijakan, pengusaha pelaku bisnis dan industri peternakan, akademisi penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komunitas peternak berskala kecil.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen bangsa adalah sebagai berikut :

Birokrat

- Membantu memfasilitasi kebutuhan peternak berskala kecil dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas ternaknya dalam bentuk perbaikan kandang dan penyediaan teknologi pengolahan limbah pertanian sebagai bahan baku pakan secara berkesinambungan;
- Mencerdaskan peternak berskala kecil dalam mengelola ternaknya, baik aspek bisnisnya maupun aspek teknis beternaknya;
- Menghindari pemberian bantuan ternak karena cara-cara seperti menimbulkan moral hazard bagi penyelenggara negara dan tidak memberikan peningkatan kesejahteraan peternak secara cepat tetapi justru melanggengkan sikap ingin dibantu terus-menerus
- Memberikan kepastian hukum tentang penggunaan lahan bagi usaha peternakan yang bersifat sendiri maupun yang terintegrasi dengan perkebunan atau kehutanan
- Menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan industri peternakan di dalam negeri melalui perbaikan infrastruktur yang mendukung berkembangnya usaha peternakan seperti perbaikan jalan, kemudahan moda transportasi produk peternakan, jaringan listrik yang tersalur sampai ke pelosok, dan perizinan usaha yang cepat dan mudah.

Pengusaha

- Menjadikan karyawannya sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya sehingga setiap insan di perusahaan merasa menjadi bagian penting dari perusahaan itu
- Meningkatkan profesionalitas para karyawannya sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam rangka meningkatkan daya saing
- Menjalin kemitraan dengan para sesama pengusaha domestik dalam pengadaan bahan baku atau semua kebutuhan perusahaannya; serta dengan para akademisi dalam mengembangkan produk di bidang pe-

ternakan dan kesehatan hewan

- Menjunjung tinggi transparansi dalam berusaha dan taat segala peraturan yang diamanahkan dalam Undang Undang, menghindari berbagai bentuk kartel dan monopoli usaha yang dapat merugikan konsumen, dan berkomitmen kuat memberantas korupsi melalui upaya mencegah pemberian fasilitas dalam bentuk apapun kepada birokrat.

Akademisi, termasuk peneliti

- Mengimplementasikan hasil karya teknologinya dan mendampingi peternak berskala kecil untuk dapat mengadopsi teknologi yang dihasilkan untuk meningkatkan produktivitas ternaknya
- Membantu konsolidasi peternak kecil untuk dapat membangun perusahaan kolektif berbasis koperasi melalui pemberian pelatihan teknis maupun nonteknis sehingga semua peternak dapat berdaulat dalam menentukan harga ternaknya demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- Mendampingi penerapan program pemuliaan ternak dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu genetik ternak secara berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan persilangan antar bangsa ternak unggul maupun pendekatan seleksi di dalam bangsa ternak lokal yang dimiliki Indonesia
- Menjalinkan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan kolektif milik peternak kecil dalam rangka melahirkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didedikasikan kepada peternak itu sendiri.

Komunitas peternak kecil

- Merawat ternak dan lingkungan kandangnya secara benar sehingga menghasilkan ternak yang sehat maupun lingkungan yang bersih
- Menghasilkan produk peternakan dan hasil ikutannya bagi kebutuhan manusia maupun tumbuhan dalam menjalankan kehidupannya sampai akhir zaman
- Mengelola lahan pertanian milik sendiri atau perkebunan atau hutan yang dapat dikerjasamakan dalam upaya menyediakan pakan bagi ternaknya
- Menjalinkan kerjasama dengan akademisi maupun pemerintah daerah untuk secara bersama memproduksi ternak di wilayah masing-masing sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Daftar Pustaka:

Anonim 2013. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.<http://ditjennak.deptan.go.id>

Juni 2014

Solusi Daging Sapi

Harga daging sapi masih tinggi. Upaya pemerintah via BULOG mengimpor daging sapi dan sapi siap potong dari Australia agar harga daging turun tidak berhasil. Padahal, demi hajat orang banyak untuk mendapatkan daging berharga wajar, pemerintah telah “menerobos” sejumlah aturan yang ada.

Ternyata hukum ekonomi tidak berjalan karena meski pasokan melimpah, harga tetap tinggi. Jelas ada yang tak beres di balik ini semua. Ini membuat berita Kompas (17/7/2013) meragukan kebenaran penurunan jumlah sapi sebesar 19 persen. Tadinya saya berpikir kelangkaan daging sapi akibat penurunan populasi yang mengakibatkan harga daging tinggi. Namun, setelah pasokan sapi dan daging sapi ditambah, ternyata harga masih tetap tinggi. Jadi, tidak ada korelasi antara harga daging dan ketersediaan sapi ataupun daging. Situasi pasar menjadi terombang-ambing.

Fenomena ini juga merupakan salah satu bukti betapa berbahayanya bangsa kita ke depan tanpa adanya kedaulatan pangan! Kita sudah tergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan daging sapi berharga wajar. Jika ini terjadi pada komoditas lain juga, apa jadinya bangsa kita? Oleh karena itu, perlu ada perubahan strategi sangat mendasar untuk membangun usaha dan industri peternakan sapi di Indone-



sia agar terhindar dari ketergantungan negara lain.

Untuk strategi jangka panjang, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah memperbaiki usaha beternak sapi bagi 6,5 juta peternak berskala kecil. Mereka yang menguasai lebih dari 98% populasi sapi di Indonesia harus diajak berbisnis secara benar melalui pendekatan kolektif dengan satu manajemen. Kondisi alam, budaya masyarakat, dan karakter peternak di Indonesia memungkinkan hal itu. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan peternak Australia yang harus bersifat individualistis karena kondisi alam, budaya masyarakat, dan karakter peternaknya memang berbeda dengan Indonesia.

Kelangkaan daging sapi akibat penurunan populasi yang mengakibatkan harga daging tinggi. Namun, setelah pasokan sapi dan daging sapi ditambah, ternyata harga masih tetap tinggi. Jadi, tidak ada korelasi antara harga daging dan ketersediaan sapi ataupun daging. Situasi pasar menjadi terombang-ambing. Fenomena ini juga merupakan salah satu bukti betapa berbahayanya bangsa kita ke depan tanpa adanya kedaulatan pangan!

Selama ini peternak kecil hanya diajari secara teknis. Itu pun bersifat parsial dan tak berkelanjutan. Jumlah peternak yang diajari juga sangat terbatas dan lokasinya menyebar. Celakanya lagi banyak pihak mengajarkan mereka dengan pendekatan berbeda-beda. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan tinggi, tetapi tingkat keberhasilan rendah dan produktivitas sapi tetap rendah.

Beberapa peternak malah terkesan mengejek “Kalau ada bantuan pemerintah, kami anggap untuk *refreshing* saja Pak,” kata seorang peternak kepada saya. Dari diskusi lebih lanjut, ternyata para peternak tahu pemerintah selama ini hanya melaksanakan proyek dan tidak membina mereka untuk dapat mandiri. Pemerintah di sini bukan hanya Kementerian Pertanian melainkan juga Kementerian lain yang menggunakan ternak sebagai komoditas dalam proyeknya.

Hal itu dapat diartikan bahwa pendekatan proyek yang selama ini berjalan tidak mencerdaskan peternak dan tidak membuat mereka menjadi pengusaha sapi yang berdaya saing. Namun, fakta lain juga menunjukkan bahwa tidak semua proyek pemerintah gagal karena beberapa

proyek pemerintah dapat melahirkan peternak baru berjiwa bisnis sebagaimana yang terjadi dalam program Sarjana Membangun Desa (SMD). Namun, keberhasilan program ini kurang berdampak secara signifikan.

Peternak Mandiri

Jadi, yang perlu diupayakan ke depan adalah bahwa peternak harus dapat berbisnis secara mandiri melalui usaha kolektif dengan satu manajemen. Jumlah sapi yang diusahakan harus ada minimalnya, misalnya 1.000 ekor sapi betina dalam satu kawasan padat sapi. Pemerintah harus memfasilitasi usaha kolektif tersebut, baik dari aspek teknis maupun nonteknis, secara terus-menerus sampai akhirnya usaha itu berjalan mandiri.

Dengan demikian, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan proyek pengadaan sapi, tetapi harus lebih banyak menyelenggarakan aktivitas berkelanjutan yang berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas peternak ataupun memperkuat fasilitas pendukungnya dalam beternak. Untuk jangka pendek, serahkan urusan pemenuhan daging kepada para pelaku bisnis yang memang menguasai pasar dan pemerintah tidak perlu ikut bermain di dalamnya. Peran pemerintah sebaiknya tetap sebagai regulator saja. Kenapa? Itu karena BULOG ternyata gagal menurunkan harga daging di pasar. Bisa saja niat baik pemerintah untuk menurunkan harga daging via BULOG “dipelintir” oknum tak bertanggung jawab sehingga tujuan dari niat baik itu tidak tercapai.

Saya menduga ada perlawanan pelaku bisnis sapi kepada pemerintah dalam hal penyediaan daging sapi di Indonesia kali ini. Ketika para pelaku usaha diberi kuota impor, di antara mereka sendiri bersaing untuk mendapatkan kuota terbanyak. Segala cara digunakan agar dapat kuota besar dengan harapan dapat untung besar. Bisa jadi mereka “cakar-cakaran” dalam upaya memperebutkan kuota impor. Namun, ketika pemerintah sendiri ikut menangani impor daging dan impor sapi siap potong via BULOG dalam rangka menurunkan harga daging, para pelaku bisnis mungkin merapatkan barisan dan kompak “melawan” pemerintah. Dengan masih tingginya harga daging di pasar, “duel” pelaku bisnis dengan pemerintah tampaknya dimenangi pelaku bisnis.

Mudah-mudahan analisa saya tersebut salah. Namun, seandainya benar, semua pihak mulai perlu bernegosiasi dengan tetap saling menghormati profesionalitas masing-masing. Pemerintah harus bertindak sebagai regulator dan pelaku bisnis sebagai aktor. Demi kepentingan

nasional, pelaku bisnis harus pula bergandeng tangan dengan pemerintah untuk membantu peternak berskala kecil agar dapat lebih berdayasaing. Ketika para peternak berskala kecil menjadi maju dan besar melalui usaha kolektifnya, mereka dapat saja berkolaborasi dengan perusahaan besar untuk berbisnis sapi dengan peternak Australia. Saya yakin, harga sapi akan bisa dikendalikan melalui mekanisme pasar karena para pelaku bisnis sapi memang sudah merupakan komunitas sendiri. Oleh karena itu, semua pihak harus berpikir positif untuk melahirkan hasil yang positif juga. Dengan demikian semua pihak tersenyum, konsumenpun ikut tersenyum.■

Desember 2012

Swasembada Daging

Belajar dari Sapi

Program swasembada daging telah digulirkan tiga kali yakni pada 2005, 2010, dan 2014. Tidak seperti dua program sebelumnya, program swasembada daging 2014 merupakan salah satu butir capaian kinerja Kabinet Gotong Royong II dalam kontrak politik antara Menteri Pertanian dan Presiden RI.

Indikator tercapainya swasembada daging sapi 2014 adalah impor daging dan impor sapi bakalan di 2014 hanya 10% dari total kebutuhan nasional. Dalam merencanakan strategi dan kegiatan di lapangan maupun membuat cetak biru swasembada daging 2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian tidak sendiri. Beberapa pakar dan akademisi diajak diskusi. Bahkan para pimpinan asosiasi sering dilibatkan dalam rangka pengambilan berbagai kebijakan. Semua dilakukan secara sangat hati-hati dan tidak serampangan. Semua keputusan diambil berdasarkan data yang jelas sumbernya.

Puluhan kegiatan dilakukan di banyak provinsi dan ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah digelontorkan agar produktivitas ternak sapi mampu menjamin 90% ketersediaan daging sapi di Indonesia. Namun demikian, Sensus Pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 menunjukkan adanya penurunan populasi ternak sapi sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Terlepas dari tercapai tidaknya menekan impor daging sapi dan sapi bakalan sampai 10% di 2014 nanti, banyak pe-



lajaran yang diperoleh dari program swasembada daging 2014 ini.

Publik menjadi tahu betul tataniaga perdagangan sapi dan daging sapi di Indonesia secara lebih gamblang. Rantai distribusi sapi dari peternak sampai ke jagal di Rumah Potong Hewan (RPH) cukup panjang yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Pola penyembelihan sapi sangat tidak standar dan jauh dari pemenuhan prinsip kesejahteraan hewan. Kecurangan para tukang daging di RPH ketika melakukan proses penyembelihan sapi sampai distribusi daging ke pasar becek.

Ketidakberdayaan petugas pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengelola RPH sehingga kondisi RPH makin hari selalu makin memburuk. Tidak akurasi informasi tentang sapi seperti bangsa sapi, bobot badan saat potong, dan bobot karkas yang diterbitkan petugas RPH karena tidak diterapkannya standar yang telah digariskan pemerintah dan masih banyak sederet permasalahan yang perlu dibenahi.

Sudah saatnya kita membenah menata usaha dan industri peternakan sapi secara lebih profesional. Para peternak berskala kecil yang mendominasi kepemilikan ternak sapi harus “didandani” pikirannya dan “diperluas” wawasan bisnisnya, serta “diterampilkan” kemampuan beternaknya. Mereka adalah tulang punggung bangsa yang menyediakan bahan pangan asal hewan.

Di aspek budidaya, semakin jelas potret kondisi ternak sapi dan peternaknya. Cukup banyak sapi yang terabaikan oleh peternak karena keterbatasan tenaga dan curahan waktu peternak dalam mengurus ternaknya. Ini mengakibatkan kondisi sapi yang lebih banyak kurusnya daripada gemuknya.

Sebagian besar peternak tidak berbisnis ternak tetapi hanya sekedar memelihara ternak dan menabung tenaga untuk kemudian ditukar uang pada saat dibutuhkan. Tidak ada perencanaan usaha peternakan sapi karena mayoritas peternak hanya memiliki 2-3 ekor sapi per peternak. Sapi yang dipelihara peternak tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang luasnya hampir sama dengan benua Eropa dan budaya masyarakat berbeda antar daerah dalam memelihara ternak sapi.

Di aspek hulu, baru disadari pula bahwa ternyata Indonesia tidak memiliki sapi lokal berkualifikasi bibit. Selama ini peternak dan masyarakat

kat sering menyebut betina produktif sebagai bibit.

Cukup sering juga terdengar bahwa sapi dengan postur tubuh besar disebut sebagai bibit yang bagus. Kurangnya pemahaman tentang bibit mengakibatkan sapi silangan yang pada umumnya berpostur lebih besar daripada postur sapi lokal disebut sebagai bibit unggul. Dan masih banyak kesalahan peternak dalam memaknai bibit.

Saatnya Berbenah

Kompleksitas, kesemrawutan, dan ketidakseragaman dalam pengelolaan sapi oleh peternak di seluruh Indonesia yang terkuak satu per satu dalam hiruk pikuk program swasembada daging sapi itu yang datanya dijadikan sebagai landasan dalam menyusun strategi nasional. Itu jelas berbeda dengan kondisi peternakan sapi milik importir atau peternakan sapi di Australia yang relatif seragam pengelolaannya, seragam bangsa sapinya, dan seragam semua aspek pemeliharannya. Namun perbedaan tajam tersebut tetap digunakan dalam penentuan *supply and demand* daging sapi di Indonesia. Hal itu pastinya tidak *fair*.

Sehebat apapun Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, secemerlang apapun para pakar yang mendampingi pemerintah, dan secanggih apapun analisis yang digunakan, data yang diperoleh akan selalu menjadi perdebatan tak habis-habis dari seluruh pemangku kepentingan karena berbagai kesemrawutan usaha dan industri persapian di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita berbenah menata usaha dan industri peternakan sapi secara lebih profesional. Para peternak berskala kecil yang mendominasi kepemilikan ternak sapi harus “*didandani*” pikirannya dan “*diperluas*” wawasan bisnisnya, serta “*diterampikan*” kemampuan beternaknya. Mereka adalah tulang punggung bangsa yang menyediakan bahan pangan asal hewan. Cukup satu kali saja belajar dari sapi melalui program swasembada daging sapi 2014. Selanjutnya kita semua harus lebih cerdas dalam menata dan membangun peternakan di Indonesia, untuk semua komoditas ternak.■

Desember 2013

Setelah *Blue Print* Swasembada Daging Final

Setelah berkali-kali dilakukan pertemuan dan pembahasan, akhirnya dokumen *blue print* Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 sudah kelihatan bentuk, format, dan substansinya. Mestinya tinggal finalisasi saja kecuali ada perubahan mendasar dari pengambil keputusan tertinggi misalnya dari Menteri Pertanian RI sebagai pemberi perintah penyusunan dokumen tersebut.

Pada prinsipnya, dalam dokumen tersebut tersusun lima kegiatan pokok untuk mencapai swasembada daging sapi 2014 yaitu (1) Penyediaan sapi bakalan/daging sapi lokal secara berkelanjutan; (2) Peningkatan produktivitas dan reproduktivitas sapi lokal; (3) Pencegahan pemotongan sapi betina produktif; (4) Penyediaan bibit sapi lokal; dan (5) Revitalisasi aturan distribusi dan pemasaran ternak/daging sapi. Lima kegiatan tersebut dijabarkan secara rinci menjadi 13 program aksi yang setiap program aksinya dijabarkan lebih rinci lagi menjadi beberapa kegiatan operasional.

Penyusunan dokumen dilakukan berdasarkan hasil kompilasi rencana program yang disiapkan oleh tim birokrat di direktorat jenderal peternakan dan kompilasi pemikiran para tokoh peternakan. Dalam perjalanan menyusun dokumen tersebut, beberapa asosiasi di bidang pe-



ternakan secara proaktif juga mengkritisi dan memberi saran penyempurnaan.

Dengan demikian, dokumen *blue print* itu secara substantif mestinya sudah cukup. Namun demikian kalau dicari cari kelemahannya pasti masih saja akan dapat ditemukan. Karena itu jika kita semua berkomitmen untuk mensukseskan swasembada daging sapi pada 2014, masukan yang bersifat konstruktif tentu akan dapat membantu pemerintah dalam mengimplementasikan semua program yang tersusun dalam dokumen tersebut.

Soal ketidakakuratan data ini bukan hal aneh tetapi memang demikian kenyataannya. Selama ini penghitungan jumlah sapi potong di Indonesia tidak didasarkan pada sensus tetapi pada prediksi statistik. Akibatnya angka-angka di buku statistik peternakan sangat berbeda dengan fakta di lapangan.

Diragukan

Adanya program PSDS 2014, yang melanjutkan program PSDS 2005 dan PSDS 2010, masih diragukan tingkat keberhasilannya oleh banyak pihak mengingat tidak adanya hasil yang signifikan dari dua program PSDS sebelumnya. Ini diperkuat dengan data sapi potong yang digunakan dalam menyusun dokumen itu sangat diragukan kebenarannya bahkan oleh kalangan birokrat sendiri.

Soal ketidakakuratan data ini bukan hal aneh tetapi memang demikian kenyataannya. Selama ini penghitungan jumlah sapi potong di Indonesia tidak didasarkan pada sensus tetapi pada prediksi statistik. Akibatnya angka-angka di buku statistik peternakan sangat berbeda dengan fakta di lapangan. Karena itu, melakukan sensus sapi potong di Indonesia untuk mengawali program PSDS 2014 merupakan keniscayaan sehingga kita memiliki basis kuat dalam mengevaluasi keberhasilan dan/atau kegagalan PSDS 2014.

Yang lebih merisaukan lagi adalah bagaimana strategi, pendekatan manajemen, dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan menelan dana Rp 7,5 triliun dalam lima tahun ini. Wajar dirisaukan karena PSDS 2014 merupakan program besar yang melibatkan banyak pihak seperti instansi pemerintah lintas departemen; instansi

pemerintah nondepartemen; lembaga swasta, pelaku bisnis, asosiasi; serta lembaga asing tentunya. Untuk memperkecil kegagalan, faktor non-teknis seperti *leadership*, kemampuan manajerial, *networking*, komunikasi, dan lobi jauh lebih berperan dalam menggerakkan program PSDS 2014.

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono dalam pertemuan nasional di Bandung akhir 2009 lalu menuturkan, salah satu kontrak politik antara Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Mentan adalah keberhasilan swasembada daging. Artinya, komitmen orang nomor satu di Indonesia sudah sangat jelas.

Namun rasanya hanya basa-basi politik apabila komitmen presiden itu tidak diwujudkan dalam bentuk keputusan politik yang legal formal. Karena itu, dokumen *blue print* tersebut harus diberi kekuatan hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) dengan segala konsekuensinya. Itupun belum menjamin keberhasilan PSDS 2014 karena menerjemahkan komitmen presiden ke dalam implementasi riil di lapangan sampai ke level peternak berskala kecil merupakan pekerjaan besar yang tidak mudah.

Diperlukan kesabaran tinggi dan tidak dapat hanya mengandalkan motor birokrasi semata. Tidak pula hanya menggunakan tangan besi ala militer zaman orde baru. Ini sungguh merupakan pekerjaan berisiko tinggi dengan tekanan tinggi pula dari atas-bawah maupun kiri-kanan, yang tidak main-main.

Dengan segala kerisauan banyak pihak, kekhawatiran akan keberhasilannya, dan kendala yang akan dihadapi, seharusnya kita tetap harus optimis karena presidennya adalah doktor pertanian dan menteri pertaniannya adalah sarjana peternakan yang tentu saja memahami lika-liku dunia peternakan secara amat baik. *Good luck* dan semoga sukses!!■

Februari 2010

Swasembada Daging : 30 Tahun atau 3 Tahun ?

Isu swasembada pangan di republik ini terus menjadi berita hangat. Berhasil tidaknya kabinet Jokowi-JK juga tak lepas dari tercapainya target pemerintah untuk berswasembada pangan. Ini termasuk swasembada daging sapi yang telah diprogramkan sejak 2010 dan belum berhasil dicapai hingga hari ini. Artinya, Indonesia belum mampu memenuhi 90 % kebutuhan daging sapi bagi penduduknya dan selalu mengimpor sapi bakalan dan daging beku lebih dari 10% dari total yang dibutuhkan.

Jika hanya mengandalkan ternak sapi lokal, maka diperlukan waktu minimal 30 tahun untuk berswasembada daging sapi. Itupun harus dikerjakan melalui program terobosan yang melibatkan berbagai instansi dan dilakukan secara tersistem, terstruktur, dan masif dengan pemeran utamanya adalah peternak berskala kecil yang skala kepemilikannya hanya 2 sampai dengan 3 ekor per peternak.

Jika hanya mengandalkan ternak sapi lokal, maka diperlukan waktu minimal 30 tahun untuk berswasembada daging sapi. Itupun harus dikerjakan melalui program terobosan yang melibatkan berbagai instansi dan dilakukan secara tersistem, terstruktur, dan masif dengan pemeran utamanya adalah peternak berskala kecil yang skala kepemilikannya hanya 2 sampai dengan 3 ekor per peternak.

Namun demikian, seperti telah dianjurkan oleh banyak pakar, swasembada daging juga dapat dicapai dalam waktu pendek misalnya 3 tahun jika pemerintah mengimpor setidaknya dua sampai tiga juta ekor sapi indukan dari luar negeri ke Indonesia. Mengimpor sapi indukan dalam jumlah besar merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan pemerintah jika ingin cepat berswasembada daging.

Jika memang ada anggaran untuk mengimpor sapi indukan dalam jumlah besar, maka dalam pengelolaannya harus melibatkan perguruan tinggi maupun lembaga riset (akademisi) dan perusahaan peternakan (pelaku usaha). **Pertama**, pemerintah harus menyediakan lahan luas yang dapat disewa penggunaannya oleh perusahaan peternakan untuk

penggembalaan sapi indukan. Pemerintah membeli sapi indukannya dan menitipkan seluruh sapi indukan yang dibeli kepada perusahaan peternakan yang profesional dan berpengalaman. Jika perusahaan peternakan telah memiliki lahan penggembalaan, maka pemerintah berkewajiban membeli sapi indukan saja.

Kedua, semua sapi indukan dikelola oleh perusahaan peternakan dan pedet yang dihasilkan ditumbuhkembangkan oleh perusahaan tersebut. Perguruan tinggi dan lembaga riset diberi akses untuk menggunakan sapi indukan dan lahan perusahaan sebagai bahan penelitian. Untuk sapi jantan, semua digunakan untuk menghasilkan daging. Sebagian dana dari hasil penjualan sapi jantan digunakan untuk riset.

Ketiga, untuk sapi betina yang dihasilkan, sebagian sapi dipinjamkan kepada peternak berskala kecil yang dipilih melalui seleksi ketat oleh tim independen. Sapi betina dipinjamkan ke peternak kecil harus dalam kondisi bunting. Dalam hal ini, peternak harus bermitra dengan pemodal individu melalui konsep kemitraan Mulya-52. Pola ini merupakan pola kemitraan antara peternak dan individu perorangan dengan pembagian tugas sebagai berikut: peternak hanya bertugas memelihara sapi indukan sedangkan pemitra menyediakan dana pengelolaan sapi. Hasil penjualan pedet yang dihasilkan oleh sapi indukan dibagi antara peternak dan pemitra secara proporsional, dimana porsi peternak harus lebih besar daripada porsi pemitra.



Swasembada daging juga dapat dicapai dalam waktu pendek misalnya 3 tahun jika pemerintah mengimpor setidaknya dua sampai tiga juta ekor sapi indukan dari luar negeri ke Indonesia. Mengimpor sapi indukan dalam jumlah besar merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan pemerintah jika ingin cepat berswasembada daging.

Sapi betina juga dapat dijual ke masyarakat luas untuk dikembangkan lebih lanjut yang sebagian dana hasil penjualan sapi betina disisihkan untuk disimpan sebagai dana tambahan beli sapi indukan lagi jika sapi nya telah tak berproduksi lagi (afkir).

Melalui cara seperti itu, pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai penyedia sapi indukan sebagai pabrik biologis penghasil sapi bakalan dan sapi betina calon indukan baru. Perusahaan swasta memelihara dan merawat sapi indukan sebaik-baiknya serta wajib mengasuransikan sapi indukan milik pemerintah tersebut.

Peternak yang telah memenuhi kriteria untuk memelihara sapi indukan bermitra dengan individu perorangan untuk memelihara dan merawat sapi indukan yang dihasilkan dari perusahaan peternakan tersebut. Para akademisi termasuk dosen, peneliti, dan mahasiswa melakukan penelitian yang hasilnya didedikasikan kembali kepada perusahaan peternakan dan peternak berskala kecil.

Dengan demikian, semua pihak diuntungkan dan secara lambat laun, penyediaan sapi bakalan dapat dipenuhi dari dalam negeri dan tidak harus impor dari luar negeri. Di saat bersamaan, penataan peternakan berskala kecil terus dilakukan melalui pencerdasan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan oleh akademisi dari perguruan tinggi maupun lembaga riset.

Pemerintah tidak kehilangan modal awalnya berupa sapi indukan tetapi juga tidak berbisnis sendiri mengurus sapi indukan tersebut. Melalui kebersamaan seperti itu dan masing-masing pihak berkontribusi, swasembada dapat dicapai dalam waktu lebih cepat tetapi sangat tergantung dari ketersediaan sapi indukan yang diimpor pemerintah dari luar negeri.■

Juni 2015

Jejak Langkah

Muladno, Dirjen Hasil Lelang

Sebulan lalu, 1 Juni 2015, Muladno dilantik Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), setelah melalui serangkaian tahapan seleksi, tes, dan wawancara. Sebagaimana disampaikan Amran, untuk pertamakalinya proses seleksi mengisi jabatan eselon I ini dilakukan dengan lelang terbuka. Harapannya tentu figur yang menduduki posisi tersebut adalah orang pilihan dengan keunggulan memimpin dunia peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk pertama kalinya jabatan Dirjen PKH dilelang. Apa nilai lebih Anda sehingga terpilih sebagai Dirjen PKH? Apa yang dipunyai?

Sebenarnya yang bisa menjawab pertanyaan ini bukan saya tetapi orang yang menguji saya dalam proses seleksi tersebut. Tetapi setidaknya saya menduga, ada dua hal penting yang saya miliki. Pertama, jejaring luas dengan berbagai kalangan mulai dari ribuan peternak kecil, kalangan birokrat, dan akademisi baik di dalam dan luar negeri.

Di pemerintahan bertahun-tahun saya menjadi narasumber penyusunan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, di kalangan pengusaha saya banyak dikenal melalui pemikiran yang sering saya tulis di majalah TROBOS sebagai dewan redaksi, dan media lainnya, serta sering diajak



berdiskusi dengan mereka, di kalangan akademisi saya menjadi ketua umum Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia, dan masih banyak aktivitas lain yang bersentuhan dengan banyak pihak. Kedua, saya dan teman-teman memiliki program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang sudah berjalan di beberapa kabupaten. Ini merupakan program pencerahan peternak kecil agar bersatu, mandiri, dan berdaya saing.

Untuk siapa atau pihak mana amanah ini didedikasikan?

Saya meyakini, yang membuat saya terpilih menjadi Dirjen PKH bukan karena pengaruh satu atau dua orang kuat tetapi karena doa ribuan orang lemah. Karena itu, amanah yang saya terima sebagai orang nomor satu di sekitar peternakan dan kesehatan hewan ini, akan saya dedikasikan kepada jutaan orang lemah tersebut terutama peternak kecil dimanapun berada.

Kalau tidak salah, Pak Muladno pernah menyebut 2 fokus utama yang akan digarap dalam menakhodai Ditjen PKH, pertama pada unggas membenahi keseimbangan *supply demand* untuk memperbaiki harga ayam dan telur, dan kedua pada sapi memperluas pengembangan SPR.

Betul sekali. Dua komoditas ini bisa mewakili cara pendekatan dalam membangun peternakan di Indonesia. Untuk ayam ras, dominasi dalam bisnis ini dikuasai oleh perusahaan besar berkekuatan modal dan teknologi. Sedangkan dominasi kepemilikan sapi secara keseluruhan dimiliki oleh peternak kecil.

Saya akan melakukan apapun dalam industri ayam maupun sapi dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan peternak kecil, pendapatan, dan kesejahteraannya. Saya akan menjadi orang terdepan, bukan orang teratas, dalam menghilangkan hambatan untuk memajukan peternakan di Indonesia. Dan jika semua langkah serta kegiatan yang saya lakukan sukses, maka itu dikarenakan banyaknya orang yang mendukung saya dari belakang. Tapi kalau langkah saya salah dan terjungkalkan, itu karena kebodohan saya.

Bagaimana sistem yang akan dijalankan untuk mengendalikan produksi DOC agar tidak banjir.

Industri perunggasan tengah dalam kondisi perang bisnis yang kurang sehat. Bagi saya ini sangat ironis karena komoditas ayam ras

merupakan industri biologis yang semua parameter teknisnya sudah dikendalikan oleh manusia secara akurat. Pola hidup ayam ras itu sudah seperti robot yang semuanya bisa diatur dengan akurasi tinggi. Ironisnya, menghitung *supply demand* saja seringkali salah yang berakibat harga jeblok dan peternak rugi hingga pernah mencapai akumulasi kerugian Rp 10 triliun.

Katanya banyak profesional tetapi menghitung *supply and demand* banyak salah. Artinya data populasi ayam yang digunakan tidak benar. Kalau data awalnya salah, analisa akhirnya pasti salah. Dan ini telah berlangsung bertahun-tahun. Saya akan melakukan pembenahan di data populasi ini. Saya akan siapkan *e-poultry* agar semua informasi tentang ayam ras ini dapat diakses semua pelaku perunggasan.

Koreksi konsep swasembada daging sapi dengan konsentrasi pada pembenahan peternak sapi, bukan semata-mata melihat *supply-demand* di pasaran. Penjelasan-nya?

Penelitian menunjukkan hanya 20% ternak lokal milik peternak kecil yang dijalankan secara komersial. Sisanya 80% dijalankan secara tradisional, ternak dianggap sebagai keluarga, memperlakukan ternak sapi terlalu istimewa sehingga rugipun diterima dengan pasrah karena ketidaktahuan. Saya ingin mengkonsolidasi peternak kecil agar mau belajar dengan orang kampus dan difasilitasi pemerintah sehingga menjadi peternak tangguh yang mampu meningkatkan produktivitas ternaknya. Saya ingin persentase di atas dibalik menjadi 80% peternak menjalankan secara komersial dan 20% secara tradisional.

Soal SPR, mungkinkah proses pembentukannya berupa aspirasi



dari bawah, dari dinas di daerah atau dari kelompok ternak?

Perbedaan dengan program lainnya, konsep SPR memfokuskan pada pembenahan peternak dan ternaknya. Hanya orang yang memiliki ternak yang dapat bergabung dalam SPR. SPR tidak melahirkan peternak baru dengan cara memberi bantuan ternak sapi. SPR akan melahirkan peternak profesional baru secara kolektif dengan cara memberi pengetahuan dan teknologi, keterampilan teknis dan manajerial, serta membangun jaringan pemasaran. Melalui SPR, saya ingin peternak yang menjadi penguasa di setiap lokasi SPR, yang menentukan arah dan kebijakan dalam berbisnis ternak sedangkan pemerintah akan memfasilitasi apa yang diinginkan peternak.

Bagaimana dengan organisasi internal Ditjen PKH yang tidak jarang dikeluhkan pihak swasta, peternak, dll? Adakah penataan atau re-orientasi?

Saya orang kampus yang masuk komunitas birokrat. Saya masih mempelajari dapur birokrasi saat ini. Yang mengeluh bukan saja swasta dan peternak kepada birokrat, tetapi para birokrat juga mengeluh kepada swasta dan peternak. Kedua pihak ingin berbuat terbaik tetapi hasilnya sebaliknya. Menata ini tidak mudah tapi saya akan mencobanya dengan sikap empati kepada semua pihak. Saya harus meninggalkan ke"aku"an saya dan harus bisa menjadi "mereka". Dengan begitu saya dapat mengidentifikasi birokrat yang baik dan yang tidak baik, swasta yang baik dan tidak baik, peternak yang baik dan tidak baik. Jadi saya harus sabar dan *ngemong* semua pihak, tidak menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak lain. Tapi jika ketahuan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar, ya tidak ada ampun. Yang salah wajib diganjar hukuman sedangkan yang benar diganjar hadiah.

Bagaimana cara Pak Muladno akan menghadapi tekanan kepentingan bisnis kekuatan besar, atau kekuatan politik, dll?

Yang penting saya lurus saja dan taat kepada aturan yang berlaku. Siapa saja saya persilakan mengendalikan atau menyetir saya dalam rangka menuju kebaikan dengan cara-cara profesional. Kekuatan besar saya rangkul untuk bekerjasama menyejahterakan rakyat banyak dan jutaan kekuatan kecil juga saya rangkul serta saya berdayakan untuk peningkatan kesejahteraannya. Jadi tidak merasa mendapat ancaman karena semua saya jadikan mitra untuk kemajuan bangsa Indonesia khu-

susnya di sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Bagaimanakah dukungan keluarga dalam meniti karir?

Istri kerja di Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), anak pertama kerja di PT. Nutrifood dan anak kedua masih sekolah. Alhamdulillah istri selalu memahami dan mengerti, dan anak saya juga tidak *neko-neko*. Mereka bertiga nyaman dengan apa yang mereka lakukan.

Istri saya sadar akan kesibukan menjadi Dirjen PKH. Dia maklum bila saya setiap hari pulang malam dan pergi pagi-pagi, sering ditinggal keluar kota. Dia menyadari bahwa saya sekarang milik publik yang tidak lagi hanya bersama keluarga tetapi melayani berbagai kalangan.■

Juli 2015

Nama : Prof Dr Ir Muladno MSA
Tempat/tanggal Lahir : Kediri, 24 Agustus 1961
Jabatan Fungsional Terakhir : Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (sejak 1 Oktober 2008)

Prestasi dan Aktivitas lainnya :

- Penggagas, Pendiri, dan Koordinator Program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR)-1111 IPB (2013 s.d. sekarang)
- Anggota Tim Teknis Keamanan Produk Rekayasa Genetik (2010 s.d. sekarang)
- Anggota Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (2003 s.d. 2009)
- Anggota Tim Revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga terbitnya UU RI No 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Anggota Komisi Nasional Bibit Ternak, Kementerian Pertanian RI (2008 s.d. sekarang)
- Anggota Dewan Redaksi Majalah TROBOS Livestock (2004 s.d. sekarang)

Parent Stock Mulai Dikurangi

Dikonfirmasi usai pertemuan terakhir dengan seluruh perusahaan pembibitan (*breeding*) nasional di Gedung C Kementerian Pertanian (3/11), Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Muladno memastikan afkir dini induk *broiler* (Parent Stock/PS) tahap pertama sudah terlaksana. Dari rencana tahap satu pemangkasan 2 juta ekor, 95% atau setara dengan 1,9 juta ekor PS sudah diafkir, melibatkan 15–17 perusahaan pembibitan di berbagai wilayah. “Antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, selebihnya saya lupa tadi,” terang Muladno kepada TROBOS Livestock.

Afkir dini induk *broiler* (PS) tahap pertama yang hampir 2 juta sudah terlaksana. Dipastikan, depopulasi 6 juta ekor PS sebagaimana direncanakan akan kelar sebelum akhir tahun

Sebelumnya, pemerintah menginstruksikan afkir dini PS sebanyak 6 juta ekor, untuk mengembalikan kembali keseimbangan *supply and demand* komoditas *broiler* nasional. Pertemuan pada 14 September berakhir dengan persetujuan 13 perusahaan pembibitan (*breeding*) nasional mengafkir 6 juta PS.

Di kesempatan berikutnya, dalam sebuah konferensi pers di Bintaro, Tangerang (17/10), Muladno mengatakan, tahap pertama akan diafkir 2 juta ekor, setelah itu bertahap sampai 6 juta ekor. Surat nomor 15043/FK.010/F/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, perihal penyesuaian populasi induk ayam (PS) pedaging, menginstruksikan para pelaku usaha pembibitan untuk segera melakukan penyesuaian dengan mengafkir dini PS sebanyak dua juta ekor.

Langkah revolusioner afkir dini 6 juta PS ini diambil pemerintah menyusul pasokan *broiler* dalam negeri yang diestimasi sudah di level *over supply*. Pangkas populasi PS dimaksudkan untuk mengerem laju produksi DOC (ayam umur sehari) *Final Stock* (FS) sehingga dapat mengembalikan keseimbangan *supply and demand* dan memperbaiki harga *broiler* hidup (*live bird*) di tingkat peternak.

Pembagiannya, PT Charoen Pokphand Indonesia CPI) mengambil bagian 50% dari total 6 juta PS yang diafkir secara nasional. Artinya 3 juta ekor PS CPI harus didepopulasi. Berikutnya PT Japfa Comfeed Indonesia

(JCI) 16%, atau harus mengafkir 960 ribu ekor. Sementara perusahaan lain masing-masing mengambil porsi afkir antara 0,35–7,24%.

Pemangkasan populasi PS ini, kata Muladno, tidak hanya diberlakukan kepada perusahaan pemilik *Grand Parents Stock* (GPS) atau “nenek indukan” saja. Tetapi perusahaan pembibitan yang hanya punya PS juga harus berkontribusi. Ada 12 perusahaan yang punya GPS plus PS, dan ada 4 perusahaan hanya punya PS. “Empat perusahaan ini mendapatkan PS dari yang 12 tadi. Dan yang 4 ini juga harus afkir PS-nya, mereka porsinya total 2,17% dari angka 6 juta ekor,” terang Muladno.

Muladno mengatakan, tindakan pengafkiran harus segera ditempuh untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa bisnis perunggasan belakangan ini. Kurun waktu 2–3 tahun terakhir banyak peternak rakyat gulung tikar karena harga ayam hidup di tingkat peternak yang selalu di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). “Harga ayam tertekan di bawah HPP terus. Peternak lebih sering babak belur daripada untung. Makin hari jumlah peternak kecil yang mati bertambah. Maka kita harus segera melakukan penyesuaian suplai,” kata dia. Kondisinya sudah darurat, penyelamatan peternak harus segera dilakukan.

Muladno sempat menyayangkan tidak dapat menyaksikan langsung pengafkiran tahap pertama. Meski demikian semua sudah berja-



lan. Ia membenarkan, dalam pelaksanaan pengafkiran tahap pertama ini masih terdapat kekurangan. Antara lain, tidak terpenuhinya dengan sempurna *standard operational procedur* (SOP) pengafkiran sebagaimana disepakati di awal. Seperti surat tugas yang membutuhkan proses tidak sebentar sedangkan jadwal pengafkiran telah ditentukan, sehingga petugas yang datang pun tidak sesuai SOP.

Muladno juga menginformasikan, pertemuan hari itu (3/11) bertujuan mengevaluasi pelaksanaan afkir dini tahap pertama, dan sekaligus menyusun perencanaan pelaksanaan tahap kedua sebanyak 4 juta ekor yang harus segera dieksekusi. “Evaluasi ini tadi semua saling terbuka dan semua peserta memiliki semangat yang bagus. Tidak ada niatan untuk mencurangi,” tegasnya. Kecurigaan dan ganjalan yang ada sudah dibuka transparan di forum tersebut, dan menurut Muladno semua dapat menerima afkir dini tahap pertama tidak ada masalah yang substantif.

Metode pengafkiran tahap pertama adalah dengan menjual PS afkir secara murah ke pelanggan masing-masing. Dijelaskan Muladno, banyak yang beralasan keberatan secara psikologis bila menerapkan metode *stamping out* (pemusnahan) alias dimatikan. Soal kekhawatiran berdampak mengganggu harga ayam di pasaran, Muladno mengatakan, “Ini tadi katanya semua baik-baik saja, tidak ada pengaruh pada harga ayam di pasar.”

Kepada TROBOS Livestock Muladno memastikan, afkir dini 4 juta PS yang tersisa akan rampung sebelum 2015 berakhir. “Jeda yang disepakati antar pengafkiran adalah sepuluh hari,” jelasnya. Dan perencanaan afkir tahap berikutnya dibuat lebih matang bersama GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas) agar pelaksanaannya lebih rapi, sesuai dengan SOP.

Teknis Afkir dan SOP

Dijelaskan Muladno, teknis pelaksanaan afkir, pelaku usaha pembibitan saling melakukan kontrol dengan diawasi oleh pemerintah. Kontrol dilakukan dengan pengawasan silang (*cross monitoring*). “Jadi saat pengafkiran di perusahaan A dilakukan, harus diawasi oleh perusahaan B dan C. Pelaksanaan depopulasi disaksikan 2 orang perusahaan, 1 orang pemerintah, dan 1 orang dari perguruan tinggi,” jabarnya.

Tugas pengawas, lanjut dia, adalah mengawasi jalannya proses pengafkiran. Mulai pengeluaran PS dari dalam kandang hingga keluar lokasi *farm*. Ia pun yakin akan profesionalitas para pengusaha, karena

saat PS telah keluar dari *farm* haram hukumnya dimasukkan kembali. “Setelah melaksanakan afkir dini PS, pelaku usaha harus segera melaporkan hasil penyesuaian tersebut kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui GPPU selaku koordinator pelaksana,” imbuhnya.

Muladno memaparkan, Kementerian Pertanian bersama pelaku usaha menetapkan tiga cara dalam melakukan pengafkiran PS. *Pertama*, ayam dilepas sebagai program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan pembibitan yang bersangkutan. *Kedua*, perusahaan dapat menjual atau melepas induk ayam tersebut ke pasar. Dan *ketiga*, perusahaan dapat melakukan *stamping out* untuk dapat segera memusnahkan induk ayam dalam waktu singkat. “Prosesnya kami serahkan kepada perusahaan karena masing-masing ada kekurangan. Kalau dijual ke pasar berpotensi merusak harga karena jumlahnya jutaan. Kalau CSR, siapa yang mau menyalurkan jutaan ekor. Sedangkan jika dimusnahkan, harus disediakan juga kuburannya,” jelas Muladno.■

November 2015

Konsolidasi Perunggasan

Oleh : Dr. Ir. Muladno, MSA

Kondisi perunggasan saat ini yang sedang mengalami pasokan berlebih, diperlukan pembenahan secara menyeluruh sehingga dapat menaikkan harga ayam ditingkat peternak.

Pasokan anak ayam umur sehari (*Day Old Chick/DOC*) *Final Stock* (FS) yang berlebih pada tahun 2014 berimbas pula terhadap banjirnya ayam hidup di pasar, sehingga telah menyebabkan harga ayam di bawah HPP (Harga Pokok Produksi). Kalangan peternak yang telah membudidayakan ayam *broiler* ini mengeluhkan kondisi yang ada karena mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Dengan kondisi tersebut, pihak Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), merasa perlu untuk membantu kondisi peternak yang sudah banyak mengalami kerugian, bahkan ada di antara mereka yang telah gulung tikar. Beberapa kebijakan pun diambil untuk dapat menstabilkan kondisi harga ditingkat peternak, diantaranya ialah dengan melakukan *cutting HE* (*Hatching Egg*), afkir dini *Parent Stock* (PS), mengendalikan impor GPS (*Grand Parent Stock*), dan menutup impor GGPS (*Great Grand Parent Stock*).

Namun ditengah kebijakan yang sedang berjalan, afkir dini PS yang telah dilakukan sebanyak 3 juta ekor ini ternyata mendapatkan perhatian dari pihak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Alasan yang digunakan pihak KPPU untuk melarang dan meminta afkir dini dihentikan adalah tidak adanya landasan hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau lainnya. Dalam perkembangannya ternyata kebijakan tersebut malah ditengarai adanya kartel dimana didalamnya ada pemerintah, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH).

Pemahaman

Sebenarnya, menurut saya, adanya tuduhan kartelisasi perusahaan yang terjadi saat ini tampaknya karena masih ada pemahaman yang belum sama. Pemahaman mengenai industri perunggasan antar kompo-



nen bangsa itu belum sama. Hal ini membuat tindakan kesepakatan yang dilakukan perusahaan pembibitan unggas dimaknai berbeda-beda. Seperti halnya yang terjadi pada penghentian afkir dini PS.

Kesepakatan bisnis untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok itu dinamakan persekongkolan. Namun ada juga kesepakatan bisnis untuk membantu peternak kecil atau membantu pemerintah secara umum agar membuat nyaman semua pelaku perunggasan. Kesepakatan ini bisa disebut konsolidasi kebaikan. Dan yang terakhir ini yang saya meyakini perlu adanya afkir dini PS yang proporsinya harus dirundingkan dan disepakati.

Jujur saja, saya tetap meminta pihak KPPU untuk izin dapat meneruskan afkir dini PS sambil menunggu terbitnya landasan hukumnya demi peningkatan harga ayam hidup di atas HPP. Belum adanya keseragaman pemahaman tentang afkir dini dan lebih khusus lagi belum adanya kesamaan pemahaman tentang industri perunggasan harus dapat memicu dilakukannya pembenahan secara komprehensif.

Penataan Perunggasan

Penataan itu kalau bisa semuanya, tidak parsial. Mulai dengan revisi total Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pendataan populasi bibitnya secara akurat, skema perizinan dan kebijakan yang harus berkeadilan, sampai ke penataan hilirisasinya. Pembenahan ini memerlukan sikap empati dan meninggalkan egonya, sikap jujur dan meninggalkan kebohongan, sikap *teposehiro* dan meninggalkan sikap

menang sendiri, dan lain sebagainya. Karena industri ini tumbuh pesat tetapi kurang terkontrol, maka pembenahan kondisi tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar tetapi jangan juga terlalu lama.

Setiap orang maupun perusahaan harus bisa saling membesarkan dan saling memperkuat sehingga semua dapat bertumbuh secara lebih sehat. Sepanjang semua memiliki niat yang baik dan untuk kejayaan bangsa, saya yakin industri ini dapat diatur agar semua nyaman dalam memperoleh hak hidupnya. Niat dan nurani menjadi sangat penting karena industri perunggasan ini sudah dikendalikan dengan teknologi secara total. Semua terukur dan dapat diprediksi secara sempurna. Ditambah lagi dengan kualitas sumber daya manusia yang makin baik dan difasilitasi teknologi informasi yang juga banyak mempermudah. Jadi mestinya industri ini seharusnya dapat menjadi sangat efisien dan produktif, dan mestinya tidak pernah rugi.

Kita sudah berada di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menjadikan negara-negara anggota ASEAN sebagai pasar bersama. Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar tentu saja menarik bagi para pengusaha asing. Akan salah besar jika para pengusaha Indonesia hanya bermain di pasar domestik saja dengan dalih pasar terbesarnya di Indonesia. Untuk produk apa saja, para pengusaha harus berpikiran untuk melakukan ekspor, ekspor, dan ekspor. Dengan mampu melakukan ekspor, sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut berdaya saing sehingga harga domestikpun menjadi lebih terjangkau.

Jika kita hanya berorientasi pasar domestik, maka yang ada hanya ribut saja sehingga banyak energi terbuang tanpa mampu meningkatkan daya saing. Kekompakan sesama anak bangsa tidak terwujud yang mengakibatkan kekuatan asing lebih menguasai. Semua dirugikan dan jika dibiarkan akan membuat penderitaan mayoritas penduduk kita sendiri. Cepat atau lambat kebijakan apapun tak akan lagi mampu membandung masuknya produk asing ke Indonesia karena era globalisasi akan semakin menuntut keterbukaan dan profesionalitas.

Dalam penataan industri dan usaha perunggasan ke depan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan (Dirjen PKH) dalam membantu permasalahan yang ada, perlu kehati-hatian. Tidak semua hal terkait ternak adalah urusan Dirjen PKH. Ada peran institusi lain yang dapat dan harus membuat dunia peternakan dan kesehatan hewan makin kondusif.

Sebenarnya sudah cukup banyak aturan dibuat berdasarkan kori-

dor masing-masing sehingga setiap instansi diharapkan dapat memperkuat tugas pokok dan fungsinya untuk tujuan yang sama yang dalam hal ini adalah “mewujudkan industri dan usaha perunggasan serta menjadikan masuknya produk asing ke Indonesia menjadi musuh bersama”. Musuh bersama ini tidak akan dapat dilawan dengan regulasi semata tetapi harus dilawan dengan profesionalitas, efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Untuk perusahaan besar dengan dukungan finansial, teknologi, dan jaringan yang kuat, mereka bisa mengurus dirinya sendiri. Namun bagi peternak kecil, pemerintah harus melakukan segala daya upaya agar mereka dapat berdampingan dengan perusahaan besar untuk melawan musuh bersama itu.

Perunggasan Masa Depan

Saya ingin mengajak seluruh pelaku perunggasan untuk menata perunggasan kita secara komprehensif. Sejak dimulainya usaha ayam ras sampai hari ini, usaha ini dibiarkan berkembang sendiri tanpa intervensi pembinaan dari pemerintah. Hampir tidak ada anggaran sepeserpun keluar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pembinaan peternak kecil yang bergerak di komoditas ini. Seolah pemerintah meyakini bahwa industri itu akan mampu berkembang sendiri.

Fakta hari ini menunjukkan bahwa peran pemerintah harus ada dan harus besar dalam mewujudkan industri perunggasan yang lebih baik dan berdaya saing. Ketidakhadiran negara telah membuat pelaku dengan kekuatan besar menjadi semakin besar di satu pihak tetapi terus mematikan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kekuatan besar dalam banyak aspek. Negara harus dapat membuat pelaku berkekuatan besar dan kecil berbisnis berdampingan dengan semangat saling membesarkan dan saling menguatkan dalam rangka melawan musuh bersama Indonesia yaitu “masuknya produk asing ke Indonesia”.

Saya siap melakukan apa saja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan para pelaku industri dan usaha perunggasan, untuk melayaninya, dan mempermudah segala urusan yang diperlukan. Kuatkan persatuan kita untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih. *Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.* ■

Maret 2015

Dari Para Ketua Asosiasi untuk Muladno

Heru Setijanto

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI)

Realita di luar kandang merupakan gagasan sangat menarik, namun dengan menggunakan data statistik yang akurasinya tidak tepat, yang kenyataannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka impian Profesor Muladno sulit terwujud.... Akan tetapi secara tegas dan lugas, Profesor Muladno mengajak kita untuk meredefinisi politik pembangunan peternakan. Pengembangan peternakan berikut sarana produksinya tidak dapat dipisahkan dengan pengamanan peternakan, artinya Sistem Peternakan Nasional harus berdampingan, sinergis dan harmonis dengan Sistem Kesehatan Hewan Nasional.

Irawati Pari

Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indonesia (Asohi)

Buku ini bisa menjadi bukti komitmen Prof Muladno untuk melakukan transformasi kebijakan peternakan ke arah yang lebih baik. Juga menstabilkan industri peternakan secara menyeluruh sesuai dengan yang diupayakan pemerintah.

Ishana Mahisa

Ketua Umum *National Meat Processor Association* (Nampa)

Mendukung gagasan Pak Muladno yang sangat visioner untuk mengubah paradigma pembangunan peternakan yaitu harus ada perubahan besar dalam membangun peternakan di Indonesia. Perubahan dari nuansa “perdagangan” ke nuansa “peningkatan produktivitas ternak.” Banyak terobosan yang perlu dibuat untuk menjadikan peternakan di Indonesia lebih mandiri dan peternaknya berdaulat di mana “Peternakan Harus Dibangun dari Pinggir”.

Perlu keberanian dan nyali besar untuk mengubah paradigma

peningkatan produktivitas yang memerlukan ketekunan, ketelatenan, dan waktu yang tidak sebentar dibandingkan pendekatan perdagangan yang hanya bersifat instan.

Fitri Nursanti Poernomo **Ketua Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner** **Indonesia (Askesmaveti)**

Prof Muladno adalah satu dari sedikit akademisi yang sangat akrab dengan realita dunia peternakan Indonesia. Seringnya beliau menyaksikan dan mendengar sendiri persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan *stakeholders* peternakan tanah air, membuatnya semakin paham akan kebutuhan hadirnya pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat dalam membangun peternakan Indonesia. Syukurlah hal ini juga yang mengantarkannya menjadi orang pertama di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Dalam masa kepemimpinannya diharapkan sejumlah isu global seperti status kesehatan hewan, keamanan pangan, dan sistem pengawasan keamanan pangan asal hewan harus lebih menjadi perhatian pemerintah. Sebab, sangat erat hubungan kesehatan hewan dan kesehatan manusia karena risiko yang ditimbulkan dari hewan terhadap kesehatan manusia, seperti *zoonosis* dan *food born diseases*. Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan bagian penting yang menjadi penghubung antara bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan kesehatan manusia. Selain itu masih banyak PR yang harus diselesaikan dalam mengantisipasi berbagai isu global dan daya saing produk peternakan Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan dirijen yang dapat meng-*orquestra stakeholders* peternakan dan kesehatan hewan Indonesia untuk bekerjasama, bekerja keras, dan bekerja cerdas.

Bambang Suharno **Ketua Forum Media Peternakan (Format)**

Sikap pengabdian sepenuh jiwa untuk dunia peternakan dan bukan sekedar untuk menjadi pengajar di kampus mendorong Prof Muladno sejak lama sibuk dan berkarya di dalam maupun luar kampus melalui ber-

bagai organisasi. Karya paling monumental adalah Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang sudah mulai dijalankan sejak beberapa tahun lalu, dan kini disinergikan dalam Sentra Peternakan Rakyat.

Buku *Realita di Luar Kandang* jilid 2 menunjukkan betapa tingginya kepedulian Prof Muladno terhadap dunia peternakan nasional. Di dalamnya bukan sekedar analisa dan opini melainkan tersirat sebuah impian besar mengenai masa depan peternakan Indonesia, yang tentunya mewakili impian para peternak Indonesia. SPR adalah sebuah “key point” untuk menyukseskan peternakan di masa depan. Untuk itu publik selayaknya mendukung dan mengawal agar impian besarnya menjadi kenyataan.

Hafid Wahyu

Ketua Dewan Gapuspindo (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia)

Buku *Realita di Luar Kandang II* menyodorkan konsep perubahan yang apabila dilaksanakan dengan tepat dapat memicu perubahan industri peternakan nasional secara revolusioner. Meningkatkan produksi daging sapi secara cepat dengan menggerakkan 40 ribu peternak di seluruh sentra-sentra produksi ternak untuk masuk dalam usaha penggemukkan sapi dengan masing-masing peternak memelihara 20 ekor sapi potong untuk siklus 4 bulan (5 ekor per bulan, 60 ekor per tahun sehingga dapat diandalkan sebagai sumber nafkah).

Potensi sapi yang akan digemukkan berjumlah sekitar 2,4 juta ekor pertahun (16% dari populasi). Usaha penggemukkan ini akan meningkatkan produktivitas daging sapi sekitar 25%, sehingga total setara produksi 3 juta ekor sapi atau sekitar 545 ribu ton daging layak konsumsi (5,5 ekor per ton). Produksi daging ini dari rumah potong bisa langsung memasok industri rumahan seperti bakso, rendang, dendeng, abon, soto, sop tanpa terlalu banyak perantara.

Enam juta peternak petani yang selama ini menggarap 15 juta ekor populasi sapi potong di dalam kandang mereka sebagai tabungan, apabila dikelola melalui SPR dapat memasok langsung 3 peternak penggemukkan di daerah sekitar mereka dengan sapi bakalan. Setiap SPR dengan populasi 1.000 ekor bisa memasok sampai 18% dari populasi (180 ekor) sapi bakalan per tahun. Keseluruhan perubahan ini tentu saja harus digerakkan pemerintah dengan membuat regulasi yang tepat dan

bijak, serta menjalankan fungsi fasilitator dan dinamisator seperti disampaikan dalam buku *Realita di Luar Kandang II*”.

Sofyan Sjaf **Sekretaris Jenderal Hilpi (Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia)**

Buku ini menginspirasi kita bahwa sektor teknis (seperti peternakan) tidak bisa diselesaikan dari perspektif teknis saja. Melainkan dibutuhkan kolaborasi perspektif. Pergulatan pemikiran dari pengalaman penulis yang disampaikan dalam buku ini, telah membuka “jendela baru” bagaimana membangkitkan sektor peternakan yang memiliki arti penting dan substansi di negeri ini. Ibarat “penggembala”, Prof Muladno dengan sabar menggiring kita untuk mencermati fakta-fakta riil sektor peternakan yang terkadang kita lupakan atau mungkin sengaja dilupakan!

Dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh berbagai pihak, buku ini mencirikan sikap seorang intelektual organik, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan keberpihakan! Sikap konsisten inilah yang selalu dipegang penulis ketika berinteraksi dengan orang lain, termasuk ketika penulis diamanahkan menjadi Dirjen PKH hingga kini.

Achmad Dawami **Ketua Umum Arphuin (Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia)**

Prof Muladno dikenal sejak dulu sebagai sosok yang tidak pernah bosan belajar dan menyerap informasi atau pendapat orang lain yang kemudian dikaji untuk dijadikan suatu kesimpulan yang bervisi. Meskipun saat ini menjadi pejabat tertinggi di dunia peternakan Indonesia secara konsisten hal itu tetap dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu ide-ide cemerlang yang selalu akan dikawal untuk dapat direalisasikan demi kemajuan peternakan Indonesia yang disokong oleh kekuatan seluruh lapisan masyarakat peternak di Indonesia. Saatnya dunia peternakan Indonesia bangkit dengan tatanan yang lebih terstruktur agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat konsumen dan produsen dari segala lapisan pada masa yang akan datang.

Ali Agus

Ketua Umum PB ISPI (Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia)

Salah satu ciri seorang akademisi tulen antara lain adalah berpikir kritis, selalu mencari jawaban atas akar persoalan, dan nurani yang gelisah atas apa yang terjadi di luar kampusnya. Fenomena sosial kemasyarakatan khususnya yang terkait dengan disiplin ilmu yang digelutinya berhasil direkam dengan baik. Kompilasi karya pikir yang tersaji dalam berbagai tulisan adalah wujud kegalauan sosial seorang ilmuwan Prof. Dr. Muladno yang selama ini rajin menuliskan gagasan alternatif solusi persoalan pembangunan peternakan. Prof. Muladno adalah salah satu sosok akademisi tulen yang galau melihat pembangunan peternakan belum berjalan sesuai harapan.

Setidaknya buku 'Realitas di Luar Kandang' yang ditulis dengan gaya bahasa ilmiah populer, mudah dicerna, dan memuat kumpulan gagasan beberapa tahun terakhir ini mensyiratkan kegelisahan tersebut. Persoalan swasembada daging sapi, akurasi data yang dapat mengakibatkan suboptimalnya kebijakan pemerintah, ketidakberdayaan peternak rakyat, carut-marut tataniaga perunggasan (petelur dan pedaging), hingga gagasan pemberdayaan peternak rakyat melalui SPR (sekolah/sentra peternakan rakyat) telah terangkum dalam buku ini.

Patut kita sambut gembira terbitnya buku ini untuk dibaca dan dikritisi bersama. Apalagi sang penulis saat ini sedang mengemban amanah sebagai 'panglima tertinggi' di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia, perlu kita dukung dan doakan agar mampu menjalankan program-program pembangunan peternakan dengan baik dan sukses melalui berbagai gagasan program sebagaimana yang tersaji rapi dalam buku ini. Semoga kehadiran buku ini bisa mencerahkan, memberikan kemanfaatan, kebaikan, dan kebahagiaan kepada seluruh *stakeholders* peternakan Indonesia.

Anton J Supit

Ketua Gappi (Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia)

Prof Muladno sudah cukup lama melakukan studi di bidang peternakan dan sangat menaruh perhatian di dunia perunggasan. Dalam in-

teraksinya, Prof Muladno merupakan orang yang sangat terbuka, memiliki nalar tinggi dan obsesi agar peternakan Indonesia berkembang sebagai suatu usaha ekonomi. Dalam arti, selain memenuhi protein hewani bangsa juga membantu ekonomi rakyat karena konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia saat ini masih sangat memperhatikan dilihat dari konsumsi per kapita per tahun.

Perkembangan sektor peternakan yang belum maksimal khususnya di komoditas sapi yang telah didanai pemerintah cukup besar tapi hasilnya belum memadai dalam arti populasinya masih rendah. Sangat kontradiksi dengan perunggasan yang tidak mendapat perhatian pemerintah malah berkembang cukup pesat sampai *over supply* (kelebihan pasokan). Keadaan populasi sapi yang rendah mengakibatkan kelangkaan dan *over supply* unggas mengakibatkan banyak petani yang menderita bertahun-tahun. Kedua permasalahan ini memerlukan kepemimpinan yang mengerti akar permasalahannya dan bisa mengatasinya. Buku Prof Muladno ini bisa jadi adalah jawaban dari 2 permasalahan yang sedang kita hadapi ini yaitu menjamin terpenuhinya protein hewani bangsa serta kesejahteraan peternak dan rakyat.

Herry Dermawan

Ketua Umum GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional)

Prof Muladno sudah sangat familiar di dunia peternakan karena sebelum menjadi Dirjen PKH sudah menjadi aktivis peternakan. Sekarang lah waktunya menuangkan segala teori dan argumen menjadi kenyataan walaupun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah mulai dari peternak kecil sampai dengan perusahaan peternakan yang sudah multinasional. Alangkah indahnyalah hidup apabila kita bisa merealisasikan apapun yang sudah kita rencanakan dan saya yakin Prof Muladno bisa.

Singgih Januratmoko

Ketua Umum Pinsar Indonesia (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia)

Prof Muladno sangat sederhana dan teguh pada pendiriannya akan tetapi tetap mau menerima masukan dari orang lain. Kita harap-

kan Prof Muladno dapat menata perunggasan yang sudah carut-marut ini dan semua idenya dapat terealisasi dan bermanfaat bagi perunggasan di tanah air. Apalagi peternak mandiri UMKM saat ini pada posisi titik nadir sehingga diharapkan Prof Muladno mampu dan selalu konsisten dengan ide-ide untuk membangkitkan peternak mandiri UMKM seperti sebelum 2010.

Sauland Sinaga **Ketua Umum Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI)**

Buku ini adalah buah pikiran yang menjadi sebuah harapan di tengah tarik menarik kepentingan kapitalisme dan peternakan rakyat. Masalah peternakan rakyat (80% anggota AMI) di luar kandang seperti jaminan tata ruang, pasar, dan sapronak (sarana produksi ternak) sangatlah mengganggu keberlanjutan usaha peternakan ini. Kolektif manajemen dengan SPR-nya yang ditawarkan buku ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah di atas. Penulis yang telah merangkum masalah peternakan di luar kandang menjadi suatu landasan kebijakan ke depan yang harus kita dukung bersama, demi tercapainya ketahanan protein hewani.

Rachmat Priatna **Ketua Umum DPP HPDKI (Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Peternak Domba & Kambing Indonesia)**

Buku realita di luar kandang sebagai sebuah kritikan terhadap pelaku peternakan, termasuk (terutama) Pemerintah Pusat maupun Daerah yang belum memahami arti atau makna peternakan. Sebagai contoh, Prof Muladno memaparkan realita penambahan bibit yang terjadi sampai saat ini hanyalah pemindahan secara geografis. Juga kekhawatiran pemerintah terhadap pemotongan betina produktif. Padahal peternak tahu kenapa betina tersebut dijual sebagai pedaging, tentunya karena tidak memenuhi kriteria bibit dan sebagai peternak menganggap ternak tersebut sebagai “final stock”. Mudah-mudahan buku “Realita di Luar Kandang II” ini bisa menjadi dan dapat dipedomani oleh Pemerintah yang belum sepenuhnya pro peternak.

Don P Utoyo

Ketua FMPI (Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia)

Produk unggas telur dan daging ayam sebagai komoditas pangan sekaligus komoditas bisnis/perdagangan yang strategis karena investasi dilakukan oleh swasta dan masyarakat, bukan oleh pemerintah, sehingga terjadi persaingan bisnis ketat. Persaingan ini bukan hanya antar pelaku di dalam negeri, melainkan yang akan datang justru yang paling berat dihadapi nanti ialah gempuran produk-produk asal luar negeri sebagai akibat dari perdagangan dunia yang cenderung semakin bebas.

Pemerintah tentu harus menjaga pasokan (*supply*); mengukur permintaan (*demand*), serta mengutamakan kepentingan dalam negeri agar tidak terjadi spekulasi yang mengakibatkan gejolak harga yang dapat merugikan para pelaku maupun konsumen produk daging dan telur ayam. Untuk itu, harus tersedia data *supply* dan data *demand* yang valid, dipercaya oleh semua pengguna baik produsen, konsumen, maupun pemerintah.

Saya menghargai upaya-upaya yang sedang dilakukan Prof Muladno. Tentu tidak bisa dilakukan dalam sekejap seperti membalik tangan, perlu proses sampai data tersebut betul-betul mantap. Demikian pula, untuk menciptakan suatu keseimbangan, keuntungan semua pihak besar dan kecil secara berkelanjutan, termasuk untuk promosi/kampanye gizi diperlukan pembiayaan besar; faktanya tidak cukup tersedia dalam anggaran pemerintah, maka upaya pungutan berupa *levy/check-off* (jumptan) yang sudah dikonsepsi lama oleh jajaran perunggasan perlu diimplementasikan segera seperti halnya yang sudah berhasil diterapkan di industri perkebunan (sawit & karet). Meski banyak kendala intern maupun eksternal, mudah-mudahan itikad baik dan upaya keras yang sedang dilakukan Prof Muladno dapat diwujudkan dalam periode masa jabatannya sebagai Dirjen PKH.

Tri Wahyu Utomo

Ketua Umum PB Ismapeti (Pengurus Besar Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia)

Sebuah pemikiran luar biasa dari Prof Muladno. Buku ini membahas konsep *grand design* pengembangan peternakan Indonesia yang siste-

matis dan terstruktur dengan segenap problematika dari segala dimensi di bidang peternakan secara kompleks dari hulu hingga hilir serta peran sentral pemerintah yang begitu jelas. Sangat informatif dan memotivasi serta menjadi gambaran besar bagi para pejuang bidang peternakan khususnya mahasiswa sebagai kader muda harapan masyarakat Indonesia.■

Biodata Penulis

Muladno alias Agus Muladno alias Kanang dilahirkan di Kediri pada tanggal 24 Agustus 1961 dari orangtua (Alm) Basar dan Hj. Asyati. Tanggal 26 September 1987, menikahi Sri Sulandari (Alm), puteri keempat dari (Alm) Soetowo dan (Alm) Soegiharti. Kini dikaruniai dua orang anak, yaitu Aussie Andry Venmarchnanto dan Endyea Mendelian Lecturarisetia.



Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di SD, SMP, dan SMA Negeri di Kediri, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Peternakan UGM, lulus dan memperoleh gelar sarjana peternakan tahun 1985; lulus dan memperoleh gelar *Master of Science in Agriculture* dari *University of New England*, Australia tahun 1990; lulus dan memperoleh gelar Doktor (PhD) dari *University of Sydney*, Australia tahun 1995. Penelitian yang dilakukan untuk studi doktornya adalah memproduksi DNA marker dalam rangka pembuatan peta genetik babi.

Segera setelah menyelesaikan studi doktornya, melanjutkan penelitian genom babi di *National Institute of Animal Industry*, Jepang sampai pertengahan 1996 atas biaya dari *Science and Technology Agency of Japan*; kemudian dilanjutkan di *STAFF Institute*, Japan atas biaya dari *Japan Race Association* sampai pertengahan tahun 1997; dan terakhir di *Nagoya University* selama dua bulan tahun 1998 atas biaya dari *Japan Society for Promotion of Science (JSPS)*.

Selama menjadi staf pengajar di Fakultas Peternakan IPB, aktif melakukan penelitian dan kajian di bidang peternakan khususnya aspek pemuliaan dan genetika. Sumber dana penelitian diperoleh dari program Riset Unggulan Terpadu, *Toray Foundation*, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *International Atomic Energy Agency (IAEA)*, dan lain-lain. Bersama dengan para sejawatnya di Bagian Pemuliaan dan Genetika Ternak serta dukungan penuh dari Dekan Fapet IPB, Muladno memimpin pendirian Laboratorium Genetika Molekuler Ternak yang mulai difungsikan penggunaannya secara resmi pada akhir tahun 2009 dan sampai sekarang menjadi Kepala Laboratorium tersebut.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pengembangan dan Kerjasama Sekolah Pascasarjana IPB 2008-2012, pernah diberi amanah

menjadi Sekretaris Program Studi Teknologi Produksi Peternakan tahun 1998 dan Ketua Program Studi Teknologi Produksi Peternakan 1998-2001. Selain itu, aktif sebagai narasumber di berbagai Lembaga Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Pemerintah, dan Perusahaan Konsultan. Sampai saat ini, juga masih menjadi anggota Dewan Redaksi Majalah Agribisnis Peternakan, TROBOS Live-stock.

Di bidang keprofesian dan sosial kemasyarakatan, pernah bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI), salah satu Ketua Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB-ISPI), Pengurus Yayasan Keluarga Istimewa Indonesia (YKII), Ketua Tim Penilai Indolivestock Award; dan salah satu deklarator pendirian Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI).

Hingga sekarang juga masih aktif menjadi anggota Tim Teknis Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan, anggota Komisi Perbibitan Ternak, anggota Tim Perumus dan Penyusun *Blue Print* Pengembangan Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Lokal, dan Kambing/Domba, anggota Tim Perumus dan Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumberdaya Genetik dan Perbibitan Ternak, serta anggota tim Perumus dan Penyusun Undang Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan anggota Komisi Nasional Sumber Daya Genetik sejak 2012.

Sebagai akademisi, telah membimbing dan meluluskan lebih dari 56 mahasiswa S1, 16 mahasiswa S2, dan 15 mahasiswa S3; menulis lima judul buku, menjadi editor lima judul buku, menerjemahkan satu judul buku, menulis kolom/opini lebih dari 100 judul, memublikasikan puluhan artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Adapun penghargaan yang pernah diterima adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, dan TROBOS Award untuk Mitra Pemikir Pembangunan Peternakan.

Sejak 1 Juni 2015 lalu, penulis diberi amanah oleh pemerintah sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Sejak September 2015, terpilih menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).■